

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES



Journal of Political Issues | E-ISSN 2685-7766 | Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025 | Edisi Juli | 01-86 | jpi@ubb.ac.id

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN
7	1	Juli 2025	01 - 86

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Desa Balunjuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Email: jpi@ubb.ac.id | E-ISSN 2685-7766



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tiga kalimat huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Kemanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES TERINDEKS DI:



Volume 7 Nomor 1, Juli 2025

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Januari oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):
Tiara Elgi Fienda

Redaktur (*Managing Editor*):
Komang Jaka Ferdian

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Dr. H. S. Tisnanta
Dr. Yusa Djuyandi
Dr. Oki Hajiansyah Wahab

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin
Yeby Ma'asan Mayrudin
Restu Rahmawati
Sandy Pratama
La Ode Muhamad Muliawan
Restu Karlina Rahayu
Ranto
Nona Evita

Copy Editor & Lay Out Editor:
Robing

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Ibrahim (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)
Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)
Dr. Leo Agustino (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)
Dr. Luthfi Makhasin (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah)
Dr. Agung Wibowo (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah)
Dr. Ratnia Solihah (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat)
Dr. Sulistya Ekwati (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)
Dr. Yusnarida Eka Nizmi (Hubungan Internasional, Unviersitas Riau, Riau)
Dr. Pahrudin HM (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)
Dr. Ardli Johan Kusuma (Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta)
Dr. Poni Suekaesih Kurniati (Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia)
Dr. Ika Riswanti Putranti (Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro)
Dr. I Gede Eko Putra Sri Sentanu (Administrasi Publik, Universitas Brawijaya)
Dr. Rizki Damayanti (Hubungan Internasional, Universitas Paramadina)
Dodi Faedlulloh (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Alamat:

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: jpi@ubb.ac.id
Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>
e-ISSN: 2685-7766

DAFTAR ISI

Strategi Hegemoni China melalui Belt Road Initiative: Implikasi terhadap Tata Kelola Politik dan Keamanan di Asia (Fadhl Zikri, Rizki Damayanti) https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.316	01-16
Narasi Selat Muria dalam Membentuk Persepsi Publik atas Banjir Besar Demak Maret 2024: Sebuah Analisis Wacana Kritis (Habib Yudha Pratama, Mustabsyirotul Ummah Mustofa) https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.282	17-33
Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan Strategi Penguatan (Burlian Senjaya, Pahrudin HM) https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.323	34-45
Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998 (Yusa Djuyandi, Arfin Sudirman, Nanang Suryana) https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337	46-56
Diverging Views, Shared Interests: Japan-India Security Partnership (Satrio Agung Wicaksono) https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.343	57-70
Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis (Nabila Azzahra, Mohammad Ali Andrias, Faisal Fadilla Noorikhsan, Komang Jaka Ferdinand, La Ode Muhamad Muliawan) https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.321	71-86

PENGANTAR REDAKSI

Salam Hangat . . .

Redaksi dengan bangga mempersembahkan Journal of Political Issues Volume 7, Nomor 1, edisi Juli 2025. Di tengah kompleksitas tantangan global dan domestik, edisi ini hadir untuk membedah berbagai dimensi kekuasaan, mulai dari rivalitas hegemoni internasional, diskursus bencana, hingga praktik politik di tingkat akar rumput. Keenam artikel yang terhimpun dalam edisi ini menawarkan analisis kritis mengenai bagaimana aktor-aktor politik berupaya mempertahankan pengaruh dan merespons perubahan struktural di lingkungannya masing-masing.

Sebagai pembuka, artikel pertama ditulis oleh Fadhl Zikri dan Rizki Damayanti yang membahas strategi China dalam membangun hegemoni baru di Asia melalui implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI). Penulis menyimpulkan bahwa inisiatif tersebut merupakan bentuk merkantilisme modern yang memperkuat dominasi politik dan ekonomi China, meskipun menyisakan kekhawatiran terkait jebakan utang di negara mitra. Bergeser pada dimensi politik lingkungan dan media artikel kedua ditulis oleh Habib Yudha Pratama dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa yang membahas relasi kuasa dan praktik kewacanaan di balik viralnya narasi "Selat Muria" saat peristiwa Banjir Besar Demak 2024. Penulis menyimpulkan bahwa narasi tersebut berfungsi sebagai mitos yang menyederhanakan kompleksitas data ekologis serta mengalihkan perhatian publik dari fakta material yang lebih mendesak dalam penanganan bencana. Isu representasi dan demokrasi menjadi sorotan selanjutnya, artikel ketiga yang ditulis oleh Burlian Senjaya dan Pahrudin HM yang membahas hambatan struktural dalam implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi. Penulis menemukan bahwa budaya patriarki yang mengakar serta mekanisme seleksi yang bias gender menjadi faktor utama kegagalan pemenuhan kuota 30% di wilayah tersebut.

Melengkapi diskusi demokrasi di tingkat nasional, artikel keempat ditulis oleh Yusa Djuyandi, Arfin Sudirman, dan Nanang Suryana yang membahas dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-reformasi 1998 sebagai proses transisi menuju supremasi sipil yang ideal. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun terdapat indikasi positif dalam demokratisasi, reformasi TNI dan kontrol sipil belum sepenuhnya terwujud sehingga potensi konflik serta ketidakseimbangan kekuasaan masih perlu diwaspadai. Kembali pada ranah politik internasional, artikel kelima ditulis oleh Satrio Agung Wicaksono yang membahas pergeseran strategi keamanan Jepang pasca-Perang Dingin dengan memilih India sebagai mitra strategis non-tradisional di luar aliansi Amerika Serikat. Melalui kerangka realisme neoklasik, penulis menemukan bahwa keputusan ini didorong oleh tekanan sistemik akibat kebangkitan Tiongkok serta persepsi positif pemimpin Jepang terhadap kesamaan nilai demokrasi di kawasan Indo-Pasifik. Terakhir, artikel keenam ditulis oleh Nabila Azzahra, Mohammad Ali Andrias, Faisal Fadilla Noorikhsan, Komang Jaka Ferdian, dan La Ode Muhamad Muliawan yang membahas fenomena kemenangan kandidat berlatar belakang kontroversial dalam Pemilihan Kepala Desa Purwadadi melalui kacamata teori patronase dan klientelisme. Penulis menyimpulkan bahwa praktik pembelian suara dan pemberian hadiah menjadi faktor penentu kemenangan yang diperkuat oleh pragmatisme serta budaya politik subjek masyarakat setempat.

Redaksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah mempercayakan gagasan akademiknya pada Journal of Political Issues, serta kepada para mitra bestari yang telah memberikan ulasan kritis demi menjaga kualitas publikasi. Kami berharap kumpulan pemikiran yang tertuang dalam edisi ini dapat memberikan

kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu politik, memperkaya literatur akademik, sekaligus menjadi referensi yang relevan bagi para pengambil kebijakan dan pegiat sosial.

Selamat membaca

Strategi Hegemoni China melalui Belt Road Initiative: Implikasi terhadap Tata Kelola Politik dan Keamanan di Asia

Fadhl Zikri¹ , Rizki Damayanti^{1*} 

¹Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina, 12790, DKI Jakarta- Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Jan 17, 2025

Accepted: Apr 22, 2025

Published: May 23, 2025

Kata Kunci:

Belt and Road Initiative; China;
Hegemony; International
Political Economy; Modern
Mercantilism.

Penulis Koresponden:

Rizki Damayanti

Paramadina Graduate School of
Diplomacy,
Universitas Paramadina.

Email:

rizki.damayanti@paramadina.ac.id

Situs Cantuman:

Zikri, F., & Damayanti, R. (2025). Strategi hegemoni China melalui Belt Road Initiative: Implikasi terhadap tata kelola politik dan keamanan di Asia. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 1-16.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.316>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta® 2025 dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Journal of
Political Issues

Abstrak

Abstract This study aims to analyze China's strategy to establish itself as a new hegemon in Asia through the implementation of the Belt and Road Initiative (BRI). Using a descriptive-qualitative method and the international political economy approach, this research examines BRI from the perspectives of mercantilism and liberalism. The findings indicate that BRI functions as a strategic tool for China to expand its political and economic influence by investing heavily in global infrastructure. The program enhances international connectivity, accelerates trade, and creates employment opportunities in partner countries. However, concerns about a debt trap and economic dependency have emerged in some recipient nations. The study concludes that BRI exemplifies modern mercantilism, positioning China as a dominant actor in the emerging political and security governance of Asia.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi China dalam membangun posisinya sebagai hegemon baru di Asia melalui implementasi Belt and Road Initiative (BRI). Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan ekonomi politik internasional, penelitian ini mengkaji BRI dari perspektif merkantilisme dan liberalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI berfungsi sebagai alat strategis bagi China untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya melalui investasi besar di sektor infrastruktur global. Program ini meningkatkan konektivitas internasional, mempercepat perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di negara mitra. Namun, kekhawatiran terkait jebakan utang (debt trap) dan ketergantungan ekonomi muncul di beberapa negara penerima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI merepresentasikan merkantilisme modern yang menempatkan China sebagai aktor dominan dalam tata kelola politik dan keamanan di Asia.

Tentang Penulis:

Fadhl Zikri, penulis menyelesaikan studi S2 dan memperoleh gelar Master Sosial (M.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional di Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Universitas Paramadina, Jakarta. Penulis saat ini bekerja sebagai jurnalis di salah satu media nasional. Email: fadhl.zikri@students.paramadina.ac.id

Rizki Damayanti. penulis menyelesaikan studi S2 dan memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) dalam bidang Hubungan Internasional dari University of Florence, Italia, dan kemudian memperoleh gelar Doktor dalam bidang Islam dan Hubungan Internasional dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta. Email: rizki.damayanti@paramadina.ac.id

Pendahuluan

China telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global yang berpengaruh besar. Dalam era kepemimpinan Xi Jinping, negara ini tidak hanya memperkuat fondasi ekonominya tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai hegemon baru melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah *Belt and Road Initiative* (BRI). Sebelum memahami secara menyeluruh mengenai inisiatif ini, penting untuk menelusuri sejarah reformasi ekonomi yang telah menjadi dasar bagi transformasi China sejak era Mao Zedong (1949–1969). Kepemimpinan Mao Zedong menandai awal pembangunan ekonomi modern China dengan berbagai kebijakan yang melibatkan transformasi sektor pertanian dan industri. Namun, implementasi kebijakan seperti industrialisasi pertanian banyak berdampak negatif, termasuk kelaparan massal pada tahun 1958–1961 yang menyebabkan lebih dari 30 juta korban jiwa (Agung S., 2012; Sanjaya, 2015). Kegagalan ini memaksa Mao untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Deng Xiaoping, yang kemudian membawa pendekatan baru dalam reformasi ekonomi.

Transformasi signifikan dimulai pada era Deng Xiaoping melalui kebijakan modernisasi di empat sektor utama: industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan nasional. Deng memperkenalkan konsep “*One Country, Two Systems*,” yang mengintegrasikan prinsip kapitalisme dalam kerangka sosialisme-komunis (Santoso, 2017). Kebijakan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9% per tahun, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti kesenjangan sosial, urbanisasi, dan inflasi (Santoso, 2017; Wu & Benson, 2016).

Reformasi berlanjut di bawah Hu Jintao (2002–2013), yang memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat harmonis melalui strategi seperti *Western Development Strategy* (WDS). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah barat dan pesisir China serta meningkatkan daya saing global. Selain itu, Hu Jintao menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yang melahirkan tokoh seperti Jack Ma, founder Alibaba, salah satu raksasa *e-commerce* dunia asal China (Lailliya & Indriastuti, 2020; Wicaksono, 2017). Namun, reformasi ini juga menghadapi tantangan berupa pengangguran lulusan perguruan tinggi dan korupsi yang tetap menjadi fokus utama kebijakan (Kompas, 2009).

Pada tingkat internasional, Hu Jintao memperluas pengaruh China melalui pembentukan Area Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dan keanggotaan dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa). Ekspansi pengaruh internasional ini menunjukkan ambisi China dalam menciptakan tatanan global multipolar (Wibawa & Arisanto, 2021). Keberhasilan menyelenggarakan Olimpiade Beijing 2008 menjadi simbol pencapaian ekonomi dan diplomasi global China. Masuk ke era Xi Jinping, strategi hegemoni China semakin jelas dengan peluncuran BRI pada tahun 2013. Inisiatif ini dirancang sebagai proyek ambisius yang menghubungkan China dengan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jaringan jalur darat dan laut yang terinspirasi oleh Jalur Sutra kuno. Hingga Desember 2023, sebanyak 150 negara telah bergabung dalam BRI melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (CNBC Indonesia, 2023a). Program ini mencakup investasi skala besar di bidang infrastruktur, seperti pembangunan rel kereta, pelabuhan, jalan dan pembangkit listrik, yang telah memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitik China secara global (Laurenceson, Nieuwenhuizen, & Collinson 2017)

Meskipun inisiatif ini telah memberikan kontribusi besar dalam membangun konektivitas global, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: sejauh mana strategi BRI menciptakan konsekuensi strategis terhadap tatanan politik dan keamanan di Asia? Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis BRI bukan semata sebagai alat diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen hegemoni China yang berdampak langsung terhadap dinamika politik domestik dan keamanan kawasan.

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek ekonomi dari BRI, seperti manfaat perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan investasi luar negeri (Djankov & Miner, 2016). Namun, kajian mengenai implikasi politik dan keamanan di kawasan Asia masih terbatas. Selain itu, studi-studi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan ekonomi-politik konvensional dan belum banyak memanfaatkan kerangka teoritis dari perspektif merkantilis dan liberalis secara bersamaan untuk menjelaskan dinamika kekuatan negara dan interdependensi regional. Tulisan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan teoretis yang lebih integratif dan kritis.

Dengan mempertimbangkan dinamika ini, tulisan ini akan membahas bagaimana BRI mencerminkan strategi hegemoni China dalam membentuk arsitektur politik dan keamanan di Asia. Selanjutnya, untuk memahami dinamika tersebut secara teoretis, pembahasan akan menggunakan dua perspektif dalam hubungan internasional, yaitu merkantilisme dan liberalisme, guna menjelaskan motif ekonomi-politik di balik ekspansi BRI.

Landasan Teoritik

Tulisan ini akan membahas bangkitnya China sebagai hegemoni baru dalam ekonomi dunia melalui perspektif merkantilis dan liberalis. Teori merkantilisme dalam hubungan internasional berpandangan bahwa kekuatan negara diperkuat melalui kontrol ekonomi, proteksionisme, dan intervensi negara dalam perdagangan. Dalam konteks BRI, strategi China dapat dilihat sebagai bentuk merkantilisme modern, di mana negara menggunakan investasi luar negeri untuk memperluas kontrol atas jalur perdagangan, pasokan energi, dan akses pasar (Gilpin, 2011). Pemikiran klasik seperti Mun (1664), Von Hornick (1684), dan Montchrestien (2017) menekankan bahwa kekayaan negara bergantung pada surplus perdagangan dan kontrol terhadap sumber daya. BRI secara langsung mencerminkan strategi ini melalui pembangunan infrastruktur strategis di berbagai negara, yang tidak hanya memperkuat posisi ekonomi China tetapi juga memberikan *leverage* politik dan keamanan terhadap negara mitra.

Pendekatan merkantilisme modern yang tercermin dalam BRI menunjukkan bahwa China tidak sekadar mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mengamankan kepentingan strategisnya melalui jaringan infrastruktur global. Pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, dan jalur pipa energi di Asia, Afrika, dan Eropa memberikan China kontrol logistik dan akses terhadap jalur distribusi vital. Hal ini sejalan dengan prinsip Von Hornick (1684) yang menekankan pentingnya penguasaan atas jalur perdagangan dan sumber daya untuk memperkuat posisi ekonomi nasional. Dalam kerangka ini, investasi China bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara penerima, tetapi juga memperkuat ketergantungan struktural terhadap China.

Lebih lanjut, pendekatan merkantilis dalam BRI juga mencerminkan upaya untuk menciptakan bentuk dominasi baru dalam sistem global, di mana pengaruh politik dan keamanan dicapai melalui ketergantungan ekonomi. Sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman dari institusi keuangan China seperti China Development Bank dan Exim Bank telah membuat negara-negara mitra terjebak dalam utang (*debt trap diplomacy*), yang pada akhirnya memberikan *leverage* politik bagi Beijing. Strategi ini menunjukkan bahwa prinsip intervensi negara dalam ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Montchrestien (2017), masih relevan dan digunakan untuk membangun kekuatan nasional melalui kendali atas wilayah dan sumber daya strategis di luar negeri.

Selain itu, BRI sebagai bentuk ekspansi ekonomi dan politik China dapat dilihat sebagai respons terhadap keterbatasan pasar domestik serta upaya mengamankan rantai pasokan global untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka merkantilisme modern, China tidak hanya berusaha memperbesar surplus perdagangan, tetapi juga mengontrol titik-titik strategis yang menjadi bagian dari jalur perdagangan global, termasuk Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, BRI merupakan

manifestasi kebijakan luar negeri yang memadukan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional secara simultan.

Di sisi lain, perspektif liberalisme, khususnya gagasan dari Moravcsik (1997), menggarisbawahi pentingnya aktor domestik dan interdependensi antarnegara dalam pembentukan kebijakan luar negeri. BRI dapat dilihat sebagai instrumen untuk menciptakan ketergantungan ekonomi antara China dan negara-negara mitra, yang pada gilirannya memperkuat posisi China dalam struktur internasional yang saling terkait. Dalam konteks ini, liberalisme membantu menjelaskan bagaimana keterikatan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk membentuk tatanan politik regional yang lebih menguntungkan China.

Dalam konteks liberalisme pula, interdependensi ekonomi yang diciptakan melalui BRI tidak hanya mencerminkan kepentingan strategis China, tetapi juga menunjukkan bagaimana hubungan saling menguntungkan (*mutual gains*) menjadi dasar dari stabilitas politik antarnegara. Sebagaimana dijelaskan oleh Keohane dan Nye (2013) dalam teori *complex interdependence*, keterikatan ekonomi dapat mengurangi kemungkinan konflik karena negara-negara yang saling bergantung memiliki insentif untuk menjaga hubungan yang stabil dan kooperatif. Melalui BRI, China menawarkan pembangunan infrastruktur dan integrasi pasar kepada negara mitra sebagai bentuk kerja sama jangka panjang, bukan dominasi terbuka. Dengan demikian, dari perspektif liberal, BRI dapat pula dilihat sebagai sarana untuk membangun perdamaian dan stabilitas regional melalui pertumbuhan ekonomi bersama dan institusi-institusi internasional yang mendukung kerjasama lintas batas.

Dengan menggunakan kedua perspektif ini secara bersamaan, artikel ini tidak hanya akan mengkaji BRI sebagai ekspresi kebijakan ekonomi luar negeri, tetapi juga sebagai strategi politik yang kompleks. Pendekatan merkantilis menjelaskan bagaimana negara mengejar dominasi melalui kontrol atas sumber daya dan perdagangan, sementara pendekatan liberalis menunjukkan bagaimana interdependensi dapat digunakan untuk membangun pengaruh politik dan keamanan. Kombinasi kedua perspektif ini penting untuk memahami dinamika hegemoni China yang tidak lagi bersifat konfrontatif, tetapi bersifat integratif dan struktural dalam menciptakan pengaruh jangka panjang di Asia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan dikombinasikan dengan pendekatan wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*). Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan ekonomi China dari era Mao Zedong hingga Xi Jinping, dengan fokus pada strategi hegemoni melalui BRI. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan ekonomi dan politik China dalam memperluas pengaruh globalnya, melalui penelusuran makna, simbol, dan narasi yang dibangun dalam berbagai dokumen resmi serta wacana publik.

Dalam penelitian ini, pendekatan wacana kritis digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana narasi ekonomi dan geopolitik China dikonstruksikan dan direproduksi dalam dokumen kebijakan, pidato elite politik, dan laporan institusi internasional. Pendekatan ini relevan dengan teori merkantilisme modern dan liberalisme interdependensi yang menjadi kerangka teoritis penelitian ini. Dengan demikian, analisis wacana tidak hanya mengungkap isi kebijakan, tetapi juga menelaah relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di balik praktik ekonomi luar negeri China.

Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan berita terkini. Literatur ilmiah mencakup buku, artikel jurnal, serta laporan dari institusi akademik yang relevan dengan topik penelitian ini. Dokumen kebijakan meliputi memorandum kerja sama terkait BRI, laporan tahunan Partai Komunis China, serta dokumen dari lembaga internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank. Sementara itu, berita terkini dari media seperti The Guardian, BBC, dan South China Morning Post digunakan

untuk memperkaya konteks dan menangkap perkembangan implementasi kebijakan BRI secara *real-time*.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memahami konteks historis, kebijakan, dan strategi ekonomi China dalam lintas kepemimpinan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan analisis wacana kritis. Tahap awal analisis dilakukan dengan mereduksi data dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema besar, seperti kebijakan ekonomi pada era Mao Zedong, reformasi Deng Xiaoping, dan ekspansi global melalui BRI di bawah Xi Jinping. Selanjutnya, peneliti menelaah representasi wacana kekuasaan dan strategi hegemonik China dalam teks kebijakan dan narasi media, untuk menangkap bagaimana China memosisikan dirinya dalam struktur internasional. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Data dari literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan media dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan ketepatan informasi. Sumber-sumber yang digunakan dipilih secara ketat berdasarkan kredibilitas dan aktualitasnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisa yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi kebijakan ekonomi China membentuk strategi hegemonik dan implikasinya terhadap tatanan global.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

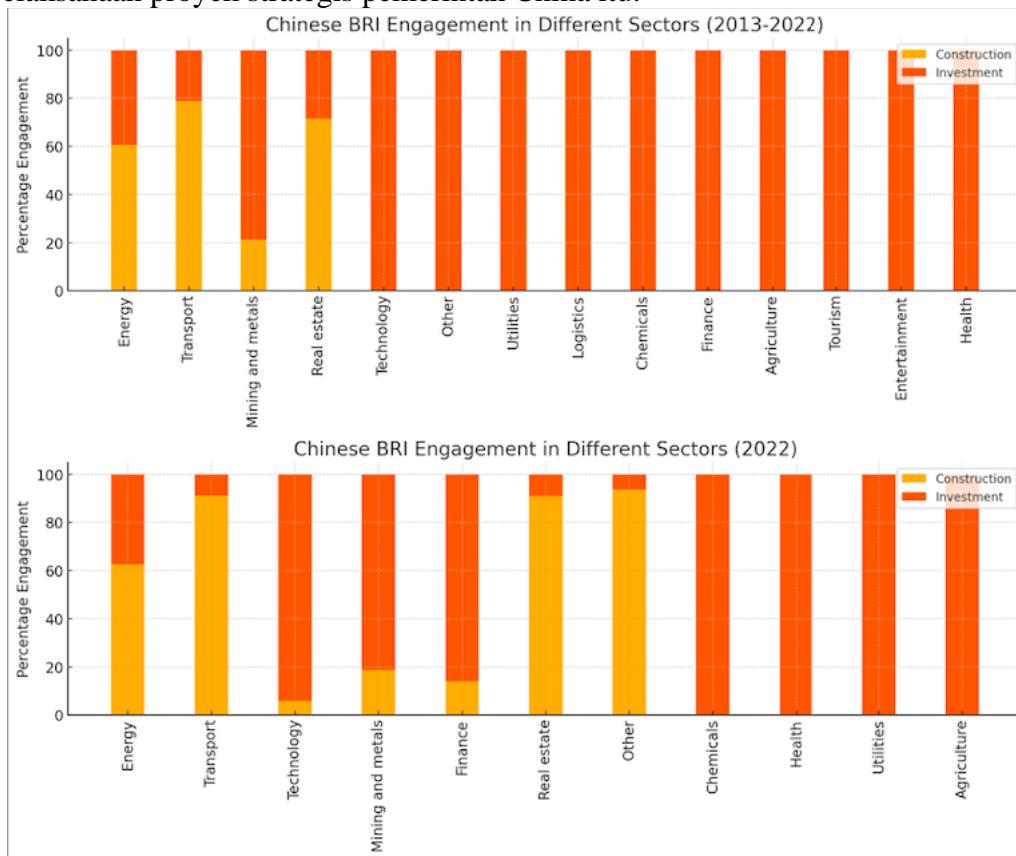
Transformasi ekonomi China sudah dimulai sejak era Deng Xiaoping dengan meluncurkan serangkaian reformasi besar pada tahun 1978. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Deng Xiaoping adalah memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan secara langsung hasil panen mereka di *free market zone*, yang sebelumnya dikendalikan secara ketat oleh negara (Bijian, 2005). Selanjutnya, Deng mendirikan empat zona ekonomi khusus di Xiamen, Shenzhen, Shantou, dan Zhuhai dengan tujuan untuk menarik pemodal asing, mendorong peningkatan produksi ekspor, serta memfasilitasi impor teknologi mutakhir ke dalam negeri (Morrison, 2018). Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran tersebut, pada tahun 1980, Deng Xiaoping juga mendorong integrasi China ke dalam institusi keuangan internasional dengan menjadi anggota IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank*, serta menjadi anggota GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) enam tahun kemudian (Jacobson & Oksenberg, 1990).

Langkah reformasi ekonomi yang dijalankan oleh Deng Xiaoping ini menunjukkan keberhasilan, seperti yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi China yang pesat. Dari tahun 1978 hingga 2023, China mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 9,5%. Bahkan setelah pandemi COVID-19, ekonomi China tetap menunjukkan daya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun 2023 (World Bank, 2024). China yang memiliki populasi sekitar 1,4 miliar orang, kini menempati posisi sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (AS) (World Health Organization, 2023). Jika laju pertumbuhan *gross domestic bruto* (GDP) China terus berlanjut, banyak analis memprediksi pada tahun 2029 atau 2030, China akan menjadi negara hegemon baru dengan ekonomi tebesar di dunia mengalahkan AS (VoA Indonesia, 2023). China bahkan sudah mengungguli AS dan dapat dianggap sebagai negara adikuasa ekonomi yang setara (Atkinson, 2024)

Bagi banyak negara berkembang yang menjadi mitra BRI, inisiatif ini menawarkan bantuan signifikan dalam upaya modernisasi infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia pada Oktober 2023, total pendanaan BRI selama sepuluh tahun terakhir mencapai US\$1,014 triliun atau sekitar Rp15 kuadriliun (kurs Rp15.000 per USD). Dari total investasi tersebut, Rp9,3 kuadriliun berbentuk kontrak konstruksi, sementara Rp6,6 kuadriliun berbentuk investasi non-keuangan. Pada semester pertama tahun 2023, proyek BRI di 148 anggota negaranya tercatat bernilai sekitar US\$43,3

miliar atau sekitar Rp680,2 triliun, dengan hampir separuh dari nilai tersebut berupa investasi, dan sisanya sekitar Rp256 triliun dalam bentuk kontrak konstruksi. Sebagian dari biaya proyek ini dibiayai melalui pinjaman yang diberikan oleh pemerintah China. BRI menunjukkan perkembangan yang stabil sejak tahun 2020, meskipun dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pada semester pertama tahun 2023, *Ministry of Commerce of the People's Republic of China* mempublikasikan data bahwa sejumlah entitas bisnis asal China telah menginvestasikan sekitar USD 5,76 miliar atau Rp90,5 triliun (kurs Rp15.000) dalam bentuk investasi langsung non-keuangan pada kuartal I tahun 2023 di negara-negara mitranya ([Green Finance and Development Center, 2024](#)).

Pada semester pertama tahun 2023, investasi BRI tercatat mencapai 59% dari total keterlibatannya, menunjukkan pergeseran model pendanaannya. Sebelumnya sebagian besar pendanaannya lebih banyak berupa kontrak konstruksi berupa pinjaman dari investor dan lembaga keuangan asal China. Dengan fakta ini, menunjukkan bahwa lebih dari 50% keterlibatan BRI dilakukan dalam bentuk investasi langsung, yang berpotensi memperkuat hubungan jangka panjang antara China dan negara-negara mitra. Pada umumnya, proyek-proyek BRI yang melibatkan kontrak konstruksi juga sering kali memerlukan jaminan dari lembaga pemerintah negara anggotanya, menambah dimensi kompleksitas dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek strategis pemerintah China itu.



Grafik 1. Impelentasi belt and road initiative

Sumber: [CNBC Indonesia, 2023b](#).

Data tersebut menunjukkan bahwa investasi besar China di negara anggota BRI dalam berbagai sektor tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi negara-negara berkembang, tetapi juga berperan penting dalam memperluas pengaruh politik dan ekonomi China di tingkat internasional. Program BRI telah memainkan peran kunci dalam menjaga China agar tidak terisolasi di kancah internasional dan memperkuat kedudukannya sebagai aktor utama dalam perdagangan global. Salah satu dampak signifikan dari keterlibatan China dalam BRI adalah peningkatan surplus perdagangan dengan negara-negara anggota mitranya, yang tercatat

mencapai US\$197,9 miliar pada semester pertama 2023, atau sekitar 40% dari total surplus perdagangan China ([CNBC Indonesia, 2023d](#)). Pencapaian ini secara signifikan mengurangi ketergantungan ekonomi China terhadap perdagangan dengan AS terutama di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait isu-isu kawasan Indo-Pasifik, termasuk masalah Taiwan.

Meskipun BRI memberikan keuntungan signifikan bagi China, tidak semua negara anggota menerima keuntungan serupa. Banyak negara mitra BRI yang justru menghadapi defisit perdagangan dengan China, bahkan dalam hal ekspor mereka ke negara tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya negara G7 yang bergabung dengan BRI. Meskipun bergabung menjadi mitra BRI, Italia mengalami defisit perdagangan dengan China yang meningkat dua kali lipat selama periode 2019-2022. Seiring berjalananya waktu, jumlah negara yang terdaftar sebagai anggota BRI terus berkembang, dengan 155 negara yang telah bergabung hingga Agustus 2023. Hal ini meliputi hampir tiga perempat penduduk dunia dan berkontribusi lebih dari separuh produk domestik bruto dunia ([CNBC Indonesia, 2023d](#)). Peningkatan jumlah negara anggota BRI dan pengaruh ekonomi yang ditumbuhkan oleh China melalui proyek-proyek infrastruktur besar ini menunjukkan ambisi China untuk memperluas jaringan pengaruh globalnya. Namun, ketidakseimbangan dalam hasil perdagangan yang diterima oleh negara-negara mitra juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam mencapai keseimbangan dalam kerjasama ekonomi dengan China.

Salah satu bentuk nyata dari ketidakseimbangan tersebut tercermin dalam tingginya rasio utang eksternal sejumlah negara mitra terhadap China, yang menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2 berikut, yang menyajikan daftar negara dengan rasio utang ke China dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.



Grafik 2. Daftar Negara dengan Utang kepada China yang Melebihi GDP

Sumber: *Global Debt Monitor* yang dirilis Institute of International Finance (IIF)

Grafik di atas menunjukkan sepuluh negara dengan rasio utang eksternal ke China terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi. Laos menempati posisi teratas dengan rasio mencapai 180,8%, diikuti oleh Kamboja (135,7%), Mongolia (131,5%), dan Sri Lanka (126,8%). Angka-angka ini menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi

terhadap pembiayaan dari China, yang dalam banyak kasus dikaitkan dengan proyek-proyek infrastruktur dalam kerangka BRI. Ketergantungan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius tentang kedaulatan fiskal dan kemampuan negara-negara ini untuk membayar kembali utang tanpa mengorbankan aset strategis nasional.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan praktik yang disebut sebagai “*debt trap diplomacy*,” di mana China dianggap memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah tanpa memperhatikan kemampuan pembayaran mereka. Ketika negara peminjam gagal melunasi utangnya, aset penting seperti pelabuhan atau jaringan transportasi dapat disita atau dikendalikan oleh pihak China, seperti yang terjadi di Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Kondisi ini memperkuat narasi bahwa strategi hegemoni China melalui BRI tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga membawa implikasi geopolitik yang signifikan. Oleh karena itu, negara-negara mitra BRI perlu mengevaluasi secara cermat keberlanjutan utang dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan politik nasional.

Pembahasan

Interdependensi Ekonomi dan Peran Belt and Road Initiative dalam Membangun Kerjasama Global

Inisiatif BRI dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan interdependensi melalui pembangunan infrastruktur yang memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih efisien antara China dan negara-negara lain. Seperti yang disampaikan Moravcsik (1997), kerjasama ini didorong oleh kepentingan ekonomi bersama yang dihasilkan oleh keterkaitan antarnegara, bukan hanya oleh kekuatan politik atau keamanan semata. Melalui interdependensi ini, perdagangan bebas dan pengurangan hambatan ekonomi akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, sebagaimana BRI yang membuka akses pasar bagi China sekaligus mendukung pembangunan ekonomi negara-negara mitra.

Program strategis pemerintah China tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan domestik, baik dari pemerintah, perusahaan besar, dan kelompok-kelompok lainnya yang terlibat dalam perdagangan internasional. China, melalui BRI, tidak hanya ingin memperkuat posisi ekonominya, tetapi juga memperluas infrastruktur domestik dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu seperti konstruksi, transportasi, dan teknologi. Keputusan untuk meluncurkan dan melaksanakan BRI juga dipengaruhi oleh kepentingan domestik China dalam hal perluasan pasar untuk produk-produk China, seperti barang-barang manufaktur, serta untuk menjamin pasokan energi dan sumber daya alam.

Meskipun diprakarsai oleh China sebagai inisiatif yang lebih berfokus pada hubungan bilateral, banyak aspek dari BRI yang berhubungan dengan kerjasama multilateral dan penguatan lembaga-lembaga internasional. Misalnya, China sering mengintegrasikan BRI dengan lembaga-lembaga regional seperti AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) dan *Silk Road Fund*, yang berfungsi sebagai platform pendanaan proyek infrastruktur bersama. Program tersebut juga mencerminkan keyakinan bahwa kerjasama ekonomi dapat mengurangi potensi ketegangan politik dan konflik internasional, yang sejalan dengan pemikiran Moravcsik bahwa institusi multilateral membantu mengatur hubungan internasional yang stabil.

Dalam konteks liberalisme, kebijakan luar negeri China melalui BRI bertujuan untuk memperkuat posisinya dalam sistem ekonomi global melalui perdagangan bebas dan kerjasama internasional. Proyek ambisius tersebut memungkinkan China untuk memperluas pengaruh ekonominya ke negara-negara yang sebelumnya kurang terhubung dengan pasar global, sambil menjalin kemitraan yang lebih erat dengan sejumlah negara besar dan berkembang. Dengan cara ini, China menciptakan jaringan interdependensi yang lebih luas, yang sejalan dengan prinsip liberalisme yang menekankan manfaat bersama melalui perdagangan bebas dan kerjasama internasional.

Singkatnya, BRI dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip liberalisme Moravcsik yang menekankan interdependensi ekonomi dan pentingnya kerjasama internasional untuk mencapai manfaat bersama. Melalui proyek infrastruktur besar yang menghubungkan berbagai negara, BRI menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi China di dalam sistem ekonomi global. Keputusan untuk melaksanakan program tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik di China dan bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi domestik sambil memperkuat kerjasama multilateral dan institusi internasional. Oleh karena itu, BRI China adalah contoh konkret dari bagaimana teori liberalisme interdependensi ekonomi dapat diterapkan dalam praktik hubungan internasional saat ini

Menjadi program prioritas utama Pemerintah China, BRI dirancang untuk memperkuat kerjasama kerjasama dalam bidang infrastruktur, perdagangan, dan investasi dengan lebih dari 150 negara di seluruh dunia yang terlibat ([The Third Belt and Road Forum for International Cooperation, 2023](#)). Negara-negara yang tergabung dalam BRI berkontribusi lebih dari 30% terhadap PDB global, mencakup 62% populasi dunia, dan menguasai 75% cadangan energi dunia ([World Bank, 2018](#)). Pada era modern, BRI tidak hanya berusaha merevitalisasi jalur sutra kuno, namun juga memperluasnya dengan membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jaringan kereta api, jalan raya di negara mitra, jaringan kelistrikan dan sistem pipa. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan dan memperkuat integrasi ekonomi global ([The Washington Post, 2018](#)).

BRI dapat dianggap sebagai visi ekonomi paling ambisius dalam sejarah modern, yang berfokus pada peningkatan kemitraan dan koneksi antar-kawasan ([Lowy Institute, 2017](#)). Namun demikian, pemerintah China secara tegas menolak penyebutan proyek strategisnya tersebut sebagai sebuah strategi ekonomi, pemerintah China mengklaim BRI sebagai upaya untuk membangun kemitraan internasional yang saling menguntungkan. Hingga Desember 2024, sebanyak 147 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani kesepakatan dalam kerangka BRI. Menurut perhitungan Bank Dunia, manfaat yang diperoleh oleh negara-negara mitra BRI antara lain adalah pengurangan waktu tempuh ekspor dan impor barang sebesar 12%, peningkatan volume perdagangan hingga 9,7%, peningkatan pendapatan sebesar 3,4%, dan peningkatan kesejahteraan 7,6 juta orang yang berhasil keluar dari kemiskinan akut ([Antara News, 2023](#)).

Strategi Merkantilisme China dalam Belt and Road Initiative: Ekspansi Ekonomi dan Pengaruh Global

China telah mengukuhkan posisinya sebagai adidaya ekonomi global, menggantikan AS. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang mendominasi ekonomi dunia cenderung berperan sebagai kreditor internasional. Fenomena serupa dapat ditemukan pada masa kejayaan Kerajaan Inggris dan AS, yang kekuasaannya dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran ([Peterson Institute for International Economics, 2011](#)). Dunia yang saat ini tengah menghadapi kebutuhan besar akan pembiayaan dan pembangunan, memanfaatkan peluang ini dengan strategi ekonomi yang diterapkan oleh China, salah satunya melalui program BRI. Dalam konteks merkantilisme, BRI tidak hanya berupaya mengurangi ketergantungan negara mitranya pada modal asing, tetapi juga memungkinkan China untuk bertransformasi menjadi salah satu kreditor besar di dunia.

Terdapat beberapa aspek merkantilisme yang tercermin dalam pelaksanaan BRI. Pertama, peningkatan ekspor dan penguasaan pasar. Salah satu tujuan utama dari program tersebut adalah untuk membuka akses pasar baru bagi produk dan layanan dari China. Melalui pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan utama, jalur kereta api, pelabuhan, dan jaringan listrik di negara-negara mitra, China tidak hanya memperluas akses ke pasar internasional, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi barang-barang produknya dengan *high efficiency*.

Strategi China ini sejalan dengan prinsip dasar merkantilisme yang menekankan pada peningkatan ekspor dan pengurangan impor untuk mencapai surplus perdagangan.

Aspek kedua adalah penguasaan sumber daya alam. Banyak proyek BRI yang melibatkan investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, energi, dan pertanian di negara-negara mitra. Investasi ini memberi China akses yang lebih besar terhadap pasokan bahan mentah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung industri domestiknya. Sebagai contoh, di kawasan Afrika dan Asia Tenggara, China telah banyak menanamkan modal dalam proyek-proyek pertambangan dan energi, yang bertujuan untuk memastikan pasokan bahan baku yang vital bagi perekonomian China dalam jangka panjang ([East Asia Forum, 2024](#)).

Melalui inisiatif ini, China tidak hanya berupaya memperluas hegemoninya di bidang ekonomi, tetapi juga memperkuat pengaruh politik di kawasan-kawasan mitra. Negara-negara yang menerima investasi melalui BRI seringkali menghadapi ketergantungan ekonomi yang semakin dalam terhadap China. Ketergantungan ini kemudian dimanfaatkan oleh China untuk memperoleh dukungan diplomatik strategis dalam berbagai forum internasional, serta untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan geopolitiknya di kawasan negara mitranya ([South China Morning Post, 2023](#)). Secara keseluruhan, melalui BRI ini, China memanfaatkan prinsip-prinsip merkantilisme untuk tidak hanya memperkuat perekonomian domestik, tetapi juga untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global. Program ini, yang pada dasarnya mengedepankan penguatan jaringan perdagangan dan akses sumber daya alam, juga menjadi sarana bagi China untuk meningkatkan posisi politiknya di dunia internasional.

Selama dekade terakhir, kerjasama dalam kerangka BRI tercatat melibatkan lebih dari 3.000 proyek kemitraan, dengan total investasi mencapai US\$1 triliun. Kemitraan tersebut terdiri dari berbagai sektor, seperti pembangunan jalan utama, jalur kereta api, infrastruktur energi dan pelabuhan ([CNBC Indonesia, 2023d](#)). Salah satu contoh penting dari ekspansi BRI adalah terjadinya konektivitas berbagai kota China dengan kota-kota di Eropa melalui *China-Europe Railway Express*. Adanya infrastruktur darat ini secara signifikan dapat memperpendek durasi perjalanan barang, sehingga memberikan efisiensi logistik yang lebih tinggi. Selain itu, proyek-proyek yang digagas melalui BRI juga berkontribusi dalam menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menarik lebih banyak investasi ke negara-negara mitra. Bagi banyak negara berkembang, BRI ini menawarkan bantuan signifikan dalam upaya modernisasi infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Belt and Road Initiative dan Potensi Jebakan Utang: Studi Kasus Indonesia dalam Kerjasama Infrastruktur dengan China

Program BRI terus mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan Xi Jinping. Namun demikian program ini tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Salah satu isu yang paling mendapat perhatian adalah beban utang yang ditanggung oleh negara-negara penerima investasi, khususnya terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar. Muncul kecemasan mengenai kapabilitas negara mitra BRI untuk melunasi utang mereka sehingga mereka terjerembab terhadap potensi perangkap utang (*debt trap*). Isu ini semakin menakutkan negara mitra dengan adanya klausul bahwa China dapat menyita aset infrastruktur yang dibangun melalui pinjaman, jika negara-negara mitra BRI gagal membayar utang atau mengalami keterlambatan pembayaran. Misalnya seperti yang terjadi di Sri Lanka, di mana China mendapat kontrol atas pelabuhan strategis Hambantota setelah negara itu tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan China untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

Salah satu negara yang menyadari potensi dampak negatif dari isu jebakan utang (*debt trap*) China ini adalah Malaysia. Pada tahun 2018 saat melakukan kunjungan ke China, Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, menyatakan akan menghentikan tiga proyek kerjasama dengan BRI. Tiga proyek tersebut yakni, East Coast Rail Link (ECRL), Multi-Product Pipeline (MPP), dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP) ([Reuters, 2018](#)). Mahathir secara tegas mengkritik era kepemimpinan Najib Razak, ia menilai bahwa investasi

BRI berupa pembangunan infrastruktur tersebut akan membenani keuangan negara dan mengancam kestabilan fiskal negara. Selain itu, investasi yang berbasis pinjaman dinilai oleh Mahathir sebagai bentuk kolonialisme modern sehingga menyebabkan para mitranya akan sangat terikat terhadap China ([ABC News, 2018](#)). Selain Malaysia, negara lain yang juga mengkhawatirkan investasi BRI adalah India. Meski sama-sama merupakan bagian dari kelompok BRICS, India menolak salah satu proyek BRI, yaitu *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). India menolak proyek ini karena CPEC melewati wilayah Kashmir yang menjadi objek *dispute* antara India dan Pakistan. Kashmir merupakan isu sensitif dan telah menjadi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut ([Times of India, 2018](#)).

Kekhawatiran serupa mengenai potensi *debt trap* BRI terhadap kedaulatan negara juga diungkapkan oleh Richard Moore, Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6). Moore menyatakan bahwa selain potensi jebakan utang, BRI juga berpotensi menjadi jebakan data, di mana China dapat mengumpulkan dan mengolah data dari negara-negara mitra program tersebut untuk mempengaruhi kebijakan domestik dan internasional mereka. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, Moore mengusulkan langkah-langkah *defensif* untuk mengatasi ancaman BRI. Menurut MI6, dengan kemampuan China untuk mengelola data global, dikombinasikan dengan kekuatan ekonominya, memberikan kesempatan bagi China untuk meningkatkan pengaruhnya secara global. Menurut Moore, melalui BRI, China berusaha memanfaatkan posisi ekonominya untuk membuat negara-negara berkembang dan miskin terperangkap dalam ketergantungan finansial dan data yang dapat mengikis kedaulatan negara ([BBC Indonesia, 2021](#)).

Dengan berbagai fakta tersebut, badan intelijen Inggris menjadikan China sebagai “prioritas utama” yang harus diwaspadai. Hingga November 2023, data menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 10 negara yang telah terperangkap dalam utang kepada China dari proyek-proyek BRI ([CNBC Indonesia, 2023b](#)). Terbaru adalah Laos, yang sejak akhir tahun 2013 mengalami kesulitan dalam membayar utang kepada China. Menurut perhitungan IMF, mayoritas utang pemerintah Laos sebesar 122% dari GDP mereka tahun 2023, berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Beijing dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur besar. Negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa yakni Maladewa, Sri Lanka, dan Pakistan. Negara-negara tersebut kini harus mengelola utang luar negeri yang sangat besar akibat pinjaman China melalui BRI.

Isu jebakan hutang China ini semakin menimbulkan kecemasan ketergantungan mitra BRI selaku negara *powerless* terhadap kreditur terbesarnya, melalui program strategis China tersebut. Sebagai contoh, dalam satu dekade terakhir, jumlah utang Indonesia kepada China mengalami peningkatan signifikan yang mencapai lebih dari 400%. Sebagai negara kreditur terbesar keempat setelah Singapura, AS, dan Jepang, utang luar negeri Indonesia kepada China per Februari 2024 tercatat sebesar US\$21,3 miliar atau sekitar Rp305 triliun ([Bank Indonesia, 2024](#)). Selain sebagai negara kreditur terbesar, China juga tercatat sebagai investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Peningkatan investasi ini direalisasikan dalam program BRI, di mana Indonesia telah terlibat dalam 72 proyek senilai total US\$21 miliar sejak tahun 2015.

Sejak program BRI diluncurkan pada 2013, Presiden China Xi Jinping selaku inisiatör sudah beberapa kali melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan di akhir pemerintahan SBY itu, terjadi puluhan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan China, mulai dari kerjasama infrastruktur, properti, pertambangan, jalur kereta api, pabrik semen hingga bubur kertas. Nilai total komitmen kerjasama yang terjalin antara kedua negara mencapai US\$28,2 miliar ([Bank Indonesia, 2024](#)). Komitmen ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, yang pada tahun 2017 turut berpartisipasi bersama 29 kepala negara lainnya dalam *Belt and Road Forum for International Cooperation* di Beijing. Dalam sambutannya di hadapan para Kepala Negara mitra BRI, Xi Jinping menyatakan akan mengembangkan program tersebut dan telah

menyiapkan anggaran sebesar US\$55,09 miliar untuk mendukung perluasan jaringan BRI di Asia, Afrika, dan Eropa.

Pada periode 2013 hingga 2017, kontribusi investasi China di Indonesia terus mengalami peningkatan, naik dari peringkat 9 ke peringkat 3. Meski sempat terjadi penurunan kontribusi investasi karena pandemi COVID-19, investasi China meningkat pada semester I-2023, dari US\$3,2 miliar pada tahun 2021 menjadi US\$3,8 miliar. Salah satu prioritas utama investasi China terfokus pada pengembangan smelter di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Di bidang infrastruktur, kemitraan BRI antara China dan Indonesia mencakup pembangunan berbagai proyek besar, seperti proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung, pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, serta pembangunan Tol Medan-Kualanamu.

Bagi China, proyek kemitraan infrastruktur seperti Kereta Cepat Whoosh yang digagas melalui joint venture antara China Railways International Co Ltd dan PT Pilar Sinergi BUMN, merupakan bukti kemitraan yang kuat antara negeri Tirai Bambu dengan Indonesia. Meski demikian, pembangunan jaringan transportasi ini mengalami kendala keterlambatan dan pembengkakan biaya sejak dimulai pada tahun 2016. Biaya pembangunan membengkak menjadi Rp114,24 triliun, yang semula diperkirakan hanya sebesar Rp86,5 triliun. Dengan fakta tersebut Indonesia berisiko terjerat dalam jebakan utang China ([BBC Indonesia, 2021](#)). Meskipun Indonesia belum mengalami situasi gagal bayar seperti Sri Lanka yang terpaksa menyerahkan pengelolaan aset sebagai akibat dari gagal bayar utang, sejumlah negara lain telah merasakan dampak dari gagal bayar pinjaman investasi BRI. Misalnya Uganda, terpaksa memberikan kewenangan operasional Bandara Internasional Entebbe setelah tidak sanggup membayar utang dan Sri Lanka yang memberikan kewenangan operasional Pelabuhan Hambantota pada tahun 2018 setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya. Adapun pembangunan pelabuhan tersebut dibiayai dengan utang China sebesar US\$1,5 miliar ([CNBC Indonesia, 2023b](#)).

Sama halnya dengan Uganda dan Sri Lanka, proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung sempat mengalami indikasi potensi gagal bayar utang karena terjadi pembengkakan biaya yang tinggi. Untuk menutupi *cost overrun* tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya harus memberikan jaminan berupa penanaman modal sebesar Rp4 triliun, meskipun pada awalnya pemerintah bersikeras untuk tidak menjamin proyek ini melalui anggaran negara. Pada tahun 2019, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan garansi bahwa Indonesia tidak akan terperangkap dalam jebakan utang China. Namun, tantangan semakin besar dengan adanya inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga dan pelambatan ekonomi global, yang menyebabkan banyak negara kesulitan dalam melunasi utangnya kepada para kreditur ([CNBC Indonesia, 2023c](#)).

Di sisi lain, China telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki implementasi BRI sejak tahun 2020. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *AidData, World Bank, Harvard Kennedy School, dan Institute Kiel*, pada periode 2016 hingga 2021, China tercatat telah menyalurkan 128 pinjaman penyelamatan darurat dengan total nilai sebesar US\$240 miliar kepada 22 negara. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar 5% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga rata-rata yang ditawarkan lembaga keuangan internasional seperti IMF, yaitu sekitar 2% untuk operasi pinjaman non-konsesi selama satu dekade terakhir([CNBC Indonesia, 2023c](#)).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa BRI berfungsi sebagai instrumen strategis yang digunakan oleh China untuk memperkuat dan memperluas pengaruhnya di tingkat global. BRI berperan sebagai sarana untuk mendukung kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang semakin dominan, yang berpotensi menggeser dominasi ekonomi AS. Semangat untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra, seiring dengan kebangkitan ekonomi China, diperkirakan akan memainkan peran penting dalam

menentukan arah politik dan ekonomi dunia di masa depan. BRI mencerminkan penerapan strategi merkantilisme modern, di mana China memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk memperluas pengaruh politik dan ekonominya di berbagai belahan dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, BRI tetap menjadi pilar utama dalam upaya China untuk membentuk ulang tatanan ekonomi global sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Isu-isu seperti potensi jebakan utang bagi negara mitra, ketergantungan finansial, serta dampak sosial-politik dari proyek-proyek infrastruktur besar menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara peserta.

Namun demikian, inisiatif ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyesuaian dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap dampak jangka panjang dan potensi ketergantungan yang ditimbulkan. Penelitian ini memperkirakan bahwa dengan terus melakukan adaptasi dan perbaikan, BRI akan tetap menjadi salah satu kekuatan dominan dalam perekonomian global di masa depan. Dalam jangka panjang, keberhasilan BRI akan bergantung pada kemampuan China untuk mengelola ketergantungan finansial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek tersebut dan memastikan bahwa pengaruh yang diperoleh tidak menimbulkan resistensi yang dapat merugikan tujuan-tujuan strategis China.

Daftar Pustaka

- ABC News. (2018). *Malaysia's Mahathir Mohamad warns against "new colonialism" during China visit - ABC News*. <https://www.abc.net.au/news/2018-08-21/mahathir-says-china-will-sympathise-with-malaysia-problems/10145750>
- Agung S., L. (2012). *Sejarah Asia Timur 2*. Ombak. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=55178&pRegionCode=UN11MAR&pClientId=112>
- Antara News. (2023). *China telah teken kerja sama Sabuk dan Jalan dengan 22 negara Arab*. <https://www.antaranews.com/berita/3859509/china-telah-teken-kerja-sama-sabuk-dan-jalan-dengan-22-negara-arab>
- Atkinson, R. D. (2024). *China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries* | ITIF. In *Information Technology & Innovation Foundation*. <https://itif.org/publications/2024/09/16/china-is-rapidly-becoming-a-leading-innovator-in-advanced-industries/>
- Bank Indonesia. (2024). *Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2024 Menurun*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_264824.aspx
- BBC Indonesia. (2021). *Kepala Badan Intelijen Inggris peringatkan soal "jebakan utang" China, bagaimana dengan Indonesia?* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59486607>
- Bijian, Z. (2005). China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status on JSTOR. *Foreign Affairs*, 18–24. <https://www.jstor.org/stable/20031702?origin=crossref>
- CNBC Indonesia. (2023a). *BRI China Mencengkeram Dunia, Lebih Untung Apa Malah Buntung?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231018182328-128-481709/bri-china-mencengkeram-dunia-lebih-untung-apa-malah-buntung>
- CNBC Indonesia. (2023b). *Bukan Cuma Laos, 10 Negara Ini Jadi Korban "Rentenir" China*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231111160803-128-488279/bukan-cuma-laos-10-negara-ini-jadi-korban-rentenir-china>

CNBC Indonesia. (2023c). *Fenomena Jebakan Utang China & Ambisi Xi Jinping Kuasai Dunia.* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230414135859-4-429993/fenomena-jebakan-utang-china-ambisi-xi-jinping-kuasai-dunia>

CNBC Indonesia. (2023d). *Satu Dekade OBOR China: Dunia Ikut Untung atau Buntung?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230915072010-128-472641/satu-dekade-obor-china-dunia-ikut-untung-atau-buntung>

Djankov, S. and M. S. (2016). *China's Belt and Road Initiative: Motives, Scope, and Challenges / PIIE.* <https://www.piie.com/publications/piie-briefings/chinas-belt-and-road-initiative-motives-scope-and-challenges>

East Asia Forum. (2024). *China grapples with the institutional future of the Belt and Road Initiative.* <https://eastasiaforum.org/2024/04/26/china-grapples-with-the-institutional-future-of-the-belt-and-road-initiative/>

Gilpin, R. (2011). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order on JSTOR.* <https://www.jstor.org/stable/j.ctvcm4j53>

Green Finance and Development Center. (2024). *Countries of the Belt and Road Initiative (BRI).* <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>

Hornick, V. P. W. (1684). *Österreich Über Alles, Wenn Sie Nur Will.* https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Philip_Wilhelm_von_Hornick

Jacobson, H. K. , and O. M. (1990). *China's Participation in the IMF, the World Bank, and GATT / University of Michigan Press.* <https://press.umich.edu/Books/C/China-s-Participation-in-the-IMF-the-World-Bank-and-GATT>

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2013). Power and interdependence. In *International Organization.* <https://doi.org/10.1057/9781137356734.0006>

Kompas. (2009). *Sosialisme Gaya China.* <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/03/05394937/sosialisme.gaya.china?page=all>

Lailliya, F. C., & Indriastuti, S. (2020). *Implementasi Program Jalur Sutra Digital (Digital Silk Road) China.* <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/104056>

Laurenceson, J. , N. S. V. , & C. E. (2017). *Decision time: Australia's engagement with China's Belt and Road Initiative / University of Technology Sydney.* <https://www.uts.edu.au/acri/research-and-opinion/reports/decision-time-australias-engagement-chinas-belt-and-road-initiative>

Lowy Institute. (n.d.). *Understanding China's Belt and Road Initiative.* Retrieved February 12, 2025, from <https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-china-s-belt-road-initiative>

Montchrestien, A. de. (2017). *Traicté de l'économie politique.* Classiques Garnier, Paris. <https://classiques-garnier.com/export/pdf/traite-de-l-economie-politique-bibliographie.html?displaymode=full>

Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences seriously: A liberal theory of international politics. *International Organization*, 51(4), 513–553. <https://doi.org/10.1162/002081897550447>

Morrison, W. (n.d.). *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Retrieved February 12, 2025, from <https://crsreports.congress.gov>

Mun, T. (1664). *England's treasure by forraign trade, or, The ballance of our forraign trade is the rule of our treasure written by Thomas Mun ; and now published for the common good by his son John Mun. / Early English Books Online / University of Michigan Library Digital Collections.* London :: Printed by J.G. for Thomas Clark,. <https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A51598.0001.001?rgn=main;view=fulltext>

Peterson Institute for International Economics. (2011). *Learning from Chinese Mercantilism*. <https://www.piie.com/commentary/op-eds/learning-chinese-mercantilism>

Sanjaya, R. , S. M. , & S. I. (2015). PERANAN DENG XIAOPING DALAM REFORMASI CINA TAHUN 1978. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/8256>

Santoso, L. (2017). *Para penggerak revolusi* (U. Pratiwi, Ed.). Laksana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1059749>

South China Morning Post. (2023). *Xi Jinping asks Pakistan to guarantee 'safety of Chinese personnel and projects.'* <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3265853/xi-jinping-asks-pakistan-guarantee-safety-chinese-personnel-and-projects-he-pledges-more-economic>

The Third Belt and Road Forum for International Cooperation. (2023). *The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future*. <http://www.beltandroadforum.org/english/n101/2023/1010/c124-895.htm>

The Washington Post. (2018). *China's new Silk Road*. https://www.washingtonpost.com/business/chinas-new-silk-road/2018/08/23/cfd241c0-a693-11e8-ad6f-080770dcddc2_story.html?utm_term=.b9573eefc0d

Times of India. (2018). *SCO Summit 2018: India only SCO member to oppose China's BRI*. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-stays-out-of-move-to-support-chinas-bri-at-sco-meet/articleshow/64533390.cms>

VoA Indonesia. (2023). *Ekonomi China Bisa Menyalip AS pada 2030*. <https://www.voaindonesia.com/a/ekonomi-china-bisa-menyalip-as-pada-2030/6383404.html>

Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(2), 105–122. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019V2I2.149>

Wicaksono, M. (2017). Republik rakyat China dari Mao Zedong sampai Xi Jinping / Michael Wicaksono | OPAC Perpustakaan Nasional RI. In Jakarta: Elex Media Komputindo. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1059902>

World Bank. (2018). *Belt and Road Initiative*. <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>

World Bank. (2024). *China Overview: Development news, research, data.* <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>

World Health Organization. (2023). *China Health data overview for the People's Republic of China.* <https://data.who.int/countries/156>

Wu, H., & Benson, S. A. (2016). Made In China 2025 and New Trends of Entrepreneurship Education of China: A Socio-Economic-Educational Perspective. *Asian Education Studies*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.20849/AES.V2I1.103>

Narasi Selat Muria dalam Membentuk Persepsi Publik atas Banjir Besar Demak Maret 2024: Sebuah Analisis Wacana Kritis

Habib Yudha Pratama^{1*} , Mustabsyrotul Ummah Mustofa¹ 

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Jawa Barat- Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Jul 24, 2024

Accepted: Des 16, 2024

Published: May 29, 2025

Kata Kunci:

Critical Discourse Analysis;
Demak Floods; Muria Strait

Penulis Koresponden:

Habib Yudha Pratama

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran.

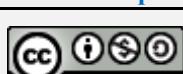
Email:

habib21001@mail.unpad.ac.id

Situs Cantuman:

Pratama, H. Y., & Mustofa, M. U. (2025). Narasi Selat Muria dalam Membentuk Persepsi Publik atas Banjir Besar Demak Maret 2024: Sebuah Analisis Wacana Kritis. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 17-33.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.282>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta (c) 2025 dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Journal of
Political Issues

Abstrak

Abstract The Muria Strait narrative dominated discourse on social media during the Great Demak Flood of March 2024. While previous studies have focused on ecological and disaster mitigation aspects, this study explores the power relations and discursive practices in constructing public perceptions of the Great Demak Flood of March 2024 through the Muria Strait narrative. Using Fairclough's critical discourse analysis approach, this study analyzed posts from two local media Instagram accounts. The results of the analysis identified four main discourses: ecological, positivist, spiritual, and fear. The Muria Strait narrative shaped power relations in the production of meaning for the Great Demak Flood of March 2024. Through this narrative, individual and collective identities were naturalized, and research institutions were institutionalized, thus influencing the direction of government policy in preventive, mitigation, emergency response, and recovery actions. Social media tended to use the Muria Strait narrative to simplify the complexity of material data related to the event. These findings suggest that the Muria Strait narrative diverts public attention from more pressing material facts. The discourse on the "re-formation of the Muria Strait" functions as a myth that can trigger social resistance, especially if supported by strong material facts, thus strengthening the legitimacy of the narrative.

Abstrak Narasi Selat Muria mendominasi wacana media sosial selama peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024. Sementara sejumlah penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekologis dan mitigasi bencana, penelitian ini mengeksplorasi hubungan kuasa dan praktik kewacanaan dalam mengonstruksi persepsi publik terhadap Banjir Besar Demak Maret 2024 melalui narasi Selat Muria. Dengan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough, penelitian ini menganalisis unggahan dua akun Instagram media lokal. Hasil analisis mengidentifikasi empat wacana utama: ekologis, positivis, spiritual, dan ketakutan. Narasi Selat Muria membentuk hubungan kekuasaan dalam produksi makna atas Banjir Besar Demak Maret 2024. Melalui narasi tersebut, identitas individu dan kolektif dinaturalisasi, dan lembaga penelitian diinstitusionalisasi, sehingga memengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam tindakan preventif, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Media sosial cenderung menggunakan narasi Selat Muria untuk menyederhanakan kompleksitas data material terkait peristiwa tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa narasi Selat Muria mengalihkan perhatian publik dari fakta material yang lebih mendesak. Wacana tentang "terbentuknya kembali Selat Muria" berfungsi sebagai mitos yang dapat memicu perlawanan sosial, terutama jika didukung oleh fakta material yang kuat, sehingga memperkuat legitimasi narasi tersebut.

Tentang Penulis:

Habib Yudha Pratama, Penulis menempuh studi S-1 di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran pada tahun 2024. Penulis saat ini melakukan magang riset mandiri di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah. Email: habib21001@mail.unpad.ac.id.

Mustabsyrotul Ummah Mustofa merupakan staf pengajar di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Fokus kajian penulis meliputi Politik Lingkungan dengan sub tema berkaitan dengan kuasa dan gagasan lingkungan, aktivisme lingkungan, kebijakan lingkungan dan ekonomi politik lingkungan. Email: mustabsyrotul.ummah@unpad.ac.id.

Pendahuluan

Penelitian ini mengeksplorasi narasi Selat Muria yang muncul dan mendominasi wacana di media sosial selama peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk mengidentifikasi narasi yang berperan dalam mengonstruksi respons masyarakat terhadap peristiwa tersebut.

Banjir besar pada Maret 2024 merupakan salah satu banjir yang terburuk dalam sejarah Demak. Banjir besar tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor geografis, seperti posisi Demak yang berada di wilayah hilir dan menampung aliran air dari daerah sekitarnya, serta infrastruktur yang tidak memadai, seperti tanggul yang Jebol. Data menunjukkan bahwa faktor penyebab banjir ini telah dianalisis secara ilmiah dalam penelitian secara ilmu alam ([Amri et al., 2024](#)).

Di tengah peristiwa tersebut, muncul narasi "Selat Muria" yang mendapat perhatian luas di media sosial. Narasi Selat Muria yang tersebar melalui platform seperti akun Instagram [@infokejadiandemak](#) dan [@demakhariini](#), memiliki tingkat interaksi tinggi di kalangan masyarakat Demak. Narasi tersebut didistribusikan melalui berbagai media, seperti konten sosial media dan artikel opini, sehingga menjadi bagian dari wacana dominan mengenai Banjir Besar Demak Maret 2024.

Narasi "Selat Muria" berakar dari penelitian-penelitian geologi yang menjelaskan sejarah geomorfologi wilayah Demak. Penelitian Ongkosongo ([1981](#)) mendokumentasikan terbentuknya tombolo di bekas Selat Muria akibat proses sedimentasi yang intensif. Kajian paleogeomorfologi oleh Sunarto ([2004](#)) menyoroti pembentukan dataran aluvial di wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Selat Muria Purba. Penelitian lain oleh Novita et al. ([2010](#)) mengungkapkan bahwa sedimentasi intensif telah menyebabkan pendangkalan Selat Muria, sehingga mengubah wilayah tersebut dari perairan menjadi daratan. Dalam konteks modern, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memperingatkan bahwa Demak menghadapi risiko tenggelam dalam 10-20 tahun ke depan akibat abrasi laut yang parah ([Sushmita, 2021](#)).

Kebangkitan narasi Selat Muria menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana sejarah geologi digunakan kembali dalam konteks krisis lingkungan modern. Narasi ini tidak hanya menjadi simbol degradasi lingkungan, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap bencana ekologis, seperti Banjir Besar Demak Maret 2024.

Dalam tinjauan literatur terkait Banjir Besar Demak Maret 2024, terdapat fokus yang signifikan pada aspek ekologis, seperti dinamika atmosfer ([Amri et al., 2024](#)) dan mitigasi bencana ([Rommiyati et al., 2024](#)). Penulis belum menemukan penelitian yang menyoroti hubungan kekuasaan dan praktik kewacanaan dalam mengonstruksi persepsi publik terhadap peristiwa tersebut melalui narasi Selat Muria. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kasus tersebut untuk memahami bagaimana pengetahuan publik tentang bencana dan krisis lingkungan dikonstruksi.

Landasan Teoritik

Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode untuk mengkaji hubungan antara wacana dan narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024 ([Fairclough, 1995](#)). Pendekatan Fairclough memandang wacana sebagai bentuk praktik sosial yang memproduksi sekaligus mengubah pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial, termasuk hubungan kekuasaan yang dibentuk dan membentuk struktur serta praktik sosial lainnya. Fairclough memahami struktur sosial sebagai keseluruhan hubungan sosial dalam masyarakat dan lembaga-lembaga khusus yang terdiri dari unsur kewacanaan dan non-kewacanaan ([Fairclough, 1992](#)). Praktik non-kewacanaan primer, misalnya, adalah praktik fisik seperti pembangunan tanggul sungai. Sebaliknya, praktik seperti narasi Selat Muria dan hubungan masyarakat terutama bersifat kewacanaan ([Fairclough, 1992](#)).

Pemahaman tentang wacana sebagai suatu hal yang bersifat konstitutif merupakan unsur utama dalam teori wacana Fairclough. Pemahaman ini mendasari minat empirisnya terhadap peran dinamis wacana dalam perubahan sosial dan kultural. Wacana berkontribusi pada konstruksi identitas sosial, hubungan sosial (relasional), dan sistem pengetahuan dan makna (ideasional), yang tersusun secara kewacanaan dan terinstitusionalisasi dalam lembaga-lembaga serta praktik non-kewacanaan.

Menurut Fairclough, terdapat dua dimensi penting dalam wacana, yaitu: peristiwa komunikatif berupa narasi Selat Muria di media sosial, dan tatanan wacana yang merupakan konfigurasi semua jenis wacana yang digunakan dalam lembaga atau bidang sosial.

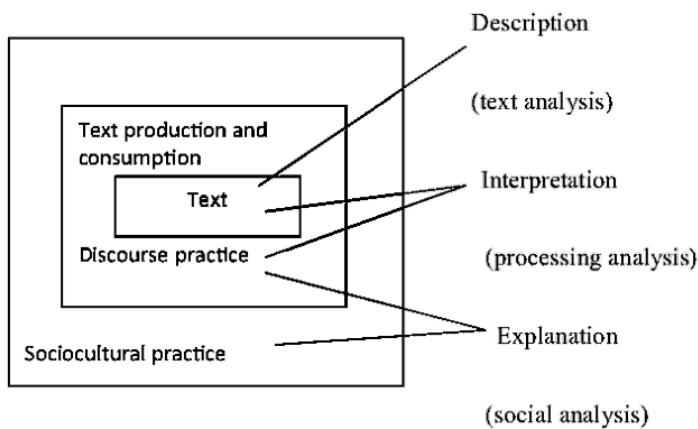
Ideologi, menurut Fairclough (1995), adalah “makna yang melayani kekuasaan”. Ideologi berperan dalam konstruksi makna yang berkontribusi pada produksi, reproduksi, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 1992). Ideologi terbentuk dalam masyarakat. Wacana dapat bersifat ideologis, yaitu wacana yang membantu mempertahankan dan mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi persepsi dan respons publik yang berkontribusi dalam konstruksi respon masyarakat terhadap banjir besar Demak Maret 2024 melalui narasi Selat Muria. Seperti yang telah disebutkan, narasi Selat Muria yang berkembang di media sosial berpotensi mencerminkan atau mempertahankan hubungan kekuasaan tertentu yang dijalankan oleh masyarakat, termasuk pada tingkat interpersonal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap unggahan Instagram yang memuat narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024. Data dikumpulkan dari komentar publik pada dua akun Instagram lokal, yaitu @demakhariini dan @infokejadiandemak, selama periode peristiwa tersebut pada Bulan Maret 2024. Uggahan dari akun Instagram @infokejadiandemak diunggah pada tanggal 17 Maret 2024, sedangkan unggahan dari akun Instagram @demakhariini diunggah pada tanggal 24 Maret 2024. Komentar yang terdapat dalam kedua unggahan tersebut kemudian dikurasi dan ditranskripsi untuk dianalisis.

Melalui analisis terhadap interaksi media sosial serta identifikasi pola-pola wacana yang muncul, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana media sosial membentuk wacana publik selama berlangsungnya peristiwa. Tahapan analisis menggunakan model tiga dimensi Fairclough (1992), yaitu meliputi: (1) analisis tekstual yang terinci di bidang linguistik, termasuk tata bahasa fungsional Michael Halliday; (2) analisis praktik kewacanaan atau analisis makro-sosiologis praktik sosial, termasuk teori wacana Fairclough; dan (3) analisis praktik sosial, yang melibatkan interpretasi dan mikro-sosiologis dalam sosiologi berdasarkan prosedur dan kaidah ‘akal sehat’ (*common sense*), sebagaimana dalam etnometodologi dan analisis komentar publik.



Gambar 1. Dimensi analisis wacana kritis Norman Fairclough

Sumber: *Fairclough, 1992*

'Teks' sebagai objek analisis (termasuk verbal dan/atau visual) yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari unggahan konten media sosial lokal di Kabupaten Demak, khususnya akun Instagram @infokejadiandemak yang berkolaborasi dengan akun Instagram @asligrobogan dan @grobogan.tv (unggahan 17 Maret 2024), serta akun @demakhariini (unggahan 24 Maret 2024). Selain itu, komentar-komentar publik pada unggahan kedua konten tersebut yang menarasikan "Selat Muria" dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024 juga menjadi objek penelitian. Pemilihan dua unggahan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa analisis tidak terbatas pada satu teks (tunggal), melainkan mengungkap dinamika praktik kewacanaan secara lebih luas ([Chouliaraki & Fairclough, 1999](#)).

Analisis dilakukan melalui tiga dimensi dalam pendekatan analisis wacana kritis Fairclough (1992). Pertama, dimensi teks, yang melibatkan analisis linguistik atas kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual dalam narasi Selat Muria yang muncul di kedua media sosial tersebut.

Kedua, dimensi praktik kewacanaan, yang memusatkan perhatian pada bagaimana produsen teks mengandalkan wacana dan aliran pemikiran tertentu dalam membentuk narasi, serta bagaimana penerima teks (komentator) memaknai dan mereproduksi wacana tersebut melalui proses antertekstualitas dan antarkewacanaan.

Ketiga, dimensi praktik sosial-budaya, yang bertujuan mengungkap hubungan antara wacana dan struktur sosial yang lebih luas. Pada tahap ini, penulis menganalisis bagaimana wacana (bahasa yang digunakan dalam konteks sosial) berinteraksi dengan dan mencerminkan identitas sosial, hubungan kekuasaan, serta ideologi tertentu. Dalam tahapan ini, penulis mengeksplorasi hubungan antara praktik kewacanaan dan tatanan wacana (Fairclough, 1992). Selanjutnya, memetakan hubungan kultural, sosial, dan non-wacana, serta struktur yang menyusun konteks lebih luas praktik kewacanaan itu (matriks wacana) (Fairclough, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Selama peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024, akun Instagram @infokejadiandemak dan @demakhariini berperan sebagai media alternatif dalam menyampaikan informasi terkait banjir yang terjadi di Kabupaten Demak. Dalam unggahan kedua akun tersebut yang memuat narasi Selat Muria, tercatat sebanyak 358 komentar pada akun Instagram @infokejadiandemak dan 82 komentar dalam akun Instagram @demakhariini. Penulis mengategorikan komentar-komentar tersebut ke dalam dua kategori utama, yaitu "banjir" dan "Selat Muria". Analisis tekstual difokuskan pada dua unggahan tersebut karena teks yang disajikan merepresentasikan opini publik "banjir" dan "Selat Muria", serta mengandung makna interpersonal melalui tanggapan, komentar, atau bentuk konsumsi wacana yang dapat dianalisis sebagai respons terhadap konten dan praktik sosial.

Analisis Teks



Gambar 2. Slide 1 Konten narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024 pada unggahan akun Instagram @infokejadiandemak, yang berkolaborasi dengan akun @asligerobogan dan @gerobogan.tv

Sumber: instagram.com/infokejadiandemak



Gambar 3. Slide 2 Konten narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024 pada unggahan akun Instagram @infokejadiandemak, yang berkolaborasi dengan akun @asligerobogan dan @gerobogan.tv

Sumber: instagram.com/infokejadiandemak



Gambar 4. Slide 3 Konten narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024 pada unggahan akun Instagram @infokejadiandemak, yang berkolaborasi dengan akun @asligerobogan dan @gerobogan.

Sumber: instagram.com/infokejadiandemak

Dalam unggahan konten mengenai narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024, akun Instagram @infokejadiandemak mengunggah konten yang berisi tiga slide. Slide pertama (Gambar 2) menampilkan peta topografi yang menunjukkan wilayah tergenang akibat banjir membentuk pola yang menyerupai Selat Muria. Garis merah pada peta tersebut berasal dari citra satelit yang merekam area Banjir Besar Demak Maret 2024, yang kemudian dikonstruksikan secara visual menyerupai jejak historis Selat Muria. Peta dan garis berwarna merah menegaskan banjir sebagai elemen yang "mengonseptualisasi ulang" wilayah. Penggunaan frasa "Banjir Selat Muria Maret 2024" sebagai judul utama dalam peta menekankan konstruksi terbentuknya kembali Selat Muria di wilayah terdampak banjir. Secara metaforis, area yang berpotensi mengalami banjir digambarkan dengan warna biru sebagai simbol wilayah perairan, sehingga memberikan visualisasi terhadap ancaman ekologis yang signifikan. Metafora banjir dan interpretasi pembaca secara bersamaan mendorong

terbentuknya percakapan publik yang memposisikan banjir sebagai kekuatan alam yang mampu "membentuk" ulang wilayah, dan memberikan kesan dominasi alam atas manusia.

Slide kedua (Gambar 3) menampilkan peta fisik sebagai representasi realitas geografis Selat Muria, dengan label "Selat Muria" yang tertulis pada wilayah berwarna biru, menunjukkan area perairan. Visualisasi peta ini menggunakan data topografi yang mendetail, sehingga membangun etos ilmiah dan memperkuat kredibilitasnya. Akurasi elevasi (warna hijau untuk daratan, biru untuk perairan) menampilkan Selat Muria sebagai entitas geografis yang nyata, didukung oleh struktur spasial yang jelas dan mudah diinterpretasikan oleh publik.

Pada slide ketiga (Gambar 4), penggunaan kata seperti "selat," "pulau," "gunung," serta nama geografis seperti "Medang Kamulan" menunjukkan fokus pada elemen-elemen alam dan tempat bersejarah. Penulis menelusuri peta sejarah Selat Muria abad ke-15 Masehi dalam tulisan Alamendah (2012), yang membisualisasikan kondisi fisiografis wilayah tersebut pada masa itu. Peta ini secara visual membentuk cara pembaca memahami Selat Muria abad ke-15, termasuk informasi tentang lokasi, seperti Pulau Muria, Gunung Muria, dan Medang Kamulan, sehingga mengarahkan pembaca pada narasi historis yang spesifik. Posisi elemen geografis dalam peta menegaskan pentingnya hubungan spasial antara wilayah-wilayah tersebut pada masa itu. Sebagai dokumen visual, peta Alamendah (2012) merepresentasikan konstruksi terhadap kajian historis yang tidak didasarkan pada metode ilmiah, sehingga kurang dapat diandalkan dalam membangun kepercayaan terhadap keakuratan narasi sejarah.

Dalam takarir (*caption*) unggahan @infokejadiandemak, wacana ekologis dinarasikan melalui pernyataan, seperti "data kejadian di masa lalu untuk bekal hidup di hari ini" dan "pengetahuan dan kesadaran tentang posisi tempat tinggal". Teks ini secara aktif mengkonstruksi identitas masyarakat sebagai subjek yang harus bertanggung jawab atas terjadinya banjir di Demak, dengan menekankan pentingnya pengetahuan dan kesadaran terhadap wilayah tempat tinggal. Masyarakat juga didorong untuk bertindak sesuatu, misalnya "karena memiliki potensi perubahan kondisi tahunan, maka perlu kesigapan tersendiri". Melalui cara ini, penulis takarir, Dhoni Ali Romdhoni, membingkai otoritas masyarakat atas fenomena banjir, dengan menekankan bahwa "masyarakat harus memiliki pengetahuan" dan harapan agar "saudara yang terdampak segera memperoleh solusi dan pertolongan".

Banyak klausa dalam narasi menggunakan kata kerja modal seperti "mesti" atau "harus" (must), misalnya "kita mesti memiliki data kejadian di masa lalu untuk bekal hidup di hari ini" dan "...masyarakat...harus memiliki pengetahuan dan kesadaran". Kata kerja modal tersebut menunjukkan kesimpulan atas suatu keadaan, membentuk kewajiban atau kebutuhan, serta membuka kemungkinan tindakan atau respons alternatif dalam membingkai persepsi publik terhadap Banjir Besar Demak Maret 2024 melalui narasi Selat Muria.



Gambar 5. Konten narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024 pada akun Instagram @demakhariini
Sumber: instagram.com/demakhariini

Dalam konten narasi Selat Muria terkait Banjir Besar Demak Maret 2024 yang diunggah oleh akun Instagram @demakhariini, visual dalam unggahan (Gambar 5) menunjukkan peta tahun 2024 yang secara fisik menggambarkan seolah-olah Selat Muria telah terbentuk kembali. Visual ini menunjukkan wilayah tergenang yang membentuk pola menyerupai Selat Muria, dilengkapi dengan elemen-elemen peta, seperti nama geografis, garis berwarna merah sebagai simbol jalan, dan warna biru yang menandai area perairan atau wilayah yang disebut sebagai Selat Muria.

Secara metaforis, gambar tersebut memvisualisasikan area yang berpotensi terdampak banjir melalui penggunaan warna tertentu, yang berfungsi memperkuat kesan ancaman. Analisis visual menunjukkan bahwa judul unggahan tersebut menyampaikan otoritas pakar geologi melalui struktur klausa hubung korelatif “bukan-melainkan” (seperti “Pakar geologi sebut Selat Muria dapat terbentuk kembali bukan akibat banjir, akan muncul jika penurunan tanah makin besar”). Klausa ini menunjukkan hubungan korelatif antara fenomena banjir dan penurunan tanah terhadap kemungkinan terbentuknya kembali Selat Muria di masa mendatang (seperti “banjir” dan “penurunan tanah” berkorelasi terhadap munculnya “Selat Muria”).

Takarir dalam unggahan akun Instagram @demakhariini memberikan otoritas kepada lembaga penelitian, yaitu Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan sejumlah klausa modalitas yang menguatkan narasi pada judul, seperti penggunaan kata “meskipun” dalam pernyataan (seperti “Selat Muria tidak akan terbentuk dalam waktu dekat meskipun ada penurunan tanah berkisar 5-11 cm per tahun”). Klausa ini menunjukkan hubungan tak bersyarat, yakni bahwa sesuatu hal bisa terjadi tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Selat Muria terbentuk tanpa syarat (seperti “(telah terjadinya) penurunan tanah berkisar 5-11 cm per tahun”, “penurunan tanah daerah pesisir lebih cepat dibanding daratan”, “kenaikan muka air laut”, “perubahan iklim”, “terganggunya pola aliran sungai”, “rawan terhadap bencana rob”, “abrasi”, “curah hujan yang tinggi”, “kerusakan infrastruktur tanggul”, “kondisi lapisan tanah dibawah permukaan yang cenderung bersifat impermeable (lama meloskan air)”, “genangan cukup lama”). Selat Muria juga dapat terbentuk dengan syarat (seperti “proses geologi dahsyat”, “gempa bumi tektonik”, “amblesan atau graben”, “sesar permukaan”). Wacana yang teridentifikasi dalam teks meliputi wacana geologi (seperti “penurunan tanah”, “kenaikan muka air laut”, “perubahan iklim”, “abrasi”, “sesar permukaan”, dan “graben”), wacana kebencanaan (seperti “kerusakan infrastruktur

tanggul”, “bencana rob”, dan “gempa bumi tektonik”), wacana klimatologi (seperti “curah hujan tinggi” dan “genangan air”), serta wacana lingkungan (seperti “infrastruktur tanggul”).

Tabel 1.
Temuan dalam analisis teks kedua akun konten Selat Muria dalam Banjir Demak 2024

No	Teks	Temuan
1	Slide pertama pada akun @infokejadiandemak (Gambar 2)	Mengonstruksi ulang wilayah Selat Muria dalam bentuk peta topografi.
2	Slide kedua pada akun @infokejadiandemak (Gambar 3)	Mewakili realitas geografis wilayah Selat Muria melalui representasi peta fisik.
3	Slide ketiga pada akun @infokejadiandemak (Gambar 4)	Menyajikan narasi sejarah dalam bentuk peta fisiografis Selat Muria pada abad ke-15 Masehi.
4	Takarir (<i>caption</i>) pada akun @infokejadiandemak	Wacana ekologis membentuk identitas masyarakat sebagai subjek yang diposisikan bertanggung jawab atas bencana banjir.
5	Slide pertama pada akun @demakhariini *Gambar 5)	Mengonstruksi ulang wilayah Selat Muria dalam peta fisik 2024 dan menghadirkan wacana positivis mengenai korelasi antara peristiwa dan masa depan.
6	Takarir (<i>caption</i>) pada akun @demakhariini	Wacana positivis memaknai banjir sebagai fenomena yang terjadi “tanpa syarat” dan “dengan syarat” sebagai akibat langsung dari terbentuknya kembali Selat Muria.

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Konten pemberitaan tentang narasi Selat Muria dalam peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024 pada akun Instagram @infokejadiandemak terdiri atas tiga slide visual yang disertai dengan takarir (*caption*) saling terkait. Slide kedua (Gambar 3) merupakan pembaruan atau hasil rekonstruksi visual dari slide pertama (Gambar 2). Sementara itu, slide ketiga (Gambar 4) menampilkan peta kondisi fisiografis Selat Muria pada abad ke-15 Masehi, yang secara visual serupa dengan slide pertama (Gambar 2) dan kedua (Gambar 3).

Wacana yang dominan dalam unggahan akun @infokejadiandemak adalah wacana ekologis, yang menekankan fakta-fakta empiris melalui peta sejarah yang memuat narasi historis dan geologis. Wacana ini mengonstruksi representasi pembaca dalam membentuk persepsi tentang masa lalu dan memengaruhi cara mereka memahami perubahan lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat saat ini.

Dalam kerangka antarkewacanaan Fairclough, representasi visual dalam unggahan akun @infokejadiandemak menunjukkan interaksi antarwacana dalam teks, yang terartikulasikan sebagai wacana ekologis. Ekspresi antarkewacanaan tampak dalam unggahan akun @infokejadiandemak, teks dalam takarir mengandung keselarasan makna dengan gambar yang disajikan. Uggahan tersebut secara aktif membentuk identitas masyarakat sebagai subjek yang harus bertanggung jawab atas peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024. Masyarakat diposisikan sebagai pihak yang perlu mengetahui, menyadari, dan bertindak atas kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui transitivitas, wacana tersebut menekankan pentingnya tindakan konkret yang harus diambil masyarakat dalam menghadapi peristiwa banjir. Interpretasi ini memperkuat pandangan bahwa banjir di wilayah yang secara historis dikenal sebagai “Selat Muria” merupakan isu serius yang menuntut perhatian dan tindakan dari masyarakat.

Konten tentang Selat Muria dalam peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024 yang dipublikasikan oleh akun Instagram @demakhariini disajikan dalam bentuk satu slide visual disertai dengan takarir (*caption*). Dalam kaitannya dengan transitivitas, wacana positivis menekankan terbentuknya Selat Muria dalam unggahan tersebut, penulis identifikasi dalam dua bentuk: tanpa syarat dan bersyarat. Penggunaan modalitas bahasa tampak dalam pembangunan otoritas lembaga penelitian atau peneliti geologi sebagai agen, yang secara eksplisit menyebutkan lembaga (seperti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral). Hal ini diperkuat dengan penggunaan istilah-istilah teknis geologi, sehingga membentuk wacana alternatif baru. Interpretasi ini mendukung pandangan bahwa banjir di wilayah yang dikaitkan dengan “Selat Muria” diposisikan sebagai isu serius berdasarkan kredibilitas dan otoritas lembaga penelitian.

Dalam analisis dimensi teks, kedua konten mengenai narasi Selat Muria dalam peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024 menggambarkan dua wacana yang berbeda, masing-masing memiliki ciri linguistik tersendiri yang mengkonstruksi hubungan narasi Selat Muria antara masyarakat, lingkungan, dan lembaga penelitian. Konten narasi Selat Muria pada akun Instagram @infokejadiandemak merepresentasikan otoritas masyarakat dalam membangun narasi Selat Muria sebagai wacana ekologis. Sedangkan, konten narasi Selat Muria dalam akun Instagram @demakhariini menampilkan otoritas lembaga penelitian dalam membingkai narasi Selat Muria sebagai wacana positivis.

Konten tentang narasi Selat Muria dalam peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024 yang diunggah oleh akun Instagram @infokejadiandemak menunjukkan derajat antarkewacanaan yang rendah dan cenderung mengandalkan wacana ekologis. Teks dalam unggahan tersebut merupakan hasil salinan langsung dari teks lain yang bersumber dari unggahan akun Facebook dengan nama pengguna Dhoni Ali Romdhoni, yang artikulasinya persis tanpa adanya parafrase. Namun, tidak semua elemen dari sumber asli ditransmisikan ke Instagram, seperti dalam sumber aslinya terdapat video (seperti video laporan Polantas Kudus kondisi jembatan Tanggulangin Kudus yang tergenang banjir, video kondisi jalan raya Demak-Kudus yang tergenang banjir, video kondisi Makam Kadilangu yang tergenang banjir, video kondisi Alun-alun Kabupaten Demak yang tergenang banjir, dan video pantauan udara banjir Pantura oleh kepolisian yang memperlihatkan banjir dari 4 titik lokasi tanggul sungai yang Jebol) yang menunjukkan kondisi Banjir Besar Demak Maret 2024 tidak diunggah dalam akun Instagram @infokejadiandemak.

Produksi wacana oleh Dhoni Ali Romdhoni menekankan pada narasi Selat Muria dan peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024, dengan fokus pada penyebab banjir, yaitu jebolnya tanggul di empat titik lokasi tanggul sungai di Demak. Narasi ini didukung oleh video pemantauan dari pihak kepolisian yang menunjukkan kondisi lapangan dan arus lalu lintas. Dari 45 komentar yang terdapat dalam unggahan Facebook dengan nama pengguna Dhoni Ali Romdhoni, penulis mengidentifikasi temuan dalam konsumsi sumber teks atau komentar, yaitu wacana politik (seperti “assesmen bencana biasanya jarang menggunakan pendekatan historis-geologi sehingga cara penanganannya pun tidak permanen”, “kalau sungai tidak dinormalisasi, tanggul tidak dikuatkan lagi, maka bisa jadi setiap musim hujan terjadi banjir”, “kebijakan pemerintah tidak menyasar langkah preventif”, dan “tidak seimbang hutan hijau dan lahan industri”). Uggahan akun Instagram @infokejadiandemak, dalam hal ini, memilih untuk tidak menyertakan video yang memuat bukti visual penting, sehingga secara implisit mengaburkan dimensi material dari peristiwa tersebut. Pilihan ini menunjukkan selektivitas dalam penyebarluasan wacana, yang pada akhirnya turut membentuk persepsi publik terhadap peristiwa secara terbatas.

Tabel 2.
Kata kunci dalam analisis wacana kedua konten Selat Muria dalam Banjir Demak 2024

Kategori Wacana	Kata Kunci
Wacana ekologis	Terbentuknya Selat Muria, kesadaran, dan kesigapan, rehabilitasi
Wacana positivis	Wacana positivis tanpa syarat (seperti, penurunan tanah, kenaikan muka air laut, perubahan iklim, gangguan pola aliran sungai, bencana rob, abrasi, curah hujan tinggi, kerusakan infrastruktur tanggul, lapisan tanah impermeable, dan genangan cukup lama) dan wacana positivis dengan syarat (seperti, proses geologi dahsyat, gempa bumi tektonik, amblesan atau graben, sesar permukaan)

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Praktik Kewacanaan: Antarkewacanaan dan Antartekstualitas

Konten narasi Selat Muria mengenai Banjir Besar Demak Maret 2024 dalam unggahan akun Instagram @demakhariini menunjukkan derajat antarkewacanaan yang tinggi. Wacana positivis diartikulasikan berdasarkan wacana keilmuan (geologi). Dengan menggunakan eupemisme atau bahasa halus (seperti “Selat Muria tidak akan terbentuk dalam waktu dekat”), unggahan tersebut mendorong lahirnya wacana interpersonal.

Menurut teori wacana, tingkat antarkewacanaan yang tinggi berkaitan dengan perubahan, sementara tingkat antarkewacanaan yang rendah menandakan reproduksi tatanan yang telah mapan atau stabil. Pada tahap analisis ini, secara tentatif penulis menyimpulkan bahwa konten narasi Selat Muria terkait Banjir Besar Demak Maret 2024 pada akun Instagram @infokejadiandemak mempertahankan tatanan wacana ekologis dalam otoritas masyarakat. Sementara itu, konten narasi Selat Muria dalam Banjir Demak periode Maret 2024 pada akun Instagram @demakhariini merepresentasikan perubahan makna fisiologis atau wacana positivis yang lebih luas dalam otoritas lembaga penelitian. Dalam unggahan akun Instagram @demakhariini, wacana tampak bersifat inovatif atau tengah mengalami proses transformasi, yakni dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai wacana lain untuk menciptakan situasi baru (seperti wacana geologi, kebencanaan, klimatologi dan lingkugnan). Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk membangun solusi baru dan mendorong perubahan dalam struktur sosial.

Dalam analisis wacana interpersonal, penulis melakukan analisis terhadap komentar-komentar publik yang muncul sebagai respons terhadap dua unggahan tersebut yang mengangkat narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024. Pada unggahan akun Instagram @infokejadiandemak, penulis mengidentifikasi sebanyak 358 komentar. Wacana interpersonal yang lahir dari teks utama, berisi dominasi wacana ekologis sehingga mendorong antarkewacanaan yang tinggi. Peneliti mengidentifikasi wacana ekologis yang kompleks dalam konsumsi teks utama, seperti “banjir ini ada andil kita yang salah”, “kita dapat lebih memperhatikan dan menjaga lingkungan”, “mari kita jaga dan lestarikan alam ini”, “kerusakan alam”, “antisipasi warga”, “jaga kebersihan sungai sampah dibersihkan”, “sungai dangkal”, “tanggul lebih tinggi dari jalan berpotensi banjir”, “banjir hanya masalah debit air yang banyak”, “sungai tidak bisa mengalirkan air dengan lancar”, “hutannya hilang atau gundul”, “jagalah alam”, “selokan depan rumah dibersihkan”, “pendangkalan sungai”, “curah hujan tinggi”, “banyak buang sampah sembarangan”.

Unsur-unsur lain yang terdapat dalam campuran antarkewacanaan, penulis temukan dalam konsumsi teks utama adalah wacana positivis (misalnya “dengan kecepatan sedimentasi 30 meter per tahun”, “perubahan fenomena geomorfik pada sekeliling gunung api muria”), wacana spiritual (misalnya “yang perlu diperbaiki tauhid kita”, “intinya harus selalu berdoa”, “itu semua *wallahu a'lam*”, “dunia sudah tua”, “sabar”, “alam meminta haknya lagi kepada manusia”, “puasalah”, “hanya Allah yang tahu”, “korban banjir lebih taat”, “jangan menambah takut lagi”,), dan wacana ketakutan (misalnya “menambah takut”, “merendahkan mental korban banjir”, “membuat tambah was-was”, “informasi ini sangat menyakiti pada korban bencana”, “menambah beban pikiran”). Selain itu, konsumsi teks yang terdapat dalam unsur-unsur lain, didapati, seperti wacana kritik sebagai bentuk kritik dari fenomena banjir (seperti “pemerintah hanyalah melaksanakan tindakan tanggap darurat dan pemulihan, namun tidak pernah disertai intervensi mitigasi yang terorganisir”, “tambang ilegal dan hentikan tambang”, “tidak ada pengeringan sungai yang dangkal”, “tidak ada solusi dari pemerintah”, “daerah atas dibuatkan bendungan”, “penghentian pertambangan”, “bukit jadi pabrik semen”).

Komentar-komentar pada unggahan akun Instagram @infokejadiandemak mengembangkan wacana ekologis yang kompleks dengan berbagai perspektif, menunjukkan antarkewacanaan tinggi. Adanya kritik dalam jumlah yang signifikan, menunjukkan pembaca secara aktif dan kritis terhadap teks utama, yang memperkuat antarkewacanaan yang tinggi.

Tabel 3.
**Kata kunci dalam campuran antarkewacanaan komentar unggahan akun instagram
@infokejadiandemak**

Kategori Wacana	Kata Kunci
Wacana ekologis	Tanggung jawab individu, kerusaakan lingkungan, mitgasi bencana, aksi lokal
Wacana positivis	Pendekatan ilmiah, fakta empiris, pengukuran kuantitatif
Wacana spiritual	Keyakinan, agama
Wacana ketakutan	Psikologi negatif, kecemasan, ketidakpastian
Wacana kritik	Respons pemerintah, buruknya kebijakan, eksplorasi alam

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Penelitian ini menganalisis komentar pembaca untuk mengetahui bagaimana mereka menginterpretasikan teks-teks yang dihasilkan dalam narasi Selat Muria terkait Banjir Besar Demak Maret 2024. Pada unggahan akun Instagram @demakhariini, terdapat 82 komentar yang dianalisis. Wacana interpersonal yang lahir dari teks utama, berisi wacana positivis mendorong antarkewacanaan yang rendah. Penulis mengidentifikasi unsur-unsur lain antarkewacanaan, yakni wacana ekologis (seperti “warga pantura harus lebih peduli terhadap isu-isu kerusaakan lingkungan”, “pendangkalan sungai”, “pengeboran air tanah”), wacana spiritual (seperti “banyak berbuat baik”, “mimpi terjadinya banjir”, “kun faya kun”, “ramalan pulau jawa terbelah dua”) dan wacana ketakutan (seperti “ayo pindah dari demak”, “kenapa ada berita seperti ini”). Peneliti menemukan hanya satu buah komentar yang berisi wacana kritik (seperti “pemerintah menutupi kekurangan atas penanggulangan bencana dan perusakan alam”). Kehadiran hanya satu komentar menunjukkan rendahnya intensitas kritik dalam diskusi sehingga wacana kritik tidak berkembang. Wacana ekologis, spiritual, atau ketakutan juga hanya muncul sporadis, sehingga kontribusinya terhadap wacana-wacana ini secara keseluruhan antarkewacanaan juga terbatas.

Tabel 4.
Kata kunci dalam campuran antarkewacanaan komentar unggahan akun Instagram @demakhariini

Kategori Wacana	Kata Kunci
Wacana ekologis	Tanggungjawab kolektif, masalah ekologi
Wacana spiritual	Keyakinan, ramalan, peringatan
Wacana ketakutan	Kecemasan, ketakutan
Wacana kritik	Pertanggungjawaban pemerintah

Sumber: Olahan Penulis, 2024

Untuk mengungkap dominasi kekuasaan sekaligus mendorong perubahan sosial melalui teks utama atau konten tersebut, penulis menyelidiki bagaimana konten tersebut mencerminkan, mempertahankan, atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Sehingga, penulis mengidentifikasi antarkewacanaan sebagai wacana yang mendukung dan menentang kekuasaan. Wacana dapat dilihat sebagai cara untuk menormalisasi dan melegitimasi cara pandang tertentu, mengesampingkan perspektif alternatif yang mungkin lebih kritis terhadap struktur sosial yang ada (Fairclough, 1993).

Hubungan antara praktik kewacanaan dan tatanan wacana (Fairclough, 1992) cenderung menuju ke dalam jenis wacana non kritik. Dalam analisis praktik kewacanaan diperoleh antarkewacanaan yang rendah. Wacana positivis yang berpotensi mendorong wacana antarkewacanaan yang tinggi, menampilkan diri sebagai netral dan objektif, sehingga tidak mampu mendorong respons publik yang menunjukkan antarkewacanaan tinggi (Marston, 2000; Scollon, 2003). Wacana ekologis juga berpotensi mendorong antarkewacanaan tinggi. Namun, menekankan tanggungjawab individu dapat melemahkan desakan terhadap perubahan struktural yang lebih besar, sehingga memperkuat dominasi sistem yang ada.

Wacana positivis, ekologis, spiritual, dan ketakutan, dalam analisis praktik kewacanaan, relevan dengan konteks non kritik. Penulis menyimpulkan praktik kewacanaan, seperti wacana

positivis, ekologis, spiritual, dan ketakutan, tidak mengungkapkan pengaruh tatanan kekuasaan yang ada, sehingga memperkuat posisi kekuasaan tertentu, misalnya penanganan banjir dan tindakan preventif pemerintah dengan menekankan otoritas mereka dalam menginterpretasikan narasi Selat Muria.

Kelompok marginal hanya diwakili melalui wacana kritik dengan antarkewacanaan yang rendah dan tidak memiliki akses atau kapabilitas untuk memproduksi dan menggunakan data empiris, yang justru memperkuat ketimpangan kekuasaan (seperti penggunaan wacana ekologis yang memiliki otoritas pada masyarakat dan wacana positivis yang memiliki otoritas pada lembaga penelitian).

Praktik Sosial: Ekologis dan Positivis

Setelah membahas pentingnya antartekstualitas dan antarkewacanaan, penulis ingin fokus pada dimensi sosial dari Banjir Besar Demak Maret 2024. Dimensi sosial wacana membentuk bagaimana aktor sosial akan menafsirkan sebuah teks. Untuk mengilustrasikan bagaimana ini terjadi, penulis menarik perhatian pada signifikansi wacana ekologis dan positivis dalam banjir besar Demak. Untuk membahas proses ini, penulis mereproduksi wacana yang terjadi pada bencana serupa di Demak, yaitu banjir rob. Wacana ini digunakan untuk merekonstruksi ulang wacana yang sudah dinaturalisasi dan diinstitusionalisasikan dalam narasi Selat Muria atas Banjir Besar Demak Maret 2024. Dengan berfokus pada ekologis dan positivis, penulis menarik perhatian pada salah satu fungsi sosial utama “ideologi dan hegemoni wacana”. Wacana ekologis dan positivis digunakan untuk memahami ideologi sebagai pengonstruksian makna yang berkontribusi pada produksi, reproduksi, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 1992).

Dalam kerangka ideologi, subjek tidak hanya diposisikan secara pasif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertindak secara kreatif dalam merespons praktik dan ideologi yang membentuknya. Subjek dapat menegosiasikan ulang posisi mereka dalam struktur wacana yang ada serta merekonstruksi hubungan antara praktik sosial dan kekuasaan tempat mereka dihadirkan (Fairclough, 1992). Efeknya dapat menciptakan kesadaran akan efek ideologis. Kemudian, “negosiasi makna”, serta menaburkan benih-benih perlawanan. Sehingga keseimbangan saling bertentangan dan tidak stabil (Fairclough, 1992).

Konsep hegemoni digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik kewacanaan menjadi bagian dari praktik sosial yang lebih luas, yang melibatkan hubungan kekuasaan. Praktik kewacanaan dapat dipandang sebagai bagian dari perjuangan hegemonik yang memberikan kontribusi bagi reproduksi dan transformasi tatanan wacana dan hubungan kekuasaan yang melekat di dalamnya. Makna kewacanaan terbentuk ketika unsur-unsur kewacanaannya diartikulasikan melalui cara-cara baru.

Naturalisasi dan Institusionalisasi Banjir Besar Demak Maret 2024

Dalam melakukan eksplorasi hubungan antara praktik kewacanaan dan tatanan wacana, penulis mengidentifikasi jaringan wacana yang mengikat pemahaman ekologis pada unggahan akun Instagram @infokejadiandemak yang mengacu pada sejarah geografis Selat Muria (pengaruh sejarah terhadap teks, menurut Kristeva yang dikutip dalam Fairclough, 1992) ke teks media sosial. Selanjutnya, jaringan wacana yang terbentuk dalam unggahan akun Instagram @demakhariini yang didahului teks unggahan akun Instagram @infokejadiandemak, bermula dari pemahaman ekologis disertai sejarah geografis Selat Muria. Jaringan wacana tersebut kemudian mengikat laporan ilmiah lembaga penelitian ke dalam teks media sosial, selanjutnya ke dalam pembicaraan dan teks khayal. Dalam hal ini, admin (produsen) media sosial merekonstruksikan visual dalam produksi teks media sosial. Dalam proses konsumsi, penerima memasukkan unsur-unsur dari teks media dalam mengonstruksi suatu teks baru seperti pada tabel 3 dan tabel 4.

Campuran antarkewacanaan serta tanggapan atau komentar dalam akun Instagram @infokejadiandemak terkait Selat Muria dan Banjir Besar Demak Maret 2024, mencerminkan kaburnya batas antara wacana pemerintah-wacana positivis dan wacana ekologis gagal secara efektif membahas peran dan otoritas pemerintah. Merujuk pada proses dimana praktik kewacanaan yang berasal dari masyarakat dan lembaga penelitian, diadopsi, diubah atau diintegrasikan ke dalam wacana pemerintah, yang kemudian disebut sebagai “kolonisasi wacana”.

Dalam menghadapi bencana, banjir besar, wacana tersebut memosisikan bencana sebagai “takdir alam” dan “historis” atau (akan) terbentuknya Selat Muria (tabel 2)—sesuatu yang tidak bisa dihindari—mengalihkan perhatian dari praktik manusia yang berkontribusi pada bencana (seperti, pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan). Dalam praktik sosial, hal ini dapat mengurangi tekanan dalam melakukan perubahan struktural yang lebih mendalam terkait penyebab bencana, dan lebih berfokus pada penanggulangan sementara (misalnya, pemberian bantuan darurat, pembangunan infrastruktur).

Dalam peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024, berkembang narasi mengenai infrastruktur seperti tanggul sungai yang disertai pemberian bahwa solusi teknis tersebut merupakan wujud “kemajuan” atau “modernisasi”. Praktik sosial dalam konteks ini lebih menekankan pada strategi adaptasi, bukan perubahan struktural terhadap akar penyebab bencana, seperti penataan tata ruang atau perubahan kebijakan lingkungan secara menyeluruh. Narasi ini berkaitan dengan praktik sosial yang lebih luas, seperti pembangunan tanggul laut raksasa oleh pemerintah untuk mencegah banjir rob di kawasan pesisir Demak.

Praktik kewacanaan pada unggahan media sosial tersebut cenderung memperkuat status quo. Meski ada potensi untuk antarkewacanaan yang tinggi, elemen-elemen krisis kurang terfasilitasi, terutama pada wacana positivis. Pada tataran praktik sosial dalam kerangka Fairclough, hubungan antara narasi Selat Muria dan media sosial dalam mendukung kekuasaan yang ada dan membangun identitas subjek ekologis dan positivis menuntut perhatian yang lebih seksama. Dari sudut pandang hegemonik, fungsi media sosial adalah upaya untuk menciptakan persetujuan dalam mendukung ‘pergeseran mendasar’ dalam narasi Selat Muria.

Dengan bantuan media sosial, individu dan kolektif dikonstruksikan dalam ‘penanggungjawab masalah banjir’. Narasi selat muria mengonstruksi ‘lembaga penelitian’ sebagai suatu yang netral, sementara secara bersamaan tidak mampu memengaruhi praktik pemerintah dalam menemukan solusi. Salah satu ironi dalam narasi Selat Muria ini adalah bahwa identitas subjek ‘penanggungjawab masalah banjir’ menunjukkan bahwa pemerintah abstain dalam tugas dan fungsi dalam tindakan preventif, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Kontradiksi yang nyata ini menyoroti hubungan yang kompleks antara wacana yang dinaturalisasi dan diinstitusionalisasikan dalam wacana bencana.

Konsekuensi Ideologis, Politik, dan Sosial

Narasi “kembalinya Selat Muria” digunakan untuk menekankan bahwa banjir besar adalah fenomena alam yang tidak terhindarkan (positivisme geologi), maka narasi tersebut dapat mereproduksi ideologi determinisme ekologis, yang cenderung mengabaikan tanggung jawab manusia atau struktur sosial-ekonomi. Sebaliknya, narasi tersebut berpotensi menjadi alat untuk mengkritik ideologi pembangunan teknokratis. Dengan menekankan “Selat Muria” sebagai simbol kembalinya ekosistem yang rusak, narasi ini dapat menantang proyek pembangunan yang tidak berkelanjutan. Narasi Selat Muria yang mendominasi wacana Banjir Besar Demak Maret 2024 di media sosial, menunjukkan bagaimana hegemoni ideologi bekerja. Namun, narasi alternatif, seperti “Selat Muria sebagai bentuk peringatan atas kegagalan penanganan”, dapat berpotensi menjadi bentuk resistensi terhadap hegemoni determinisme ekologis.

Framing media yang mengaitkan Banjir Besar Demak Maret 2024 dengan kembalinya Selat Muria dapat membentuk persepsi masyarakat. Masyarakat berpotensi menganggap banjir

sebagai hal yang tidak dapat dicegah, sehingga partisipasi mereka dalam mengkritik atau menuntut perubahan kebijakan menjadi lemah. Serta masyarakat berpotensi dapat terdorong untuk menuntut kebijakan ekologis yang lebih berkelanjutan.

Narasi Selat Muria dapat digunakan oleh pemerintah untuk melegitimasi atau mengalihkan tanggung jawab untuk mendukung proyek strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur, dengan dalih menghadapi "tantangan ekologis besar". Sebaliknya, narasi Selat Muria berpotensi menimbulkan perlawanan, jika narasi ini digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekosistem, sehingga legitimasi pemerintah tersebut dapat terganggu. Narasi Selat Muria berpotensi menjadi dasar mobilisasi masyarakat lokal untuk menolak proyek tertentu yang dianggap memperburuk kondisi ekologis, seperti reklamasi atau pembangunan tanggul yang tidak partisipatif.

Dalam konsekuensinya terhadap sosial, narasi ini dapat mengubah cara masyarakat memahami hubungan mereka dengan lingkungan. Masyarakat berpotensi lebih terlibat dalam upaya restorasi ekologis, jika narasi menekankan tanggungjawab kolektif. Fokus masyarakat dapat teralihkan dari solusi berbasis komunitas ke solusi berbasis infrastruktur, jika narasi bersifat teknokratis. Narasi ini dapat memperkuat identitas kolektif masyarakat pesisir Demak sebagai kelompok yang terdampak perubahan ekosistem, jika terdapat perbedaan pandangan tentang penyebab dan solusi banjir, sehingga memicu konflik, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah. Narasi ini dapat mengubah norma dan nilai tentang lingkungan, jika narasi kritis mendominasi bahwa lingkungan dilihat sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas lokal yang perlu dilindungi. Jika narasi deterministik mendominasi, maka lingkungan dapat dipahami sebagai objek pasif yang memerlukan intervensi teknologi.

Untuk menjelaskan proses sosial yang lebih luas, yang juga mencakup daya nonkewacanaan, penulis menguraikan data empiris nonkewacanaan dari berbagai fenomena lingkungan (positivis tanpa syarat dan dengan syarat) yang memberikan basis material untuk memahami Banjir Besar Demak Maret 2024. Faktor alam salah satunya menjadi akibat dari proses jangka panjang (seperti, penurunan tanah, kenaikan muka air laut, perubahan iklim, gangguan pola aliran sungai, bencana rob, abrasi, curah hujan tinggi, kerusakan infrastruktur tanggul, lapisan tanah impermeable, genangan cukup lama). Fenomena geologi dahsyat (seperti, proses geologi Dahsyat, Gempa Bumi Tektonik, Amblesan atau Graben, Sesar Permukaan) yang jarang terjadi, tapi jika muncul berpotensi mengakibatkan dan memperparah banjir.

Media mengonstruksi Banjir Besar Demak Maret 2024 berkaitan dengan terbentuknya kembali Selat Muria. Artinya, media menciptakan narasi tentang banjir besar tersebut dengan mengaitkannya pada wacana terbentuknya kembali Selat Muria, sebuah framing yang memiliki dimensi historis, politis, dan simbolis. Fakta material yang kompleks cenderung direduksi oleh media menjadi narasi sederhana yang lebih mudah dipahami publik. Dalam hal ini, media memanfaatkan narasi Selat Muria sebagai simbol untuk menjelaskan atau menyederhanakan penyebab banjir.

Fenomena material seperti abrasi dan penurunan tanah seringkali membutuhkan penjelasan ilmiah yang kompleks. Media memilih membungkai banjir besar dengan narasi "terbentuknya kembali Selat Muria" karena lebih menarik secara historis dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa media dipengaruhi oleh fakta material (nonkewacanaan), tetapi sekaligus menyesuaikan narasinya untuk tujuan politis, ideologis, atau ekonomi.

Narasi tentang Selat Muria mengalihkan perhatian publik dari fakta material yang lebih mendesak, seperti penurunan tanah atau kerusakan infrastruktur. Narasi ini dapat mendorong diskusi atau aksi masyarakat, misalnya tekanan terhadap "terbentuknya kembali Selat Muria" sebagai mitos yang menimbulkan perlawanan, jika wacana tersebut didukung fakta material yang kuat. Pemerintah idealnya mendorong untuk merespons wacana ini secara simbolis serta

menangani penyebab material banjir, seperti memperbaiki infrastruktur tanggul atau normalisasi sungai, sehingga pada peristiwa banjir besar, narasi Selat Muria digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas data material.

Memaknai Wacana Selat Muria

Berdasarkan pembedahan tiga dimensi wacana dari Fairclough terkait analisis teks, praktik wacana, serta praktik sosial, kecenderungan pola wacana yang muncul terkait Banjir Besar Demak Maret 2024 dan narasi Selat Muria berkaitan dengan kata kunci: positivis, ekologis dan spiritual. Teks-teks yang muncul juga mengarah pada wacana “ketakutan” terhadap perubahan ekologis yang terjadi di Demak dengan Selat Muria yang berpotensi mengancam kehidupan masyarakat.

Narasi Selat Muria muncul sebagai ekses dari perubahan ekologis yang terjadi di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Selat Muria. Perubahan ini secara nyata berdampak pada lumpuhnya aktivitas masyarakat di Demak selama peristiwa Banjir Besar Demak Maret 2024. Unggahan di media sosial merepresentasikan respons terhadap praktik “keagenan” pemerintah maupun tindakan masyarakat yang mengabaikan aspek ekologis dalam proses pembangunan dan aktivitas harian. Narasi “ketakutan” setidaknya dapat memberikan kritik sekaligus peringatan terhadap kebijakan lingkungan pemerintah dalam menghadapi krisis ekologis. Hal ini juga menunjukkan bahwa alam tidak dapat sepenuhnya dibentuk dan ”dikreasikan” sesuai dengan keinginan manusia, seperti dalam proyek tol tanggul laut yang idealnya dapat mencegah tingginya abrasi, melainkan menimbulkan krisis sosio-ekologis yang lebih luas ([Batubara et al., 2020](#)).

Wacana mengenai penanganan lingkungan dalam perspektif pembangunan-isme yang cenderung antroposentrismenunjukkan kelemahannya melalui bukti-bukti ilmiah. Bukti tersebut kemudian dikemas ulang menjadi wacana tandingan yang meruntuhkan pandangan antroposentrism terhadap lingkungan dan pembangunan. Kritik terhadap pendekatan yang antroposentrism tersebut dikaitkan juga dengan sifat “keagenan” masyarakat yang masih memaknai hubungan manusia dan alam dalam dimensi transidental. Hal ini menunjukkan bahwa dalam wacana spiritual, pendekatan antroposentrisme tetap melekat.

Keempat wacana utama yang muncul, yakni ekologis, positivis, spiritual, dan ketakutan, saling berkelindan dan menjadi wacana dominan dalam diskursus mengenai narasi Selat Muria dalam konteks Banjir Besar Demak Maret 2024. Wacana-wacana tersebut akan kehilangan legitimasi, ketika negara, sebagai aktor yang memiliki otoritas diskursif, tidak mengambil tindakan strategis dalam penanganan banjir maupun membangun narasi tandingan (counter) terhadap wacana yang berkembang. Akibatnya, wacana-wacana ini gagal menguat sebagai wacana dominan di tengah ketidakpastian penanganan Banjir Besar Demak Maret 2024.

Kesimpulan

Narasi Selat Muria membentuk persepsi publik melalui dua arah utama: pertama, sebagai simbol fenomena alam yang tidak dapat dihindari; kedua, sebagai tanda kegagalan tata kelola lingkungan. Publik yang bersikap pasif cenderung menerima narasi deterministik dan berfokus pada adaptasi tanpa mendorong perubahan struktural. Sebaliknya, publik yang kritis menafsirkan narasi ini sebagai bentuk perlawan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk bingkai naratif yang melegitimasi kekuasaan. Wacana-wacana yang berkembang didominasi oleh narasi deterministik, yang menghubungkan wacana ekologis dan positivis, serta berkontribusi terhadap penerimaan publik yang bersifat pasif atas Banjir Besar Demak Maret 2024. Di sisi lain, narasi kritis yang mengaitkan banjir besar tersebut dengan kegagalan tata kelola lingkungan menciptakan ruang bagi resistensi dan mobilisasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Simbolisme "Selat Muria sebagai pengingat" membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari identitas lokal.

Reproduksi wacana berpotensi mengarahkan respons publik ke arah yang lebih proaktif dan transformatif melalui diversifikasi narasi, partisipasi publik, dan kritik media. Diversifikasi narasi perlu didorong dengan memunculkan wacana yang memberdayakan, seperti "banjir sebagai peringatan ekologis", untuk mendorong masyarakat menuntut solusi berbasis keadilan sosial dan lingkungan. Partisipasi publik dapat diperkuat dengan melibatkan masyarakat lokal dalam diskusi kebijakan untuk memastikan bahwa suara mereka menjadi bagian dari solusi, bukan semata objek dampak. Media juga perlu membungkai narasi secara seimbang dengan menyoroti dimensi ekologis, sosial, dan politik dari banjir besar tersebut untuk membangun kesadaran publik yang lebih kritis dan mendalam.

Identitas subjek individu dan kolektif, serta identitas lembaga penelitian, digunakan untuk melegitimasi narasi Selat Muria yang mendukung kekuasaan. Bahwa identitas subjek individu dan kolektif dimaknai sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas terjadinya banjir, sementara lembaga penelitian diposisikan sebagai aktor yang objektif dan netral. Dinamika wacana dalam narasi Selat Muria menunjukkan kecenderungan kemerosotan antarkewacanaan (rendah), dimana kritik terhadap kebijakan preventif, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan oleh pemerintah menjadi terabaikan. Dengan demikian, produsen teks yang dominan di media sosial berhasil mempertahankan wacana hegemonik mengenai Selat Muria sebagai penjelasan utama atas Banjir Besar Demak Maret 2024.

Daftar Pustaka

- Alamendah. (2012). *Gunung Muria; Sejarah, Status, dan Potensi*. Alamendah's Blog. <https://alamendah.org/2012/02/18/gunung-muria-sejarah-status-dan-potensi/>
- Amri, S., Klimatologi, P. S., Tinggi, S., & Klimatologi, M. (2024). Analisis Dinamika Atmosfer Pada Kejadian Banjir , Tanah Longsor , dan Angin Kencang Di Semarang dan Demak Tanggal 13 Maret 2024. *Jurnal Ilmiah Biosaintropis (Bioscience -Tropic)*, 10(1), 77–89. <https://doi.org/10.33474/ejbst.v10i1.594>
- Batubara, B., Henny Warsilah, Wagner, I., & Salam, S. (2020). *Maleh dadi Segoro ; Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak* (Issue October). Lintas Nalar. https://www.researchgate.net/publication/344804419_Maleh_dadi_Segoro_Krisis_Sosial-Ekologis_Kawasan_Pesisir_Semarang-Demak
- Chouliarak, L., & Fairclough, N. (1999). Discourse in late modernity : rethinking critical discourse analysis. In Edinburgh University Press eBooks. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA44719293>
- Sushmita, C. I. (2021). *Demak Terancam Tenggelam dalam 20 Tahun!* Regional.Epos.Id. <https://regional.espos.id/demak-terancam-tenggelam-dalam-20-tahun-1127657>
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Wiley.
- Fairclough, N. (1993). Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse: The Universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0957926593004002002>
- Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. In Routledge. Pearson Education Limited.
- Marston, G. (2000). Metaphor, morality and myth: a critical discourse. *Critical Social Policy*, 20(3), 349–373. <https://doi.org/10.1177/026101830002000305>

Novita, D., Utami Agustiani, I., & Hendratno, A. (2010). The 39th IAGI Annual Convention and Exhibition. *PROCEEDINGS PIT IAGI LOMBOK 2010 The 39th IAGI Annual Convention and Exhibition.* <http://demakkab.go.id>

Ongkosongo, O. S. R. (1981). Tombolo dan Bekas Pulau Kuarter di Pulau Jawa dan Bali. *PIT X Ikatan Ahli Geologi Indonesia.* <https://www.iagi.or.id/web/digital/34/PIT-IAGI-1981-Vol-1-Paper-12.pdf>

Rommiyati, A., Nasihah, I. A., Miftah, D., & Nur, M. (2024). Penanganan Bencana Banjir Demak: Komparasi Pendekatan dan Budaya Lokal di Demak dan Kudus. *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* 1(5), 76–83. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/1277>

Scollon, R. (2003). The dialogist in a positivist world: Theory in the social sciences and the humanities at the end of the twentieth century. *Social Semiotics,* 13(1), 71–88. <https://doi.org/10.1080/1035033032000133517>

Sunarto. (2004). *Perubahan Fenomena Geomorfik Daerah Kepesisiran di Sekeliling Gunungapi Muria Jawa Tengah: Kajian Paleogeomorfologi* [Universitas Gajah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25961>

Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan Strategi Penguatan

Burlian Senjaya^{1*} , Pahrudin HM¹ , Samia Elviria² 

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Nurdin Hamzah Jambi, 36129, Jambi- Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nurdin Hamzah Jambi, 36129, Jambi- Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Feb 21, 2025

Accepted: May 05, 2025

Published: Jun 04, 2025

Kata Kunci:

Gender Representation; Jambi Province; Women's Political Participation.

Penulis Koresponden:

Burlian Senjaya

Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Nurdin Hamzah Jambi.

Email:

burliansenjaya@unh.ac.id

Situs Cantuman:

Senjaya, B., Pahrudin, H. M., & Elviria, S. (2025). Representasi perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan strategi penguatan. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 34-45.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.323>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta (c) 2025 dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Journal of
Political Issues

Abstrak

Abstract The low representation of women in election management institutions is a structural problem that continues to hamper the consolidation of electoral democracy in Indonesia. This study highlights the limitations of the implementation of the affirmative policy of 30% female representation in the membership of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Jambi Province. Using a qualitative approach through observation, documentation, and in-depth interviews with key actors in the recruitment process, this study found that most areas in Jambi Province have no female representation at all. The main obstacles include a deep-rooted patriarchal culture, weak social networks and women's technical capacity, and selection practices that are not yet gender-inclusive, coupled with geographical constraints that limit women's participation. Using theories of political representation, gender, and institutions, this study analyzes how biased social and institutional structures contribute to reproducing these inequalities. The main contribution of this study is the strengthening of the concept of institutional constraints based on local culture that explain the failure of affirmation in the regional context. Recommendations offered include increasing women's capacity through political training, reforming selection mechanisms based on a gender perspective, and strengthening collaboration between stakeholders. Thus, this study provides an empirical and theoretical basis for building a more inclusive, gender-equitable, and contextual local democracy agenda.

Abstrak Rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan persoalan struktural yang terus menghambat konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia. Studi ini menyoroti keterbatasan implementasi kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap aktor kunci dalam proses rekrutmen, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Hambatan utama mencakup budaya patriarki yang mengakar, lemahnya jejaring sosial dan kapasitas teknis perempuan, serta praktik seleksi yang belum inklusif gender, ditambah dengan kendala geografis yang mempersempit partisipasi perempuan. Menggunakan teori representasi politik, gender, dan kelembagaan, studi ini menganalisis bagaimana struktur sosial dan kelembagaan yang bias turut mereproduksi ketimpangan tersebut. Kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan konsep kendala kelembagaan berbasis budaya lokal yang menjelaskan kegagalan afirmasi dalam konteks daerah. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan politik, reformasi mekanisme seleksi berbasis perspektif gender, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar empiris dan teoretis untuk membangun agenda demokrasi lokal yang lebih inklusif, adil gender, dan kontekstual.

Tentang Penulis:

Burlian Senjaya, Penulis menyelesaikan Studi S-2 di Departemen Politik dan Pemerintahan dengan peminatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis juga sedang menempuh pendidikan S-3 di Program Studi Kebijakan dengan peminatan Politik Kebijakan Universitas Andalas Padang. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Lektor. E-mail: burliansenjaya@unh.ac.id

Pahrudin HM, penulis menyelesaikan Studi S-2 di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Penulis juga menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Lektor. E-mail: pahrudinhm@unh.ac.id

Samia Elviria, penulis menyelesaikan studi S-2 Master of Arts in Linguistics di Martin Luther University Halle-Wittenberg, Jerman. Saat ini penulis merupakan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli. E-mail: samiaelviria@unh.ac.id

Pendahuluan

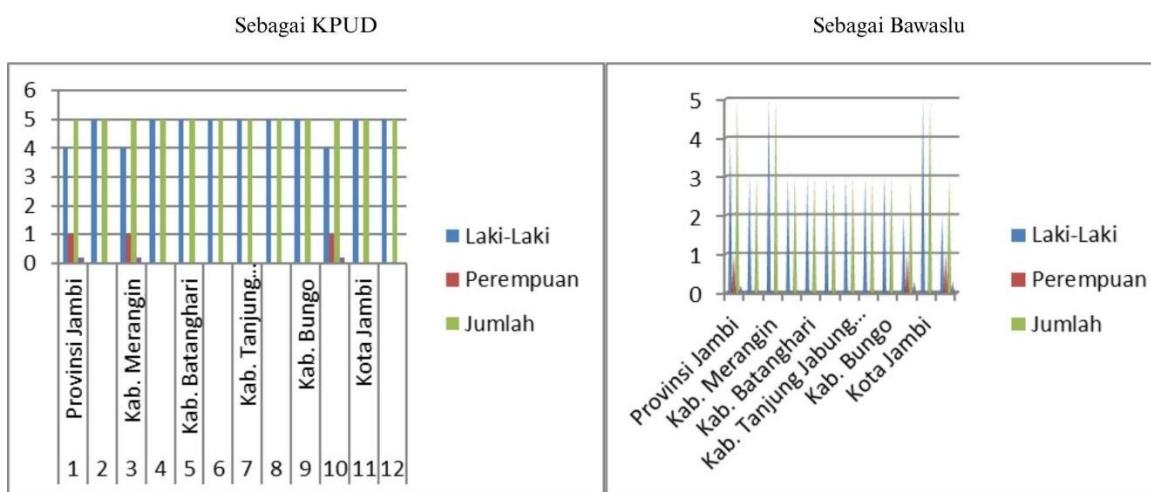
Demokrasi sebagai sistem politik menekankan prinsip kesetaraan hak, partisipasi publik, dan representasi yang inklusif. Dalam kerangka demokrasi substantif, keterlibatan kelompok marginal termasuk perempuan menjadi indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara (Phillips, 1995; Pitkin, 1967). Teori keadilan gender memperkuat argumen bahwa kesetaraan partisipasi dalam politik harus mencerminkan bukan hanya kesamaan formal di atas kertas, tetapi juga akses yang setara terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan (Connell, 2009). Dalam konteks ini, representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bukan hanya memenuhi aspek kuantitatif, namun juga berkontribusi pada penguatan institusi demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelompok perempuan (Lestari & Zein, 2024).

Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam struktur politik dan kepemiluan kerap kali dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural. Budaya patriarki yang mengakar kuat di banyak wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, menjadi salah satu faktor penghambat utama. Perempuan sering kali masih dianggap tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang setara dengan laki-laki, serta dihadapkan pada stereotipe yang melekatkan mereka pada peran domestik (Walby, 1990; Affifah, 2022). Stereotipe semacam ini turut diperparah dengan kurangnya dukungan institusional dan jaringan sosial, serta absennya sistem rekrutmen yang inklusif gender, sehingga mempersempit akses perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga penyelenggara pemilu (Jayani et al., 2024).

Keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki dampak strategis, tidak hanya dalam menciptakan keseimbangan representasi, tetapi juga dalam membawa pendekatan yang lebih inklusif dan empatik dalam pengelolaan proses pemilu yang seringkali sarat konflik. Studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan pendekatan persuasif dalam penyelesaian masalah, yang sangat relevan dalam dinamika kepemiluan (Agustiyati, 2020). Selain itu, keberadaan perempuan dalam posisi strategis akan memperkuat legitimasi kebijakan afirmatif serta memperluas perspektif pengambilan keputusan dalam rangka mendorong pemilu yang lebih demokratis dan inklusif (Sapitri & Alkadafi, 2023).

Kondisi empiris di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu masih jauh dari ideal. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi periode 2018–2023, dari 60 komisioner di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, hanya terdapat 3 perempuan atau sekitar 5%—jauh dari kuota afirmatif 30% yang diamanatkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Situasi serupa terjadi pada lembaga Bawaslu, di mana dari total 42 anggota, hanya 3 orang perempuan yang menjabat. Bahkan sebagian besar kabupaten/kota di Jambi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali, menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif (Data KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi, 2023).

Grafik 1.
**Prosentase Representasi Perempuan di Penyelenggara Pemilu KPU & Bawaslu kabupaten/kota
di Provinsi Jambi Periode 2018 s.d 2023**



Sumber: KPU & Bawaslu Prov. Jambi (Data diolah)

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam ranah politik elektoral masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, struktur kelembagaan, maupun kultur politik lokal. Meskipun berbagai penelitian seperti Agustiyati (2020), Sapitri dan Alkadafi (2023), serta Afifah (2022) telah menyoroti pentingnya afirmasi gender, fokus utama mereka masih berkisar pada aspek legislatif dan partisipasi pemilih. Beberapa kajian yang secara khusus menyentuh aspek penyelenggara pemilu, seperti Husna (2021), Yuliana dan Widiastuti (2019), serta Indrawati (2020), memang memberikan kontribusi penting, namun masih bersifat fragmentaris, baik dari segi pendekatan teoretis maupun cakupan wilayah kajian. Belum banyak studi yang mengkaji secara mendalam struktur penyelenggara pemilu dari perspektif representasi gender dalam konteks lokal yang spesifik, terutama dengan mengintegrasikan teori representasi, teori gender dan politik, serta teori kelembagaan secara simultan.

Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat konteks Provinsi Jambi sebagai lokus utama penelitian. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu melalui pendekatan yang lebih integratif. Fokus utama kajian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kondisi representasi perempuan dalam struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jambi; (2) menganalisis secara kritis berbagai hambatan struktural, kultural, dan geografis yang membatasi keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu; dan (3) merumuskan strategi penguatan kapasitas, afirmasi kebijakan, serta penguatan jaringan perempuan yang relevan dengan dinamika politik lokal. Dengan pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan kontekstual di tingkat daerah.

Landasan Teoritik

Isu kesetaraan gender dalam politik, termasuk dalam lembaga penyelenggara pemilu, berakar pada prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 menegaskan hak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, termasuk hak memilih dan dipilih. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap kesetaraan gender diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam

penyelenggaraan pemilu. Konteks normatif ini penting sebagai landasan hukum dan moral, namun belum secara otomatis menjamin representasi yang setara di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoretis yang dapat menjelaskan mengapa kesenjangan representasi masih terjadi, termasuk dalam konteks Provinsi Jambi.

Untuk memahami rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi, digunakan tiga pendekatan teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori representasi politik, teori gender dan politik, dan teori kelembagaan.

a. Teori Representasi Politik

Konsep representasi politik dari Pitkin (1967) membedakan antara *representasi deskriptif* dan *substansif*. Representasi deskriptif merujuk pada kehadiran perempuan secara numerik di lembaga politik, sedangkan representasi substansif menekankan pada advokasi terhadap kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya proporsi perempuan di KPU dan Bawaslu Jambi mencerminkan kegagalan representasi deskriptif, yang secara tidak langsung juga berdampak pada lemahnya representasi substansif terhadap kepentingan perempuan dalam proses kepemiluan. Analisis akan menelusuri apakah keberadaan (atau ketiadaan) perempuan di lembaga-lembaga ini juga berimplikasi pada kualitas inklusi gender dalam pelaksanaan pemilu.

b. Teori Gender dan Politik

Teori ini memandang bahwa struktur sosial dan politik dibentuk oleh relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, di mana dominasi laki-laki mengarah pada marginalisasi perempuan dalam ruang publik (Connell, 2009). Gender bukan hanya soal identitas biologis, tetapi konstruksi sosial yang membentuk ekspektasi, akses, dan peluang. Di Provinsi Jambi, konstruksi budaya patriarkal masih kuat memengaruhi pembagian peran gender. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana norma-norma sosial membatasi partisipasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dan bagaimana bias gender melekat dalam proses seleksi dan rekrutmen komisioner.

c. Teori Kelembagaan (New Institutionalism)

Pendekatan kelembagaan, khususnya perspektif *new institutionalism* (North, 1990), menekankan bahwa partisipasi politik ditentukan oleh struktur formal (aturan hukum) dan informal (norma sosial, kebiasaan politik). Dalam hal ini, meskipun secara formal terdapat regulasi yang mendorong keterwakilan perempuan, pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kelembagaan lokal dan proses rekrutmen yang masih bersifat maskulin dan patronistik. Di Provinsi Jambi, mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu belum menjamin keberpihakan pada afirmasi gender, yang menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip inklusi.

Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena di Provinsi Jambi secara integratif. Teori representasi membantu menilai capaian kuantitatif dan kualitas representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Teori gender dan politik menjelaskan hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam menembus arena kelembagaan. Sementara teori kelembagaan mengidentifikasi bagaimana sistem rekrutmen dan norma institusional di Jambi belum berpihak pada kesetaraan gender. Dengan demikian, teori-teori ini menjadi alat analisis utama dalam menafsirkan data dan menjawab pertanyaan penelitian terkait minimnya keterwakilan perempuan serta strategi penguatan ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik

utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari komisioner KPU dan Bawaslu, legislator perempuan, pengurus partai perempuan, serta akademisi yang memiliki pemahaman terhadap isu gender dan kepemiluan. Objek penelitian mencakup struktur keanggotaan serta proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu di 11 kabupaten/kota dan tingkat provinsi pada periode 2018–2023. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh pemahaman yang utuh atas hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi minimnya keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu.

Hasil dan Pembahasan

Representasi Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu di Provinsi Jambi

Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan indikator penting kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Di Provinsi Jambi, keterlibatan perempuan dalam struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menunjukkan angka yang jauh dari harapan. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan afirmatif terkait keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, pelaksanaannya di tingkat daerah belum berjalan efektif. Penelitian ini menemukan bahwa di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, perempuan belum mencapai porsi minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi yang mengatur afirmasi bagi penyelenggara pemilu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan diperkuat dalam UU No. 15 Tahun 2011, yang mendorong keterlibatan perempuan dalam proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara pemilu. Namun dalam praktiknya, afirmasi ini belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU Provinsi Jambi dan Bawaslu, pada periode 2018–2023 terdapat ketimpangan mencolok dalam keterwakilan gender, bahkan sebagian besar wilayah tidak memiliki keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi.

Tabel 1.

Data Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Periode 2018 s.d 2023

KPU Provinsi/ Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	% Perempuan
Provinsi Jambi	4	1	5	20,00%
Kab. Kerinci	5	0	5	0,00%
Kab. Merangin	4	1	5	20,00%
Kab. Sarolangun	5	0	5	0,00%
Kab. Batanghari	5	0	5	0,00%
Kab. Muaro Jambi	5	0	5	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Barat	5	0	5	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Timur	5	0	5	0,00%
Kab. Bungo	5	0	5	0,00%
Kab. Tebo	4	1	5	20,00%
Kota Jambi	5	0	5	0,00%
Kota Sungai Penuh	5	0	5	0,00%
	57	3	60	5,00%

Sumber : KPU Provinsi Jambi

Data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, khususnya sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi, masih jauh dari target afirmasi gender sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan. Berdasarkan data anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2018–2023, dari total 60 komisioner yang tersebar di 11 kabupaten/kota serta tingkat provinsi, hanya terdapat 3 orang perempuan (5%), sementara 57 orang lainnya adalah laki-laki (95%).

Secara lebih rinci, hanya tiga wilayah yang memiliki anggota perempuan, yakni Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tebo, masing-masing dengan 1 orang perempuan dari 5 anggota (20%). Sementara itu, 9 kabupaten/kota lainnya tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali (0%), yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi gender belum diimplementasikan secara efektif dalam proses rekrutmen anggota KPU di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Secara normatif, keterwakilan perempuan sebesar 30% bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan memastikan bahwa kepentingan serta perspektif perempuan dapat terakomodasi dalam pengambilan keputusan terkait pemilu. Namun, realitas yang tergambar dalam data menunjukkan bahwa capaian di Provinsi Jambi masih sangat jauh dari angka ideal tersebut. Maka diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan, revisi kebijakan seleksi yang lebih sensitif gender, serta komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan partisipasi perempuan yang lebih substansial dalam penyelenggaraan pemilu.

Tabel 2.
Data Anggota Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Periode 2018 s.d 2023

KPU Provinsi/ Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	% Perempuan
Provinsi Jambi	4	1	5	20,00%
Kab. Kerinci	3	0	3	0,00%
Kab. Merangin	5	0	5	0,00%
Kab. Sarolangun	3	0	3	0,00%
Kab. Batanghari	3	0	3	0,00%
Kab. Muaro Jambi	3	0	3	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Barat	3	0	3	0,00%
Kab. Tanjung Jabung Timur	3	0	3	0,00%
Kab. Bungo	3	0	3	0,00%
Kab. Tebo	2	1	3	30,00%
Kota Jambi	5	0	5	0,00%
Kota Sungai Penuh	2	1	3	30,00%
	39	3	42	5,00%

Sumber : Bawaslu Provinsi Jambi

Berdasarkan data anggota Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2018–2023, jumlah total anggota Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencapai 42 orang, yang terdiri dari 39 laki-laki (95%) dan hanya 3 perempuan (5%). Angka ini menunjukkan

bawa keterwakilan perempuan masih jauh dari target minimal 30%, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan afirmasi gender di bidang politik dan kepemiluan.

Secara lebih spesifik, dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya 2 wilayah yang telah mencapai atau melampaui batas afirmasi 30% keterwakilan perempuan, yaitu: Kabupaten Tebo (1 perempuan dari 3 anggota, atau 30%) Kota Sungai Penuh (1 perempuan dari 3 anggota, atau 30%) Sementara itu, 12 kabupaten/kota lainnya memiliki keterwakilan perempuan 0%, termasuk Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi. Bahkan, di tingkat Bawaslu Provinsi Jambi sendiri, keterwakilan perempuan hanya mencapai 20% (1 perempuan dari 5 anggota).

Rendahnya representasi perempuan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya lokal yang masih patriarkal. Pandangan tradisional tentang peran perempuan, khususnya di wilayah-wilayah rural dan perairan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur, masih menghambat perempuan untuk aktif di ruang publik. Selain itu, struktur politik lokal yang masih didominasi oleh relasi personal dan jaringan informal yang maskulin, turut mempersempit akses perempuan ke dalam lingkaran kekuasaan dan kelembagaan pemilu ([Waylen, 2013](#)).

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pendekatan afirmatif bersifat normatif saja tidak cukup tanpa adanya intervensi kelembagaan yang lebih konkret dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori kelembagaan, dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat aturan formal mengenai keterwakilan perempuan, nilai-nilai informal dan praktik institusional di daerah dapat melemahkan pelaksanaannya ([North, 1990](#)). Oleh karena itu, reformasi prosedur seleksi serta penguatan kapasitas dan jaringan perempuan di tingkat lokal menjadi hal yang mendesak. Lebih jauh, pendekatan teori gender dan politik menggarisbawahi pentingnya memperhatikan bagaimana relasi kuasa gender dalam masyarakat membentuk struktur politik formal yang membatasi partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih, kandidat, maupun penyelenggara.

Dalam konteks Provinsi Jambi, upaya mendorong representasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan dinamika lokal secara holistik—mulai dari resistensi budaya, lemahnya kelembagaan lokal dalam menindaklanjuti afirmasi, hingga terbatasnya ruang pembinaan politik bagi perempuan. Dengan demikian, representasi tidak dapat sekadar dimaknai sebagai pemenuhan kuota, melainkan sebagai proses rekonstruksi kelembagaan demokrasi yang membuka ruang setara bagi perempuan dalam menentukan arah dan legitimasi politik lokal.

Hambatan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

1. Budaya Patriarkal sebagai Hambatan Struktural

Salah satu hambatan utama bagi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi adalah masih kuatnya budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat. Budaya ini memposisikan laki-laki sebagai aktor utama dalam ruang publik dan perempuan sebagai pihak yang identik dengan ranah domestik. Dalam kerangka teori gender, dominasi maskulinitas dalam konstruksi sosial menghambat akses perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan politik ([Connell, 2009](#)). Persepsi ini menciptakan resistensi sosial terhadap keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu, karena perempuan dianggap kurang rasional, tidak tegas, atau tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang cukup ([Putri & Kencana, 2022](#)).

Budaya patriarkal bukan hanya membatasi partisipasi perempuan secara kultural, tetapi juga menjadi dasar pembentukan norma-norma kelembagaan yang bias gender. Dalam kerangka teori kelembagaan, nilai-nilai informal seperti stereotipe gender berpengaruh terhadap praktik rekrutmen formal yang berlangsung dalam struktur KPU dan Bawaslu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif tidak cukup kuat untuk menembus bias budaya yang telah terlembaga dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.

2. Minimnya Kapasitas dan Jejaring Sosial

Hambatan kedua adalah rendahnya kapasitas teknis dan terbatasnya jejaring sosial yang dimiliki oleh perempuan di bidang kepemiluan. Berdasarkan hasil wawancara, banyak perempuan yang belum mengakses pelatihan kepemiluan, belum memahami mekanisme rekrutmen anggota KPU atau Bawaslu, dan belum memiliki jejaring advokasi yang kuat untuk mendorong keterlibatan mereka. Dalam perspektif teori politik, lemahnya kapasitas ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam distribusi pengetahuan politik dan akses terhadap sumber daya politik (Jayani et al., 2024; Afifah, 2022).

Keterbatasan ini diperparah oleh kurangnya dukungan institusional, seperti ketiadaan program afirmatif berkelanjutan dari partai politik atau lembaga negara untuk membina kader perempuan di bidang penyelenggaraan pemilu. Ketika perempuan tidak memiliki pengetahuan dan jaringan yang memadai, maka secara sistemik mereka akan tersingkir dari kompetisi seleksi komisioner. Teori kelembagaan menjelaskan bahwa institusi tidak netral—akses terhadap posisi formal sangat ditentukan oleh jaringan sosial, relasi patronase, dan sumber daya informal yang secara historis lebih dikuasai laki-laki (North, 1990; Waylen, 2013).

3. Faktor Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Provinsi Jambi memiliki karakteristik geografis yang unik, termasuk daerah-daerah perairan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat yang secara fisik sulit dijangkau. Hambatan geografis ini berimplikasi pada aksesibilitas perempuan untuk terlibat aktif dalam proses seleksi, pelatihan, maupun pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kasus, perjalanan jauh dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala tersendiri bagi perempuan yang juga memiliki beban domestik yang tinggi.

Ketimpangan geografis ini berinteraksi dengan hambatan lain. Misalnya, budaya patriarki memperkuat pembatasan mobilitas perempuan, sehingga membuat mereka semakin sulit menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi basis aktivitas kepemiluan. Dalam konteks ini, hambatan geografis tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh norma budaya yang membatasi perempuan dari pengalaman publik yang lebih luas.

Hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan. Budaya patriarkal menciptakan batasan peran sosial perempuan dan pada saat yang sama mengurangi peluang mereka dalam membangun jejaring sosial dan akses terhadap sumber daya politik. Dalam praktik kelembagaan, hal ini menghasilkan struktur rekrutmen yang bias, tidak inklusif, dan tidak adaptif terhadap kebijakan afirmatif. Desain kelembagaan yang seharusnya menjadi sarana afirmasi justru melanggengkan eksklusi, karena prosedur seleksi masih bersandar pada logika kompetisi terbuka yang secara historis menguntungkan laki-laki.

Dalam teori gender, ini disebut sebagai *institutionalized gender bias*, yakni ketika sistem kelembagaan tampak netral secara hukum, tetapi dalam praktiknya membiarkan relasi kuasa patriarkal terus berlangsung (Waylen, 2013). Oleh karena itu, upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan intervensi terstruktur yang mencakup transformasi budaya, penguatan kapasitas, serta perombakan mekanisme kelembagaan yang lebih berpihak pada kesetaraan.

Penguatan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Penguatan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan bagian integral dari pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Meskipun kerangka regulasi nasional telah mengatur kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, implementasinya di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan. Data sebelumnya menunjukkan

bahwa sebagian besar KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota belum mencapai angka tersebut, bahkan di beberapa wilayah tidak terdapat keterwakilan perempuan sama sekali. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktur kelembagaan dalam menciptakan ruang yang setara bagi perempuan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penguatan representasi perempuan di Jambi memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Berdasarkan temuan lapangan dan dukungan dari teori gender dan kelembagaan, strategi penguatan dapat difokuskan pada tiga pilar utama: peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang kepemiluan, reformasi sistem rekrutmen yang inklusif gender, dan penguatan jejaring sosial perempuan sebagai agen advokasi.

Pertama, peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang kepemiluan menjadi kunci awal untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan teknis dan pengalaman menjadi salah satu faktor penghambat. Dalam konteks ini, pendekatan *capacity building* melalui pelatihan dan pendidikan politik yang terstruktur perlu dihadirkan secara sistematis oleh KPU dan Bawaslu, bekerja sama dengan organisasi perempuan lokal. Hal ini sejalan dengan argumen Hardjaloka (2016), bahwa pengetahuan perempuan terhadap hukum dan regulasi pemilu akan membuka akses yang lebih besar terhadap proses seleksi dan perlibatan dalam kelembagaan pemilu.

Kedua, reformasi dalam proses rekrutmen anggota penyelenggara pemilu mutlak diperlukan. Saat ini, prosedur seleksi komisioner di Provinsi Jambi cenderung bersifat teknokratis dan kurang sensitif gender. Pendekatan kelembagaan menjelaskan bahwa sistem rekrutmen yang hanya mempertimbangkan kualifikasi administratif tanpa memperhatikan dimensi afirmatif akan terus melanggengkan dominasi laki-laki. Oleh karena itu, mekanisme rekrutmen perlu direvisi agar mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok perempuan, misalnya melalui komposisi tim seleksi yang inklusif, serta indikator seleksi yang mengapresiasi kontribusi sosial-politik perempuan.

Ketiga, penguatan jaringan sosial dan solidaritas antar kelompok perempuan di Jambi menjadi strategi jangka panjang yang tidak dapat diabaikan. Minimnya keterwakilan perempuan juga dipengaruhi oleh lemahnya dukungan kolektif dari komunitas perempuan sendiri. Menurut teori kelembagaan, jaringan sosial memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya politik dan akses terhadap posisi strategis (Waylen, 2013). Dalam konteks Provinsi Jambi, organisasi-organisasi perempuan, akademisi, dan tokoh masyarakat perlu membangun konsolidasi yang lebih kuat untuk mendorong kader perempuan berani tampil sebagai penyelenggara pemilu.

Solusi-solusi tersebut tidak dapat dipandang sebagai langkah terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan strategi yang saling memperkuat. Kapasitas yang memadai tanpa didukung reformasi kelembagaan akan tetap menemui jalan buntu, begitu pula sebaliknya. Bahkan, budaya patriarkal yang telah disebutkan sebelumnya akan terus memperlemah jejaring dan kapasitas perempuan jika tidak dilawan secara simultan melalui desain kelembagaan yang berpihak pada kesetaraan. Dengan demikian, penguatan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi bukan hanya soal memenuhi angka kuota, tetapi juga soal membangun struktur politik yang adil, inklusif, dan demokratis secara substansial.

Analisis Temuan dalam Perspektif Teori

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa representasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi masih sangat rendah, baik di KPU maupun Bawaslu, yang dalam banyak wilayah bahkan tidak mencapai satu orang perempuan pun dalam komisioner. Jika dianalisis melalui pendekatan teoritik, temuan ini merefleksikan kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip representasi deskriptif dan substantif sebagaimana diuraikan oleh Pitkin (1967) dalam Teori Representasi Politik. Ketidakhadiran perempuan secara

numerik (representasi deskriptif) berimplikasi pada tidak terwakilinya kepentingan dan perspektif perempuan dalam proses dan kebijakan kepemiluan (representasi substantif). Hal ini mengindikasikan bahwa afirmasi yang hanya bersifat formal tidak cukup untuk menjamin partisipasi yang bermakna.

Selanjutnya, dalam kerangka Teori Gender dan Politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma dan budaya patriarkal di Provinsi Jambi masih menjadi hambatan struktural utama. Konsepsi peran perempuan yang terbatas pada ranah domestik, serta stereotipe yang meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan, menciptakan penghalang yang kuat terhadap keterlibatan perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu. Temuan ini sejalan dengan pandangan Connell (2009) bahwa relasi kuasa gender terlembaga dalam norma sosial dan institusi politik, yang menciptakan ketimpangan akses dan kontrol terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Rendahnya literasi kepemiluan, keterbatasan pengalaman, dan lemahnya dukungan sosial-politik memperparah marginalisasi perempuan dalam arena kelembagaan pemilu.

Dari perspektif Teori Kelembagaan, khususnya pendekatan *new institutionalism* sebagaimana dikemukakan oleh North (1990), ditemukan bahwa regulasi afirmatif yang mendorong keterwakilan perempuan belum mampu mengatasi hambatan informal yang melekat dalam struktur kelembagaan lokal. Meskipun secara normatif terdapat aturan kuota 30% dalam keanggotaan penyelenggara pemilu, namun praktik seleksi masih didominasi oleh relasi patronase, bias gender, dan jaringan politik yang maskulin. Dalam konteks ini, institusi tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga praktik sosial yang secara tidak langsung menghambat perempuan untuk masuk dan bertahan dalam ruang-ruang formal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan pemilu di tingkat lokal belum cukup adaptif terhadap prinsip inklusivitas gender.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara teoretis mengafirmasi bahwa problem representasi perempuan dalam penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, melainkan juga konsekuensi dari struktur sosial-politik dan kelembagaan yang belum berpihak secara substantif pada kesetaraan gender. Ketiga teori tersebut memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas rendahnya keterwakilan perempuan, dan sekaligus menjadi dasar konseptual bagi strategi perbaikan ke depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi bukan hanya akibat lemahnya implementasi kebijakan afirmatif, tetapi juga disebabkan oleh interaksi kompleks antara budaya patriarkal, hambatan geografis, dan terbatasnya jejaring sosial serta kapasitas teknis perempuan. Temuan kunci yang membedakan studi ini adalah pengungkapan adanya kendala kelembagaan berbasis budaya lokal, yaitu kondisi ketika nilai-nilai patriarkal meresap ke dalam praktik kelembagaan formal, sehingga menyebabkan pembatasan peran perempuan secara tidak langsung namun berkelanjutan, meskipun aturan afirmatif secara hukum telah tersedia.

Merespons persoalan tersebut, penguatan representasi perempuan memerlukan pendekatan yang kontekstual dan terintegrasi. Pertama, peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang kepemiluan melalui pelatihan teknis dan pendidikan politik yang berbasis komunitas lokal menjadi kebutuhan mendesak. Kedua, reformasi mekanisme seleksi komisioner perlu dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan perspektif gender ke dalam indikator penilaian serta komposisi tim seleksi. Ketiga, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah harus dimanifestasikan melalui integrasi isu kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran publik.

Di sisi lain, konsolidasi jejaring antar organisasi perempuan, lembaga advokasi, dan institusi pendidikan tinggi perlu diperkuat untuk mengawal keberlanjutan afirmasi gender

dalam kelembagaan pemilu. Representasi perempuan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka, tetapi harus diarahkan pada transformasi struktur politik lokal yang lebih adil dan demokratis secara substantif. Temuan dalam penelitian ini juga membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas kebijakan afirmatif di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afifah, N. F. (2022). Perempuan pengawal demokrasi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.209>
- Agustyati, K. N. (2020). Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu: Representasi Deskriptif vs Representasi Substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 75–88. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.163>
- Bapeda Provinsi Jambi. (2019). Laporan Potre Keterwakilan Politik Perempuan di Provinsi Jambi. Diterbitkan Oleh Bapeda Provsini Jambi.
- Connell, R. W. (2009). Gender in World Perspective (2nd ed.). Cambridge: Polity Press. <https://doi.org/10.1002/9780470692531>
- Hardjaloka, L. (2016). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia: Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403–430. <https://doi.org/10.31078/jk928>
- Husna, N. (2021). Perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu: Studi atas keterwakilan dalam proses seleksi KPU di Aceh. *Jurnal Studi Gender dan Politik*, 9(2), 133–149.
- Indrawati, S. (2020). Keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu: Evaluasi implementasi kebijakan afirmasi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 5(2), 112–126.
- Jayani, P. H., Shafira, F. M., Anindya, S., & Ummah, A. (2024). Representasi Gender di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(8), 37–45. <https://doi.org/10.32697/jish.v2i8.1879>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Representasi Perempuan pada Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11962/representasi-perempuan-pada-pemilu-2024>.
- Komnas Perempuan. (2024). *Siaran Pers tentang Nota Kesepahaman antara Komnas Perempuan dan Bawaslu RI*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-nota-kesepahaman-antara-komnas-perempuan-dan-bawaslu-ri>
- Lestari, S. I. (2024). Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilukada di Provinsi Lampung. *JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 153–167. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22439>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511808678>
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA26442201>

Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation. In *University of California Press eBooks*.
<https://doi.org/10.1525/9780520340503>

Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran Politik Perempuan pada Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 40–46.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.2009>

Sapitri, I., & Alkadafi, M. (2023). Eksistensi keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2023–2028. *ASAS Law Journal*, 1(1), 59–72. Retrieved from <https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/44>

Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. *Contemporary Sociology a Journal of Reviews*, 20(3), 351. <https://doi.org/10.2307/2073659>

Waylen, G. (2013). Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality. *Political Research Quarterly*, 67(1), 212–223. <https://doi.org/10.1177/1065912913510360>

Yuliana, L., & Widiastuti, R. (2019). Partisipasi perempuan dalam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Politika*, 10(1), 25–36

Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998

Yusa Djuyandi^{1*}, Arfin Sudirman², Nanang Suryana¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 40135, Jawa Barat- Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, 40135, Jawa Barat - Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Apr 15, 2025

Accepted: May 12, 2025

Published: Jun 06, 2025

Kata Kunci:

Civilian Control ; Civil-Military Relations; Democracy; TNI Reform.

Penulis Koresponden:

Yusa Djuyandi

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran.

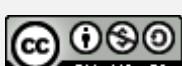
Email:

yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Situs Cantuman:

Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 46-56.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta (c) 2025 dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Journal of
Political Issues

Abstrak

Abstract In civil-military relations in a democratic country, there must be a balance of power between military instruments and non-military instruments. Indonesia itself certainly has a long history of military reform and is full of heavy obstacles, the source of which usually comes from the government or regime in power in a country. After the fall of the tyrannical regime in 1998, it was certainly the first step in the revival of military reform and towards the formation of better democratization in Indonesia. Over time, Indonesia has increasingly shown positive indications on its journey towards democracy. TNI reform and civilian control in Indonesia can actually be said to have not been fully realized and are still in the process of transition towards the expected civil society. Thus, Indonesia must remain careful and self-aware in dealing with the dynamics that may occur in the future, because the potential for conflict that harms civil-military relations may still exist and will occur. The preparation of this research article is based on the use of qualitative methods based on the collection of literature study data by producing descriptive analysis. The research results found are how the current military reform in Indonesia is, then what political policies and related institutions are in post-reform military control, and an explanation of the researcher's assessment of civil-military relations in Indonesia.

Abstrak Dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Indonesia sendiri tentunya memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri biasanya berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa pada suatu negara. Setelah turunnya rezim tirani pada tahun 1998 tentunya menjadi langkah awal dari kebangkitan reformasi militer serta menuju arah pembentukan demokratisasi yang lebih baik di Indonesia. Seiring berjalanannya waktu Indonesia semakin menunjukkan indikasi positif dalam perjalannya menuju ke arah demokrasi. reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. Sehingga, Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu mungkin saja tetap ada dan akan terjadi. Penyusunan artikel penelitian ini dibuat berdasarkan penggunaan metode kualitatif berdasarkan pengumpulan data studi pustaka dengan menghasilkan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bagaimana reformasi militer saat ini di Indonesia, kemudian kebijakan politik dan lembaga terkait apa saja dalam kontrol militer pasca reformasi, dan penjelasan penilaian peneliti dalam hubungan sipil-militer di Indonesia.

Tentang Penulis:

Yusa Djuyandi, penulis menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Arfin Sudirman, penulis menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Email: arfin.sudirman@unpad.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang menggunakan konsep sistem pemerintahan demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Perlu dipahami bahwa dalam area studi berproses demokrasi itu berada pada bagaimana hubungan sipil-militer dapat memiliki hubungan yang baik pada suatu negara. Dimana di dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Adanya faktor keseimbangan ini ditujukan agar tidak ada kekuatan yang dominan ketika berlangsungnya proses pengambilan keputusan, baik itu secara nasional ataupun strategik. Hubungan sipil-militer yang baik seharusnya dapat diarahkan kepada bagaimana hubungan sipil dan militer mampu menghasilkan suatu keputusan mengenai keamanan nasional yang paling baik tanpa adanya perseteruan di dalamnya.

Penulis mengambil teori agensi ([Huntington, 1957](#)) yang menjelaskan bahwa kontrol sipil terbelenggu dalam 2 tipe, yakni kontrol sipil subyektif serta kontrol sipil obyektif. Kontrol sipil subyektif berfokus kepada bagaimana memaksimalkan kekuatan kontrol sipil, sedangkan kontrol sipil obyektif berfokus kepada bagaimana memaksimalkan profesionalisme perwira. Dalam kontrol sipil obyektif, sipil berusaha meyakinkan elit militer agar mereka mampu menurunkan pengaruhnya dalam pengambilan suatu keputusan dalam menentukan kebijakan nasional, dimana militer di kontrol oleh pemerintahan sipil dengan tidak melibatkan militer dalam tugas-tugas sipil maupun pada struktur politik sipil.

Namun, fakta menunjukkan bahwa pada masa orde baru terdapat kesulitan untuk menghadirkan profesionalisme prajurit, sehingga poin yang mengemuka pada teori agensi ini adalah kontrol sipil subjektif. Dalam hubungan sipil-militer, kontrol sipil subjektif mengacu pada sistem di mana militer terintegrasi dengan kuat dan bergantung pada struktur politik sipil. Model ini diterapkan pada pemerintahan orde baru dengan melibatkan pengarahan militer untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasanya ditangani oleh lembaga sipil, sehingga mengaburkan perbedaan antara tanggung jawab militer dan sipil.

Hubungan sipil-militer yang baik dalam mewujudkan negara demokrasi yang damai itu dapat dilihat dari seberapa jelas hubungan kekuasaan yang dimiliki antara sipil dan militer. Sipil seharusnya memiliki kuasa dalam bidang-bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan, sedangkan militer seharusnya memiliki kuasa atas perannya dalam menjaga bidang pertahanan dan kemanan negaranya sehingga apa yang dinamakan profesionalisme perwira dapat terwujud.

Kilas balik pada masa orde baru dan merupakan tahun dimana menjadi sebuah penanda betapa besar dan kuatnya pengaruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di segala bidang. Bidang pertahanan dan pemerintahan/birokrat tidak luput dari dominasi ABRI, hal tersebut pun tidak terlepas dari usaha untuk melanggengkan kekuasaan politik Presiden Soeharto. Angkatan Darat salah satunya yang mendapatkan banyak peran dan posisi di dalam bidang politik, dengan harapan dapat mewujudkan kestabilan pada dinamika pemerintahan di masa orde baru. Peristiwa ini dijuluki dwifungsi ABRI, di mana militer tidak hanya bergerak dalam ranah pertahanan/keamanan negara, namun juga bergerak dalam urusan-urusan politik yang membuat banyak sekali kesan tidak netralnya ABRI dan kecenderungan membuat pemerintahan tirani/absolut. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998 sebelum terjadinya sebuah reformasi yang dilakukan rakyat Indonesia, fungsi ABRI yang berkecimpuk dalam ranah sosial politik ini memberikan penekanan bahwa dominasi militer itu nyata.

Konsep dwifungsi ABRI diinisiasi oleh pemikiran A. H. Nasution tentang konsep “jalan tengah”, pada awalnya konsep ini menegaskan bahwa ABRI hanya sebatas stabilitator, namun pada realitanya ABRI menjadi sebuah kekuatan yang berperan dalam dinamisator dan kontrol

dalam berjalannya pemerintahan. Akan tetapi implementasi dari konsep dwi fungsi ABRI memang dominan dengan eksistensi dari TNI AD, karena A.H. Nasution sebagai pengagas dari konsep "jalan tengah" merupakan pimpinan dari TNI AD. Dominasi dwifungsi oleh personil atau anggota TNI AD juga didasarkan pada situasi dimana Presiden Soeharto juga berasal dari Angkatan Darat, dan pada saat itu personal TNI AD memiliki kuantitas yang paling banyak serta mempunyai komando teritorial di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Konsep dwifungsi ABRI yang saat itu digagas oleh A.H. Nasution telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap fungsi dan peran dari TNI AD, dimana kemudian di tahun 1966 muncul doktrin baru TNI AD, dalam doktrin baru tersebut dijelaskan bahwa tujuan Angkatan Darat adalah untuk "berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik dan ekonomi dan bidang sosial budaya", mewakili fungsi Angkatan Darat di luar jalur militer (Crouch, 1977). Akibat doktrin baru ini maka lembaga eksekutif dan legislatif tidak terhindarkan dari dominasi ABRI, dan Angkatan Darat menjadi aktor militer yang dominan pada lembaga tersebut.

Dengan adanya dominasi tersebut, ini membuat *check and balance* terhadap pemerintah tidak berjalan dan tercapai. Seakan-akan dengan mudahnya pemerintah berkompromi dan memuluskan setiap kebijakan atau kenginan politiknya untuk dapat bisa dijalankan, hal inilah yang menodai dan dapat dikatakan negara malah semakin jauh dari kata demokrasi. Peran sipil yang dibatasi dan bahkan tidak diberikan banyak ruang dalam berpartisipasi pada ranah pengambilan keputusan dan berpolitik.

Hal ini menarik untuk diteliti dan dibahas, karena ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan terbentuknya sebuah hubungan sipil dan militer di Indonesia. Sesuatu yang menjadi ciri dari negara demokrasi adalah adanya kontrol sipil terhadap militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan kata lain pengembalian kembali fungsi militer pada posisi semula, yaitu sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara (profesionalisme militer).

Saat rezim Orde Baru masih berdiri kokoh, Crouch (1977) menuliskan temuannya pada tahun 1968 terdapat 71% (17 orang) kepala daerah setingkat Gubernur merupakan anggota militer. Runtuhnya kekuasaan orde baru membuka ruang luas dalam diskusi hubungan sipil militer di Indonesia dalam proses demokrasi. Feaver (2003) dalam teori *principal agents* berpendapat bahwa pengendalian sipil atas militer terjadi karena asimetris institusional. Kebijakan politik sangat berperan besar dalam profesionalisme militer dalam membentuk hubungan sipil-militer di seluruh negara. Kardi (2015) mengatakan bahwa disamping kewenangan kebijakan politik, sebagian besar kebijakan di bidang pertahanan masih dipegang oleh Panglima TNI. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Panglima TNI masih ambigu.

Dalam penempatan institusi sipil di atas militer menurut Pion-Berlin (2001) sebagai bentuk demokratisasi sipil militer haruslah mengacu kepada empat prinsip, yaitu sipil hadir sebagai indikator penting dalam pertahanan negara; Kemenhan hadir sebagai representasi otoritas sipil; menurunkan otoritas militer secara vertical; dan pembagian kekuasaan militer. Di Indonesia sendiri pasca jatuhnya orde lama adalah bentuk kefatalan penempatan militer langsung di bawah presiden, maka dari itu Pion Berlin berpendapat bahwa tidak boleh ada akses istimewa antara militer dan pemimpin negara.

Fakta menarik datang dari berbagai penelitian. Kardi (2015) memaparkan temuannya bahwa supremasi sipil di Indonesia masih mengandalkan 'subordinasi sukarela' dari militer, penelitiannya membantah studi dengan sudut pandang politik yang kebanyakan menerima gagasan bahwa supremasi militer atas sipil dalam politik diperlukan untuk membangun negara kuat sesuai dengan konstitusi. Kardi juga menjelaskan lebih jauh mengapa sampai sekarang relasi sipil militer yang demokratis di Indonesia belum terwujud dengan dua alasan, yaitu sipil belum bisa mewujudkan profesionalisme militer dan pemimpin dari kalangan sipil masih lemah. Kardi juga menyebutkan bahwa hubungan sipil-militer di Asia Tenggara belum semaju di negara barat pada umumnya. Hal ini bisa ditarik dengan dua negara besar di Asia Tenggara yang sedang bergelut dengan otoritarian militer; Myanmar dan Thailand.

Menurut Kipgen (2016) dan Seo (2023), Myanmar dan Thailand merupakan dua negara di Asia Tenggara yang masih lemah dalam demokrasi dikarenakan pengaruh militer dalam politik masih sangat kuat. Pada kasus Myanmar, sejak merdeka dari Inggris tahun 1948, Myanmar telah mengalami dua kudeta militer di tahun 1962 dan 1988. Kudeta militer atas pemerintahan sipil yang dipilih melalui pemilu yang sah juga terjadi kembali di tahun 2021 dan hingga saat ini Junta militer masih menjalankan pemerintahan dan kebijakan politik di Myanmar meskipun mendapatkan perlawanan dari kelompok etnik bersenjata. Pada kasus Thailand, setidaknya negara ini pernah mengalami 12 kali kudeta militer sejak tahun 1932 hingga 2014. Namun pada kasus Thailand, faktor monarki juga memainkan peran yang cukup signifikan meskipun tidak sebrutal Myanmar (Kipgen, 2016; Seo, 2023).

Selanjutnya penelitian dari Latuconsina (2008) menggambarkan bahwa adanya ciri khas hubungan sipil militer di negara-negara bekas jajahan Inggris. India, Afrika Selatan, dan New Zealand contohnya menerapkan mekanisme demokratis melalui pemilu daripada kudeta militer. Hubungan profesional ini adalah dampak dari pembagian tugas dan wewenang institusi yang sesuai dengan porsi masing-masing. Di Indonesia sendiri yang tercatat beberapa kali telah melakukan pembaruan relasi sipil-militer sudah berganti dari semangat melawan penjajah hingga cerminan orde baru yang membebaskan gerak militer melalui Dwifungsi ABRI.

Indonesia pasca orde baru secara langsung melakukan reformasi militer dan melakukan profesionalisme militer dalam berbagai cara, salah satunya tidak ada lagi posisi militer dalam politik. Di Indonesia saat ini Panglima TNI memiliki kedudukan sejajar dengan Menteri Pertahanan dan sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden, meski untuk kebijakan strategi pertahanan maupun dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Dalam pengawasan oleh Komisi I DPR RI memiliki wewenang luas sebagai perwujudan kontrol sipil terhadap militer, namun beberapa permasalahan timbul seperti anggota DPR tersebut belum menguasai secara mendalam mengenai pengadaan alat-alat dan kemampuan pertahanan (Gunawan, 2017). Disamping itu dalam fenomena terbaru mengenai Undang-Undang TNI yang baru disahkan pada 20 Maret 2025, pengesahan revisi UU TNI ini muncul ditengah penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil atas kekhawatiran munculnya kembali dwifungsi.

Hal yang mendasari ketertarikan untuk mengkaji hubungan sipil – militer di Indonesia pasca reformasi 1998 adalah belum banyaknya kajian para peneliti tentang hal ini. Kajian terakhir dilakukan oleh Arif Yulianto pada tahun 2002 tentang hubungan sipil-militer pasca orde baru. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme militer meningkat selama era pasca Orde Baru. Militer fokus pada fungsi pertahanan. Mengantikan kekuasaan militer, masyarakat sipil menjadi pilar penting. Kebijakan sipil DPR juga memperhatikan kepentingan militer, terutama untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Oleh karena itu, seiring dengan reformasi militer internal, peran politik militer di Indonesia setelah Orde Baru semakin berkurang. Kondisi ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat demokrasinya (Yulianto, 2002).

Berangkat dari teori dan penelitian di atas kelompok kami tertarik untuk meneliti sudah sejauh mana reformasi militer, kontrol sipil terhadap militer pasca reformasi, dan menilai efektif atau tidaknya kebijakan politik pasca reformasi dalam mewujudkan profesionalisme militer. Penting bagi kita untuk mengetahui peran sipil atau kontrol sipil terhadap militer dalam mewujudkan negara modern demokratis. Dengan penelitian ini kami dapat memberi penilaian apakah Indonesia sudah memiliki sifat demokrasi yang terkonsolidasi kuat sehingga militer secara keseluruhan berada di bawah kontrol sipil.

Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan penemuan secara deskriptif, maksudnya adalah data yang dikumpulkan oleh penulis berupa

bentuk kata-kata, gambar dan sebagainya bukan berupa angka-angka ([Danim, 2002](#)). Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’ menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berdasarkan penemuan yang sedang di amati ([Moleong, 2000](#)). Kemudian penelitian deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian yang dihadirkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada dalam proses penelitian, baik dalam bentuk fenomena alamiah ataupun rekayasa manusia ([Moleong, 2000](#)). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang menekankan pada pengumpulan data dari sejumlah buku, jurnal, dan media yang sekiranya berkaitan dengan penelitian yang dikaji, yaitu tentang hubungan sipil – militer di Indonesia pasca reformasi 1998. Disini penulis akan menelaah serta membandingkan sumber kepustakaan yang telah ditemukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

Berbagai data sekunder yang berkaitan dengan hubungan sipil – militer di Indonesia pasca reformasi 1998, baik dari buku, jurnal dan media kemudian diseleksi dengan memilih data-data yang relevan dan memiliki makna yang dapat mendukung tujuan penelitian. Selain itu data-data yang terkumpul juga dilakukan proses validasi dengan melakukan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan berbagai informasi yang terkait dengan dinamika hubungan sipil – militer pasca reformasi 1998 untuk ditentukan valid atau tidaknya informasi tersebut. Proses ini dilakukan agar informasi yang disajikan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi Militer Saat Ini

Tidak dapat dipungkiri sejarah reformasi pada sektor militer itu tidak mudah tercapai, terdapat hambatan atau rintangan yang dihadapi dalam perjalannya menuju sebuah reformasi. Di Indonesia itu sendiri memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa. Perjuangan reformasi militer di Indonesia selalu menemui jalan buntu, dari mulai berjalannya orde baru pada tahun 1966-1998, sekitar 32 tahun kurang lebih Indonesia harus mengalami rezim otoritarian dan tirani. Pada orba saat itu memang sangat kental dengan pengaruh dari militer yang disebut sebagai dwifungsi ABRI. Namun turunnya rezim tirani pada tahun 1998, itu menjadi sebuah awal dan kebangkitan reformasi militer serta menuju arah demokratisasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukkan indikasi positif dalam perjalannya menuju ke arah demokrasi. Terdapatnya kontrol sipil atas militer ini menjadi sebuah penanda dari reformasi militer itu sendiri. Dengan mengembalikan militer kepada posisi semulanya (profesionalisme militer), ini membuat militer tidak lagi berkecimpung dan mendominasi secara penuh dalam politik serta pemerintahan. Profesionalisme militer di Indonesia sudah terbilang cukup berhasil, dengan menjadikan militer bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Jika melihat reformasi militer saat ini di Indonesia, maka akan muncul pertanyaan, apakah reformasi militer tersebut sudah terlaksana secara maksimal di Indonesia? Jika kita menelisik dari segi penganggaran, maka akan ditemukan data bahwa anggaran untuk militer di Indonesia sangatlah minim yang disetujui oleh DPR. Ini akan cukup berpengaruh pada hubungan sipil-militer yang coba dibangun, langkah profesionalisme militer itu sendiri masih terhambat akibat kalangan sipil, sehingga profesionalisme tersebut belum dapat diwujudkan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kesejahteraan para prajurit, yang berujung pada terhambat dan terbatasnya dalam proses menghasilkan prajurit militer yang profesional serta ahli dalam bidang pertahanan. Sungguh sangat disayangkan memang, ketika kontrol sipil terhadap militer itu sudah tercapai, namun problem saat ini adalah dari kalangan sipil masih belum dapat menguatkan posisi militer sesuai pada posisinya dalam menjaga pertahanan

negara. Tidak hanya, penambahan atau pengembangan alutsista pun terganggu akibat keterbatasan dari anggaran yang ada bagi institusi militer. Ketika melihat persoalan fragmentasi institusi sipil yang mengalami stagnasi, ini membuat konseptualisasi pada institusi sipil yang ada di Indonesia ini membuat munculnya kecenderungan pada institusi militer yang tidak beranjak dari konseptualisasi modern, yang di dalamnya selalu mengedepankan komptensi. Namun sangat disayangkan institusi militer Indonesia malah beranjak dari konseptualisasi historis, yang memang kental akan mempertahankan sejarah dan sebuah kebiasaan-kebiasaan otoritarian di masa orba.

Di dalam perspektif dari teori principal-agents seperti yang dikemukakan oleh Feaver (2003), di mana pengendalian sipil atas militer itu terjadi karena asimetri institusional, dan bukannya asimetri informasi. Dalam mewujudkan reformasi militer itu sendiri dengan melakukan atau melalui institusionalisasi militer. Yang di mana, perwujudan dari institusional militer itu sendiri, yaitu dengan menempatkan TNI di bawah Kementerian Pertahanan serta dengan pembentukan Kepala Staf Gabungan. Konsep institusionalisasi militer ini membuat kontrol sipil atas militer itu semakin mudah terasa, di mana TNI pada implementasinya dapat dikontrol oleh pemerintahan sipil. Maka dari itu, peneliti merasa usaha ini dapat menciptakan sebuah hubungan sipil-militer yang baik, dengan dibalut oleh kerangka demokratisasi. Perspektif mengenai kondisi hubungan sipil-militer di Indonesia saat ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar, khususnya dalam mempertahankan serta mengembangkan esensi dari profesionalisme militer. Kunci terpenting agar Indonesia tidak kembali terjerumus pada jurang otoritarian dan dominasi militer, yaitu salah satunya dengan selalu mengupayakan aspek-aspek dari profesionalisme militer, khususnya dalam menjamin kesejahteraan TNI dan tidak melibatkan TNI dalam persoalan konflik politik antar kelompok kepentingan. Terkadang ada perspektif yang mengatakan bahwa militer berpolitik akibat dari banyaknya kegagalan pemerintahan sipil, hal inilah yang perlu disiasati oleh Indonesia saat ini. Ketika banyak sekali permasalahan yang muncul di bawah kekuasaan pemerintahan sipil, khususnya dalam aspek perekonomian negara. Maka potensi dan ancaman menodai hubungan sipil-militer dan netralitas TNI akan selalu ada, mungkin ketika adanya indikasi menggunakan cara membandingkan dengan kemajuan perekonomian di era orde baru. Pemikiran yang sempit tersebut dapat terbatahkan dengan konsistensi kalangan sipil dalam menjauhkan TNI atau militer Indonesia dari interpensi atau pengaruh-pengaruh seperti itu. Sehingga pada akhirnya, peneliti menilai reformasi di Indonesia saat ini cukup layak dikatakan sudah memenuhi karakteristik atau konsep demokrasi, dengan adanya dominasi sipil dalam pemerintahan dan negara, serta didukung dengan pengembalian fungsi asli dari militer (TNI) sebagai alat pertahanan dan keamanan negara yang jauh dari keberpihakan pada satu kelompok atau individu yang berpolitik.

Kebijakan Politik dan Lembaga Terkait dalam Kontrol Militer Pasca Reformasi

Pasca reformasi salah satu agenda penting pemerintah dalam mewujudkan demokratisasi adalah reformasi TNI dalam rangka mewujudkan profesionalisme militer. Langkah pertama yang terwujud adalah penghapusan Dwifungsi ABRI dan pemisahan antara TNI dan Polri. Langkah lainnya tercantum dalam berbagai kebijakan politik Indonesia. Namun beberapa akademisi berpandapat jika sebenarnya ada pergeseran paradigma dari ‘reformasi TNI’ menjadi ‘transformasi pertahanan’. Reformasi militer tidak hanya sebatas kebijakan yang muncul tapi juga institusi dan Lembaga disekitarnya.

Aktor politik, kebijakan publik, dan keamaan domestik menjadi tiga daerah penting yang harus dikuasai otoritas sipil di negara yang baru mengalami transisi demokrasi (Kardi, 2015). Di Indonesia keadaan ini tergambar pada gelombang reformasi sebagai sebuah transisi menuju negara demokratis. Menurut Trinkunas (2005) kontrol sipil atas militer harus diwujudkan melalui kehadiran institusi. Maka dari itu di Indonesia Kementerian Pertahanan dan DPR RI adalah bentuk representasi otoritas sipil dalam mengontrol pergerakan militer. Kemenhan

berwenang atas segala birokrasi pertahanan yang melibatkan militer, maka dari itu aktor dan pejabat yang menduduki posisi strategis dalam Kemenhan haruslah sipil yang memiliki hak dalam menentukan kebijakan di sektor pertahanan dan evaluasi sejauh mana militer sudah mewujudkan preferensi pemerintah. (Kardi, 2015).

DPR RI sebagai parlemen hadir sebagai *superbody* dalam melakukan pengawasan sektor pertahanan terutama militer. Pasca amandemen UUD RI DPR memiliki kewenangan luar biasa mencakup fungsi pengawasan, legislasi, hingga anggaran. Peranan parlemen dalam menghasilkan produk hukum dan kebijakan publik sebagai kontrol terhadap militer tergambar dalam fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Fungsi pengawasan terwujud dalam isu seputar kultur politik TNI, putusan pelanggaran HAM, konflik TNI-Polri, dan bisnis TNI (Nainggolan, 2016).

Pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid beliau mengambil beberapa Langkah supremasi sipil dalam rangka mengontrol gerak militer. Memutus mata rantai suasana orba Gus Dur memecat sejumlah jenderal yang dikenal dari masa Kepemimpinan Suharto, salah satunya Wiranto yang dicopot dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Langkah penting yang beliau lakukan adalah demiliterisasi politik (Etanol, Waru, & Habiscus, 2017). Kekerasan politik warisan orba saat itu masih terlihat dengan penempatan tank Kostrad dan marinir di sekitar gedung MPR DPR. Gus Dur juga menempatkan Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI, hal ini bertujuan untuk menggeser tradisi kekuasaan TNI AD di posisi tersebut. Selanjutnya kebijakan penting yang Gus Dur ambil adalah pemisahan TNI – Polri. Berbagai kebijakan politik pada kepimimpinan Abdurrahman Wahid berdampak besar, megurangi hak istimewa militer, supremasi sipil atas militer.

Jenderal Sutarto pada 2004 mengatakan dengan tegas bahwa militer hingga 2009 tidak akan menggunakan hak pilihnya dan menganjurkan TNI menggunakan hak pilihnya pada saat pergantian Panglima TNI di 13 Februari 2006. Hal ini bertujuan menjaga netralitas mereka, namun perlu digaris bawahi bahwa memilih adalah hak seluruh warga negara maka dengan ini Militer malah melanggar ketentuan UU Pemilu yang memberikan anggotanya hak memilih.

Ditengah doktrin TNI tidak boleh berpolitik ada banyak pro kontra disekitarnya tergantung dari mana kita melihat perspektif ini. Pemimpin TNI diawal reformasi malah berpendapat sebaliknya, menurut mereka TNI tidak boleh buta politik karena juga berkorelasi dengan keamanan negara. Statement ini tidak sepenuhnya benar dan salah. TNI memang tidak boleh buta akan keadaan politik negara namun tidak bisa masuk dalam tatanan kekuasaan politik.

Nainggolan (2016) dalam jurnalnya yang dirilis di website resmi DPR memaparkan kelemahan UU yang saat ini berlaku terakit sektor pertahanan dan kontrol sipil terhadap militer. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terdapat keambiguitasan terkait istilah Dewan Keamanan Nasional, tidak ada sanksi yang jelas jika pihak yang berkaitan melanggarinya. Selanjutnya regulasi ini juga dianggap tidak rinci dikarenakan Dephan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tidak ada ketentuan lanjutnya secara detail, padahal kehadiran Departemen Pertahanan adalah instrumen penting penegakkan supremasi sipil.

Konteks pengawasan oleh DPR dalam UU tersebut juga tidak dirinci secara jelas. Pasal 24 bebunyi ‘DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara’ dan ‘dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara’ hanya sebatas mekanisme secara garis besar tanpa mencakup seberapa banyak informasi yang bisa DPR peroleh.

Pada 2010 Presiden SBY menggagas program dalam kebijakan pertahanan yang bernama *Minimum Essential Force* (MEF) yang bertujuan pada modernisasi kekuatan tempur TNI jangka Panjang. Namun dalam jangka waktu 2010-2014 program ini diwarnai skandal seperti kasus korupsi dalam pengadaan alutista pesawat F-16. Kebijakan MEF yang dilakukan dalam tiga tahap tidak sepenuhnya berhasil, walaupun kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari berbagai Lembaga pemerintahan; Presiden, DPR, hingga TNI.

Pada 2008 Mendagri mengangkat Mayjen Tarnibali Lamo sebagai pejabat sementara pengganti Gubenur Sulawesi Selatan. Keputusan ini menimbulkan konflik besar, salah satu anggota Komisi I FKP bahkan menilai ini Langkah fatal selama kepemimpinan Presiden SBY yang notabenenya eks-militer dengan merekrut militer ke dalam tatanan birokrasi dan melanggar cita-cita reformasi. Dari segi produk hukum, naiknya Tanribali melanggar pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi ‘Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan’.

Pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi diskursi sipil militer kembali naik ke permukaan, hal ini dikarenakan pada 2019 saat pengumuman Menteri Indonesia Maju ternyata enam diantaranya berasal dari Militer. Tidak hanya jajaran Menteri namun juga menempati posisi Komisaris BUMN dan facilitator BNPPB. Presiden Jokowi dianggap melukai cita-cita reformasi dengan memberi ruang TNI – Polri untuk masuk dalam pusaran kekuasaan. Pada 2020 Presiden berkeinginan mengatasi masalah melimpahnya perwira nonjob dengan mengadakan 60 pos baru, namun bagi Panglima TNI Marsekal Hadi salah satu cara pendistribusinya yaitu ke Kementerian. Berangkat dari bebagai paparan dan penelitian di atas maka reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan (Kardi, 2015)

Penilaian Hubungan Sipil-Militer di Indonesia

Jika kita melihat kondisi di Indonesia sebagai negara demokrasi, yang memiliki sejarah yang cukup kental akan transisi sistem pemerintahannya. Hal ini membuktikan bahwa tekad dari negara Indonesia yang kuat dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Dalam perspektif ini, keberhasilan Indonesia dalam melepas belenggu rezim otoritarian membuat prinsip-prinsip demokrasi yang ditanamkan semakin menguat. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek historis tersebut membuat bangsa ini menjadikan demokrasi sebagai sebuah keniscayaan dalam keberlangsungan sebuah pemerintahan dan negara. Dengan kesamaan pemikiran dan tekad untuk melawan rezim orba, hal itulah yang menjadi demokrasi di Indonesia dapat dikatakan terkonsolidasi dengan baik. Perlu diketahui bahwa kunci dalam area studi berproses demokrasi itu berada pada bagaimana hubungan sipil-militer itu berlangsung. Dimana hubungan sipil-militer ini harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer maupun non-militer. Faktor keseimbangan ini dimaksudkan agar tidak ada kekuatan dominan ketika proses pengambilan keputusan baik itu secara strategik ataupun nasional, namun hubungan sipil-militer ini seharusnya diarahkan kepada bagaimana hubungan sipil dan militer dapat menghasilkan suatu keputusan mengenai keamanan nasional yang paling baik. Jika menngacu pada (teori agensi) Samuel P. Huntington (1957) yang menyatakan bahwa kontrol sipil (*civilian control*) harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relative sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian, baik subjektif ataupun objektif. Runtuhnya pemimpin tirani membuat era baru terbentuk di Indonesia, banyak perbaikan yang dilakukan khususnya pada sektor sosial-politik. Karena sudah sama-sama kita ketahui, bahwa dominasi militer terhadap sosial-politik di Indonesia sangatlah negatif.

Saat ini, terciptanya pemerintahan sipil yang membuat kontrol sipil atas militer, itu semakin terasa keberadaannya. Sesuai dengan dua cara pengendalian sipil atas militer menurut huttington, peneliti menganggap Indonesia saat ini masih berpotensi berada di keduanya. Indonesia saat ini terkesan masih menerapkan juga pengendalian sipil secara subjektif, di mana kekuatan sipil terlalu besar atau memperbesar kekuatan sipil dibandingkan militer. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kondisi dan realita yang ada, seperti apa yang sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa kalangan sipil masih belum dapat memberikan kesejahteraan kepada prajurit militer. Sehingga peneliti melihat kalangan sipil terkesan ingin memperkuat kekuatannya dengan melalui kekuasaan dan legitimasi yang dimilikinya terhadap militer. Tapi hal ini menjadi tanda atau alarm bahaya bagi kedudukan hubungan sipil-militer yang sedang di jalin dengan cukup baik, bisa saja ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-

waktu. Namun demikian, Indonesia juga dinilai berhasil dalam menerapkan pengendalian sipil secara objektif. Hal itu dapat terlihat dari sejak era reformasi sampai dengan sekarang, di mana terdapat pengembalian fungsi militer kepada posisi awal atau yang seharusnya, yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Profesionalisme militer ini menanamkan jiwa-jiwa militer profesional, seperti menurut Chrisnandi (2005) identitas militer yang profesional itu terdiri dari keberhasilan tugas, mahir menggunakan senjata, disiplin, pengembangan diri, tidak terlibat politik, dan kepatuhan pada hukum dan atasan. Di Indonesia pun sudah mengimplementasikan aspek-aspek profesionalisme militer tersebut, khususnya dalam segi menghindarkan militer dari keterlibatannya dalam ranah politik, karena tidak dapat dipungkiri Indonesia pada masa orde baru sempat mengalami dwifungsi ABRI yang membuat militer terjun pada arena politik serta mendominasinya. Beberapa hal penting pada pembahasan sebelumnya ini memiliki kata kunci jika Indonesia masih ingin mempertahankan demokrasi yang disertai oleh kontrol sipil atas militer, yaitu dengan menjauhkan militer dari urusan-urusan nonmiliter. Pada akhirnya, peneliti melihat, bahwa dengan Indonesia menerapkan profesionalisme militer, hal itu menjadi sebuah tanda demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasi dengan baik dalam mencapai kontrol sipil atas militer. Namun Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi di kemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu tetap ada. Walau pun Indonesia masih dapat mengantisipasi potensi tersebut dengan memberi berbagai sektor yang menunjang penguatan hubungan sipil-militer, salah satunya dengan profesionalisme militer (TNI) dan kesejahteraan militer (TNI) yang harus ditingkatkan oleh kalangan sipil.

Kesimpulan

Perlu dipahami bahwa dalam area studi berproses demokrasi itu berada pada bagaimana hubungan sipil-militer dapat memiliki hubungan yang baik pada suatu negara. Dimana di dalam hubungan sipil-militer pada suatu negara demokrasi itu harus memiliki faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan instrumen non-militer. Namun, di Indonesia sendiri tentunya memiliki sejarah perjalanan reformasi militer yang cukup panjang dan penuh akan hambatan berat, yang sumbernya itu sendiri berasal dari pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa.

Setelah turunnya rezim tirani pada tahun 1998 menjadi sebuah awal dari kebangkitan reformasi militer serta menuju arah pembentukan demokratisasi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu Indonesia semakin menunjukkan indikasi positif dalam perjalannya menuju ke arah demokrasi. Terdapatnya kontrol sipil atas militer ini menjadi sebuah penanda dari reformasi militer itu sendiri. Dengan mengembalikan militer kepada posisi semulanya (profesionalisme militer), ini membuat militer tidak lagi berkecimpung dan mendominasi secara penuh dalam politik serta pemerintahan. Profesionalisme militer di Indonesia sudah terbilang cukup berhasil, dengan menjadikan militer bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Sejauh ini peneliti menilai reformasi di Indonesia masa kini sudah cukup layak dikatakan sudah memenuhi karakteristik atau konsep demokrasi, dengan adanya dominasi sipil dalam pemerintahan dan negara, serta didukung dengan pengembalian fungsi asli dari militer (TNI) sebagai alat pertahanan dan keamanan negara yang jauh dari keberpihakan pada satu kelompok atau individu yang berpolitik. Namun, pada dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi diskursi sipil militer kembali naik ke permukaan, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 saat pengumuman Menteri Indonesia Maju ternyata enam diantaranya berasal dari Militer. Tidak hanya jajaran Menteri namun juga menempati posisi Komisaris BUMN dan facilitator BNPB. Presiden Jokowi dianggap melukai cita-cita reformasi dengan memberi ruang TNI – Polri untuk masuk dalam pusaran kekuasaan. Pada tahun 2020 Presiden berkeinginan mengatasi masalah melimpahnya perwira nonjob dengan mengadakan 60 pos baru, namun bagi Panglima

TNI Marsekal Hadi salah satu cara pendistribusianya yaitu ke Kementerian. Berangkat dari bebagai paparan dan penelitian di atas maka reformasi TNI dan kontrol sipil di Indonesia belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam proses transisi menuju ke civil society yang diharapkan. Sehingga, Indonesia harus tetap berhati-hati dan mawas diri dalam mensiasati dinamika yang mungkin saja terjadi dikemudian hari, karena potensi terjadinya konflik yang menciderai hubungan sipil-militer itu mungkin saja tetap ada dan akan terjadi.

Daftar Pustaka

- Chrisnandi, Y. (2005). Reformasi TNI: perspektif baru hubungan sipil-militer di Indonesia. In *LP3ES eBooks*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA75562345>
- Crouch, H. (1977). The National Struggle and the Armed Forces in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 8(2), 255–257. <https://doi.org/10.1017/S0022463400009486>
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Etanol, E., Waru, D., & Habiscus, G. (2017). *Digital Repository Universitas Jember*. Digital Repository Universitas Jember.
- Feaver, P. (2003). Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations. *Foreign Affairs*, 82(6), 158. <https://doi.org/10.2307/20033780>
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 1-34. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117>
- Huntington, S. (1957). *The Soldier and the State; the Theory and Politics of CivilMilitary Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Kardi, K. (2015). Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 19(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4703>
- Kipgen, N. (2016). Militarization of Politics in Myanmar and Thailand. *International Studies*, 53(2), 153–172. <https://doi.org/10.1177/0020881717728156>
- Latuconsina, M. J. 2008. “Antagonisme Hubungan Sipil–Militer di Fiji (Potret Coup d’etat Militer terhadap Pemerintahan Sipil).” *Hipotesa* 2(2), 45-54.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, P. P. (2016). Peran DPR dalam menjalankan kontrol demokratis atas pembaruan sektor keamanan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v2i1.285>
- Pion-Berlin, D. (2001). *Civil-Military Relations in Latin America*. The University of North Carolina Press
- Seo, J. (2023). When Coups Occur: Erosion of Democracy in Thailand and Myanmar. *Obrana a Strategie (Defence & Strategy)*, 23(2), 039–061. <https://doi.org/10.3849/1802-7199.23.2023.002.039-061>

Trinkunas, H.A. (2005). *Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparative Perspective*. University of North Carolina Press

Yulianto, A. (2002). *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru di Tengah Pusaran Demokrasi*. Grafindo Persada.

Diverging Views, Shared Interests: Japan-India Security Partnership

Satrio Agung Wicaksono^{1*} 

¹Department of International Relations, Universitas Indonesia, 16424, Jawa Barat- Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: April 29, 2025

Accepted: Jun 12, 2025

Published: Jun 18, 2025

Kata Kunci:

Japan; India; Security Cooperation.

Penulis Koresponden:

Satrio Agung Wicaksono

Department of International Relations, Universitas Indonesia.

Email:

satrio.agung@ui.ac.id

Situs Cantuman:

Wicaksono, S. A. (2025). Diverging Views, Shared Interests: Japan-India Security Partnership. *Journal of Political Issues*, 7 (1); 57-70.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.343>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta (c) 2025 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Political Issues

Abstrak

Abstract Since the early Cold War era, Japan has cooperated exclusively with the United States in security matters. However, since the end of the Cold War, Japan began to diversify its bilateral security cooperation with other countries in the region, including those who do not necessarily share its immediate strategic interests, such as India. This article examines decision to choose India as its bilateral security partner, which started since 2008. This study relies on desk research, analyzing primary and secondary data collected from 2008-2025. The research applied qualitative deductive method and uses triangulation as an analytical tool. The analysis is grounded in neoclassical realism, which highlights the interaction between systemic pressures and domestic-level variables. Systemic factors examined included increasing maritime insecurity (terrorism and piracy) and the rise of Chinese maritime capabilities. In addition, the domestic perception and role of the foreign policy executive, particularly Prime Minister Abe, is taken into consideration. Findings from this research show that systemic pressures, especially from rising China, have pushed Japan to seek cooperation with like-minded regional actors. Furthermore, Abe's "Confluence of the two seas" speech framed India as the linchpin in Japan's Indo-Pacific strategy, citing its shared democratic values and status as a maritime states. These factors, combined with favorable elite perceptions of India, helped form Japan's decision to choosing India as its security partner.

Abstrak Sejak awal masa Perang Dingin, Jepang bekerja sama dalam isu keamanan secara eksklusif dengan Amerika Serikat. Namun, pasca berakhinya Perang Dingin, Jepang mulai memperluas hubungan keamanan bilateral dengan negara lain, meskipun negara-negara tersebut tidak memiliki kepentingan strategis yang sama, salah satunya adalah India. Artikel ini menganalisis keputusan Jepang memilih India sebagai mitra keamanan bilateral yang telah berjalan sejak tahun 2008. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan literatur untuk mengumpulkan data primer dan sekunder tahun 2008-2025. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis realisme neoklasik untuk menelusuri alasan Jepang memilih India sebagai mitra kerja sama keamanan walaupun kepentingan strategis keduanya berbeda. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif-deduktif dan metode triangulasi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis penelitian ini menekankan pada keterhubungan tekanan dan pengaruh sistematis, yaitu ketidakamanan maritim dan meningkatnya kekuatan Tiongkok, serta persepsi domestik terhadap pengaruh sistemik, yaitu persepsi pengambil keputusan Jepang seperti Perdana Menteri Abe. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan sistemik terhadap Jepang, khususnya meningkatnya kekuatan Tiongkok, mendorong Jepang untuk bekerja sama dengan negara di kawasan yang menganut nilai yang serupa. Selain itu, pidato "Confluence of the two seas" PM Abe juga merefleksikan pandangan positif pengambil keputusan Jepang. Kedua hal tersebut kemudian mendorong Jepang untuk memilih India sebagai mitra keamanannya.

Tentang Penulis:

Satrio Agung Wicaksono, The author is currently a graduate student at the Master Program of International Relations at Universitas Indonesia.

Introduction

The anarchic nature of the international system forces states to rely on themselves to maintain their own survival. This created a condition where states are encouraged to build their power to face threats against their survival, namely other states. When facing threats, states have two

options, to develop their capabilities or cooperate with other states. One way that a state can cooperate with other states is through security cooperation.

Security cooperation in the Indo-Pacific region has historically been monopolized by defense alliance between the United States and its allies in Asia, such as Japan, the Philippines, and Thailand. By the end of the Cold War, security cooperation in the region expanded to had expanded to a multilateral level, as shown by attempts to build security community in the region by ASEAN ([Caballero-Anthony, 2020](#)). The rise of multilateral security initiatives, however, does not preclude the importance of bilateral cooperation, as it is the preferred approach by most countries in the region. Japan is one of such cases.

Since the end of the Second World War, Japanese defense policy has been heavily restricted. This is due to constraint put by the new constitution that prohibited Japan to maintain any kind of military power. Furthermore, the constitution also renounces the use of force in resolving international disputes ([The Constitution of Japan, n.d.](#)). In conjunction with the signing of the San Francisco Peace Treaty, the Yoshida administration also signed the U.S.-Japan Mutual Security Treaty. The security pact established a military alliance between the United States and Japan and in turn guaranteed Japan's security under U.S. protection ([Maizland & Cheng, 2021](#)).

The fall of the Soviet Union at the end of the Cold War caused a great change in security policy. Losing its primary threat, the United States began reducing its defense spending and drawing down overseas deployment. The change of policy created new dilemma for U.S. allies, especially Japan. This development then pushed Japan to recalibrate its defense policy by building new multilateral security initiatives and expanding bilateral security partnerships with other countries ([Midford, 2000, p. 375](#)). However, these new security partners do not always share immediate strategic interests with Japan, one such country is India.

Japan and India security cooperation is growing rapidly due to Japan's interest in securing its sea lines of communication (SLOC). The Indian Ocean is important for Japan's SLOC as it is the primary route for Japan's energy imports ([Kotani, 2011](#)). With the rise of maritime security incidents, such as terrorism and piracy, the flow of Japanese energy imports from the Middle East may be disrupted. Furthermore, Japan also factored China's increasing maritime activities into their interest in the Indian Ocean ([White, 2020](#)). Among these factors, rising Chinese maritime capabilities has come the most influential driver towards of regional security cooperation. To address these challenges, Japan needs partners in the region. India's position as regional power in the Indian Ocean region put them as a potential partner for Japan.

However, the two countries' security cooperation is overshadowed by differences in strategic interests. Japan's strategic interest is to ensure rules-based order remain the status quo in the international system. This can be seen in Japan's efforts to counterbalance China's increasing power by expanding security cooperation with other countries ([Cabinet Secretariat of Japan, 2013](#)). On the other hand, India is implementing strategic autonomy policy, which does not favor any major power and gives itself a degree of independence in its foreign policy ([Ranjeev, 2025](#)).

This is reflected in the different actions taken by Japan and India towards Russia on the issue of Ukraine-Russia War. India did not boycott trade with Russia as it needed Russia's support to maintain its weapon system, which mostly sourced from Russia. On the other hand, Japan takes a strong position against Russia as a manifestation of its interest in maintaining rules-based order ([Solanki & Togashi, 2022](#)). These differences in interests tend to hinder security cooperation between countries. Nevertheless, security cooperation between Japan and India could be conducted despite the differing interests. Considering the differences of both countries' strategic interests, this article can be summarized into the following question: Why did Japan chose India as its security partner even though the two countries have different strategic interests?

To explain Japan decision in choosing India as its security partner, this article is divided into four sections. The first section will elaborate the background of the security cooperation, explaining the research question, as well as the literature review. The second section will explain the analytical framework used in the article to answer the research question. The third section will explain research methods utilized, and the final section will briefly explain the Japan-India security cooperation and then elaborate the findings of the article and its conclusion.

Literature Review

Previous studies that discussed Japan and India strategic partnership have differing views on the partnership. First, the strategic partnership between the two countries is built on the basis of a common interest to balance China (Chand & Garcia, 2017; Joshi & Pant, 2015; Keerthiraj & Sekiyama, 2023; Shaheen & Mu, 2023). Chand and Garcia (2017) highlighted the securitization of China by Japan, India, and Southeast Asian states, which allowed Japan and India cooperate closely in providing security assistance for the Southeast Asian states. While Joshi and Pant (2015) argued that weakening United States-led security order provided rationale for Japan-India strategic partnership, which worked as “hedging” for both countries. However, there is a view that this partnership will only hold as long as China remains as a threat for Japan and India (Mukherjee, 2018). Therefore, if China ceases to become a threat, the strategic partnership may falter and fail.

The second group of studies focused on Japan’s foreign policy towards India. Previous studies discussed how Japan’s approach towards India is based on Free and Open Indo-Pacific strategy. The strategy promotes cooperation in various fields with countries in the Indo-Pacific region. In addition, the strategy also underlines the need for diffusing certain values in maritime security cooperation and infrastructure development (Yoshimatsu, 2019). Japan’s policy towards India has also evolved from soft balancing to hedging as an attempt to counterbalance the rise of China. Aside from the rise of China, India’s growing power is also considered as another driving factor for the strengthening of Japan-India cooperation (Jain, 2008). However, security cooperation between Japan and India has only been developed recently and seen as volatile. But the cooperation between the two countries has the potential to develop further (Brewster, 2010). The security cooperation indeed has expanded further. This led to the perception that Japan’s security cooperation with India is highlighted as a new type of defense cooperation model, which is US-led federated defense model (Ishibashi, 2018; Yoshimatsu, 2020).

From the two groups of previous studies, it can be summarized that the relations between Japan and India have rapidly developed into a strategic partnership. The strategic partnership between two countries is not only limited to economic partnership, but also in the field of security. Japan sees India as a potential partner in dealing with the rise of China. Even though both countries do not necessarily share the same strategic interests, security cooperation between Japan and India has flourished. Although previous studies have discussed Japan and India security cooperation, very little has been discussed from the perspective of Japan and role of the prime minister in creating the cooperation. Therefore, this article seeks to fill the research gap on Japan-India security cooperation, by analyzing The Japanese decision of choosing India as its partner through neoclassical realism approach.

Analytical Framework: Neoclassical Realism

Neoclassical realism was first coined by Gideon Rose in 1998 in his article, “*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*”. Neoclassical realism is a development from classical realism and structural realism. It attempts to bridge the previous theoretical approaches to foreign policy formation. The theory adopts two variables from existing theories, which are

systemic pressures and influences from offensive realism and defensive realism. The other variable is internal factors or domestic factors from *innenpolitik* (Rose, 1998). The following paragraphs will explain systemic pressures and influences as the independent variable in the analytical framework. Then, it will elaborate on how domestic factors work as the intervening variable on systemic pressures. Domestic factors, such as foreign policy executives' perceptions, translated systemic pressures into working foreign policy.

Neoclassical realism theory considers that systemic pressures and influences alone are not enough to shape an actor's foreign policy. Systemic influences must go through filtering process by internal parties of an actor, in this case foreign policy executive of a state. Through the perception of foreign policy executives, systemic influences will be translated into foreign policy. Thus, analysis of foreign policy solely through the lens of external factors as its independent variable is generally inaccurate (Rose, 1998, p. 152). On the other hand, neoclassical realism theory disagrees with putting internal factors as the independent variable. Rose (1998, p. 151) argues that systemic factors will automatically limit the influence of internal factors in foreign policy formation. Thus, neoclassical realism considered internal factors as intervening variables in the formation of foreign policy.

Systemic influences in neoclassical realism theory can be classified into systemic pressures and incentives. Systemic pressures and incentives are changes in the relative power that affect a state's position in the international system. These pressures can materialize in the form of an increase in power of a state relative to other state, thus posing a security threat to the other state (Rose, 1998, p. 149).

Then, the intervening variables can be classified into two groups, elite perceptions of systemic influences and the domestic political structure of a country. Systemic influences are the independent variable of foreign policy formation, but foreign policy executive perception towards systemic influences will affect what kind of foreign policy will be formulated. The perception of these foreign policy executive towards systemic influences does not change slowly, but tends to change abruptly (Rose, 1998, p. 158). In addition, foreign policy executives' interpretation of systemic influences is not always rational.

The Perception of foreign policy executives towards systemic influences is analyzed based on the identification of both international and domestic threats. This threat identification model is referred to as complex threat identification. It identifies threats at three levels, namely systemic, subsystemic, and domestic levels. The three levels are interconnected and the boundaries between them are not clear (Lobell, 2009). Based on this threat identification, the foreign policy executives will act at a certain level, but the action is intended to influence outcomes at other levels. Thus, state action that appear ineffective at one level can be expected to be optimal at another level (Lobell, 2009, p. 47).

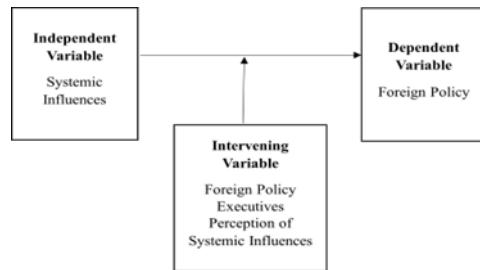
Threats at the systemic level come from competition between states, especially great powers. According to defensive realism, anarchy in the system encourages states to prioritize their own security. A state effort to increase power is considered as counterproductive because it can cause a balancing act from another states by increasing their power (Lobell, 2009, p. 47).

Meanwhile, threats at the subsystemic level observe the dynamics of competition between regional powers. Regional power competition is semi-autonomous, which means that the dynamics are different compared to great power competition. However, it is still influenced by great power competition and domestic politics. Great powers can also influence the distribution of power within the region, which creates new threats and opportunities for states in the region (Lobell, 2009, p. 49).

The domestic level mainly observes the dynamics of competition within the state. Domestic threats arise from the lack of loyalty to the central government from domestic actors, which then threatens the continuity of the government. This causes the state to prioritize internal threats to ensure regime survival and override external threats (Lobell, 2009).

From the explanation above, the operationalization of the neoclassical realism theory can be described as follows. Systemic influences are the independent variables that affect foreign policy formulation, which is the dependent variable. Then, the perception of foreign policy executives towards systemic influences is considered as the intervening variable. The operationalization of the theory is explained by the figure below.

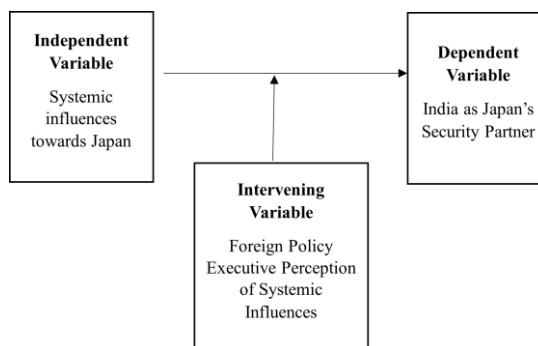
Figure 1. Neoclassical Realism Operationalization



Source: processed by the author based on Rose, 1998

Based on the operationalization of the theory, the factors that encourage Japan to choose India as its security partner can be explained. The independent variables in this study are systemic influences towards Japan. There are two systemic pressures that are considered in this analytic model, rise of non-traditional maritime security threats and rise of China. These systemic pressures provided external influences on action taken by Japan. Then, the independent variables are combined with intervening variables in the form of Japanese foreign policy executive's perception of systemic influence towards Japan. Foreign policy executives' perception will be inferred from speeches and policy decision, especially those connected directly with Japan's relations with India. Japanese foreign policy executives' perceptions moderate and translate systemic pressures and influence into working foreign policy, in this case, choosing India as Japan's security partner. Foreign policy executives' perception is inferred from policy documents, speeches and official reports pertaining to systematic pressures toward Japan and Japan's relations with India. Both variables then result in Japan's decision to choose India as its security partner. The analytical model explained can be observed in figure 2 below.

Figure 2. Analytical Model



Source: processed by the author

Methods

This article will apply qualitative research with a deductive approach. Qualitative methods are used to understand the world and focus on the meaning and processes that shape international politics (Lamont, 2015). This approach can explain Japanese foreign policy decisions following the end of the Cold War, including its decision to expand security cooperation with India. The

deductive approach itself will utilize categorization based on the theory used (Lamont, 2015). The deductive component is based on the neoclassical realism framework, in which Changes the systemic conditions, such as the rise of China, will be categorized into systemic pressures toward Japan. In addition, responses by Japanese foreign policy executives, such as speech, policy statements, and strategic decisions responding to the systemic pressures mentioned are considered as foreign policy executive perception. Through the two categories, Japan decision to cooperate with India can be inferred as the result of interaction of domestic perceptions and systemic pressures and influences.

This article utilizes desk and library research as the data collection method. Desk and library research will collect data from official documents, news, and previous studies. Primary and secondary data sources will be utilized in this article. Primary data will be sourced from official documents from the Japanese government (defense white paper, diplomatic bluebook, official reports, speeches). Secondary data will be collected from books, media, journal articles and previous studies that discussed the issues in this article. The research period of this article will start from the signing of the joint declaration in 2008 to 2025. Collected data then will be processed through the triangulation method. In the next section, this article will explain Japan-India Security Cooperation briefly in order to provide a background for the discussion.

Results and Discussion

This section will analyze the factors that influenced Japan's decision to choose India as its security partner through neoclassical realism approach. The factors to be analyzed are systemic influences towards Japan and foreign policy executive's perceptions of systemic influences. Both factors then encouraged Japan to cooperate with India in security issues. The following section will elaborate historical and diplomatic background of Japan-India security cooperation as basis for discussing Japan's decision to choose India as its security partner.

Japan-India Security Cooperation

Japan and India relations faced its highs and lows since the end of the Second World War. In the early days of the diplomatic relations, Japan views India positively. This was due to India's decision to sign peace treaty with Japan separately and refusing to take any wartime compensation (Jain, 2010, p. 404). Both countries relations are strengthened further by strong economic relations, as Japan needed raw materials, such as iron ore, to rebuild the Japanese economy. Furthermore, India was one of the first recipients of Japanese foreign aid in 1958 (Jain, 2010, p. 405). However, differences in alignment, Japan is a staunch U.S. ally while India is non-aligned in its foreign policy, prevented both countries from cooperating closely with each other. The 1990s was the low point of diplomatic relations between both countries, as Japan condemned India's nuclear weapons test. In addition to condemnation, Japan also imposed economic sanctions on India, recalled its ambassador, and pushed the international community to "punish" India (Jain, 2010, p. 406). Diplomatic relations were improved by 2000, when Prime Minister Yoshihiro Mori visited India. The visit also marked the beginning of a deeper cooperation between the two countries (Jain, 2010, p. 407). Then in 2005, cooperation was expanded to eight initiatives for Japan-India partnership, one of which is dialogue and cooperation on security issues (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005).

Japan and India security dialog and cooperation was previously conducted in an ad-hoc manner. However, building on the initiative agreed in the past years, Japan and India agreed to institutionalize their security cooperation through a joint declaration in 2008 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008). The action plan for the security cooperation was then adopted in 2009. The plan detailed cooperation between the armed forces (joint exercises, visits, education, etc.) and cooperation in non-traditional security issues (piracy, terrorism, and transnational crimes) (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2009). After the signing of the joint declaration and action plan, security cooperation between the two countries has grown rapidly.

Both countries signed agreements on the security of shared classified information in 2015 and provision of logistics for the military of both countries in 2021 ([Chansoria, 2024](#); [Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2024](#)). In addition, inaugural 2+2 meetings between Foreign Ministers and Defense Ministers were also conducted in 2019 ([Chansoria, 2024](#)). In the next section, the article will explain results and discussion of the factors that influenced Japan's decision to choose India as its security partner.

Systemic Influences towards Japan and Domestic Factors

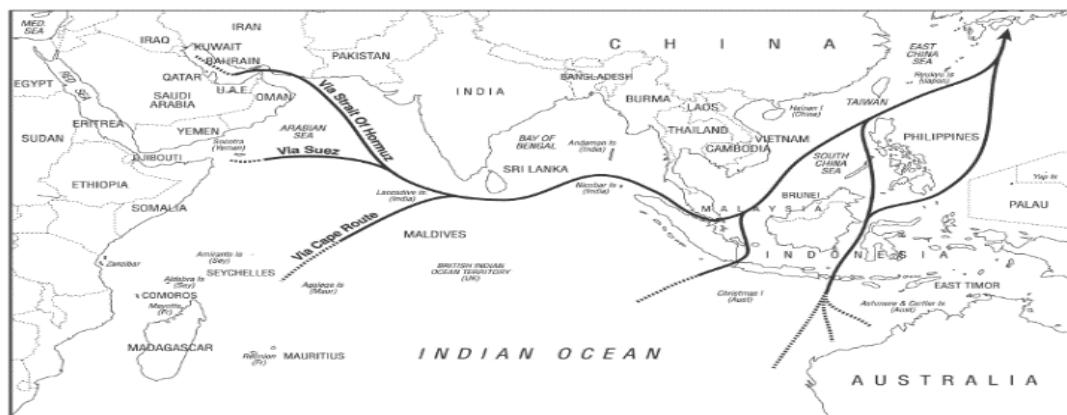
In the case of Japan's security cooperation with India, systemic pressures and incentives that encourage Japan to cooperate with India are the changing security conditions in the Indian Ocean. The rise of ship piracy, terrorism in the neighboring regions, and increasing China's maritime activities in the Indian Ocean are changing the security conditions for Japan. These factors influenced the security of Japan's Sea Line of Communication (SLOC). In addition to the systemic pressures, domestic factors played a quite significant role in the Japanese security policy formation, especially the leadership of the Prime Minister. In the case of Japan-India security cooperation, Prime Minister Abe is a strong factor in pushing cooperation between the two countries as the result of the systemic pressures and influences. The following sections will elaborate on systemic pressures and influences, maritime insecurity threats and Chinese maritime capabilities. Then, it will explain the role of Japanese foreign policy executives' perception towards systemic pressure and influences in Japan-India security cooperation.

Terrorism and Piracy in the Indian Ocean

Japan is dependent on energy imports from the Middle East. The energy import trade route from the Middle East passes through the Indian Ocean (Figure 3). As observed in the map, Japanese sea trade route passes through vulnerable areas in the Indian Ocean, such as the Strait of Hormuz and the Strait of Malacca. Thus, Japan has an interest in ensuring the security of shipping lanes in the Indian Ocean ([Graham, 2006](#)). During the Cold War, Japan relied on the United States Seventh Fleet to secure the sea lanes in the Indian Ocean ([Graham, 2006, pp. 97–98](#); [Kotani, 2011, p. 225](#)). After the Cold War ended, there was a demand for Japan to participate in securing SLOC in the Indian Ocean ([Kotani, 2011](#)).

The demand for Japan to participate in securing SLOC came from both external and internal parties. The United States, as Japan's ally, pressured Japan to send a military contingent in the Persian Gulf War (1990-1991) ([Cooney, 2007](#)). Japan was unable to fulfill this demand due to domestic legal obstacles that prohibited Japan from sending troops overseas. This sparked an internal debate within the Japanese government on what role Japan should play in the international community in the post-Cold War era ([Ushirogata, 2025](#)). These two factors then helped expand Japanese role from maintaining security in its surrounding waters to supporting the United States in securing SLOC.

Figure 3. Japanese Sea Lines of Communication

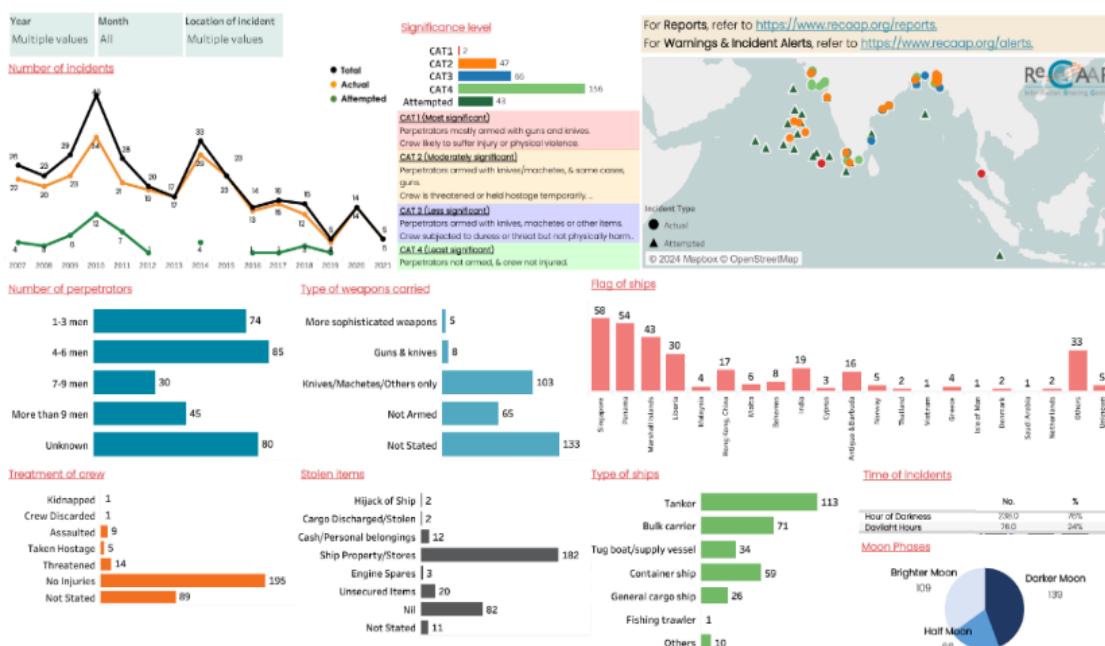


Source: Graham, 2006

With the rise of terrorism, Japan could end its warships to the Indian Ocean under the guise of counterterrorism. The change of policy happened when the Japanese government passed the Anti-Terror Act in October 2001 in response to the 11 September 2001 attack in the United States (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2002). The Act gave Japan a legal basis to deploy warships to the Indian Ocean in support of US naval operations and coalition forces (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2002, p. 19). Japan's decision to support United States and coalition forces naval operations was tied directly to its expansion of contribution towards international security in the post-Cold War era. Furthermore, by supporting the United States, this action works to reassure United States that Japan is ready to share the alliance burden.

Aside from terrorism, reducing threats from piracy is another factor in the Japanese involvement in the Indian Ocean region. The Increase in piracy incidents in the Indian Ocean, especially in the Gulf of Aden, poses a threat to the shipping routes. Incidents began to increase in 2007 and reached their peak in 2011 (BBC News, 2018). The numbers and distribution of the actual and attempted hijacking locations can be observed in Figure 4 below.

Figure 4. Number of Piracy Incidents and Incident Locations in the Indian Ocean



Source: ReCAAP ISC, 2024

The increase in piracy incidents prompted Japan to pass the Anti-Piracy Measures Law which provided legal basis for dispatching warships for anti-piracy missions in the Gulf of Aden ([Ministry of Defense of Japan, 2010, p. 244](#)). Japan's anti-piracy operations started in March 2009, and then Japan joined the multinational anti-piracy taskforce, Combined Task Force 151 (CTF 151) in 2013. By joining the task force, Japan seeks to increase the effectiveness of its anti-piracy operations and facilitate coordination with other countries in the task force ([Cabinet Secretariat of Japan, 2018](#)). These measures show that the security of the sea lanes is the utmost priority for Japan.

Development of Chinese Maritime Capabilities

The development of China's maritime capabilities also became a concern for Japan. Similar to Japan, China is dependent on energy imports. Its energy imports are also passing through the same sea lanes as Japan. However, China has not been able to project its maritime capabilities to protect its sea trade routes located far from its territory ([Henry, 2016](#)). Therefore, the People Liberation Army Navy (PLAN) seeks to build power projection capability to operate far from China proper ([White, 2020](#)). Apart from securing sea lanes, maritime capability building is also important for prestige. Strong maritime capabilities will reflect on China's image as a great power and its ability to maintain the security of its long coastlines ([Henry, 2016](#)).

China started to project its maritime capabilities to the Indian Ocean in 2008, with the dispatch of anti-piracy task force. The task force, consisted of 2 destroyers and 1 logistical ship, was tasked with escorting commercial vessels and patrolling the waters of the Gulf of Aden ([The New York Times, 2008](#)). In addition to dispatching anti-piracy task force, China also sent its warships to train in the Eastern Indian Ocean ([Panda, 2014](#)). As of 2021, China has dispatched about thirty-nine task forces for anti-piracy operations to the Gulf of Aden ([China Military Online, 2021](#)). As Chinese maritime capabilities strengthen, so does its ability to disrupt Japanese SLOC. Unlike Japan, China can utilize both land and maritime route for its energy imports. This was achieved through building ports along the Indian Ocean in states that are friendly to China. In addition, the ports are considered to be dual-use, meaning military vessels can operate from them ([Ushirogata, 2025, pp. 163–164](#)). With these infrastructures in place, the Chinese Navy can project its power in the region and deny Japan from using the sea lanes.

Chinese maritime capabilities not only threaten Japan, but also India. As India is building its own maritime capabilities, its threat matrices now also encompass the maritime dimension, in addition to the land dimension ([Ladwig, 2009](#)). This gave India the rationale to emphasize on building and modernizing its surface fleet to ensure sea control in the Indian Ocean ([Ushirogata, 2025](#)). With its large surface fleet, the Indian Navy could complement Japanese strategy in the Indian Ocean, especially in ensuring the security of the sea lanes.

Japanese Foreign Policy Executive's Perceptions of Systemic Influences

Facing systemic influences in the terms of changing regional security condition, Japanese foreign policy executives consider that Japan must expand its security relations with countries in the Indian Ocean region. Shinzo Abe is the main foreign policy executive who encourages the expansion of security ties with countries in the region, especially with India. This was by virtue of his position, Prime Minister of Japan. Japan's 2013 National Security Strategy states that strong relationships with countries that share the same values are important for strengthening Japan's security environment ([Cabinet Secretariat of Japan, 2013](#)).

In this regard, Japanese foreign policy executive considers the Indian Ocean is important for Japan. The importance of the Indian Ocean to Japan automatically positioned India, the main regional power of the region, as important as well to Japan. India's ambition to become a maritime power makes it important for Japan. Furthermore, India also shared similar views with Japan regarding securing sea lanes and maintaining freedom of navigation in the Indian

Ocean ([Hindustan Times, 2007](#)). Accordingly, India's ambition in becoming maritime power is shown through increases of navy's share of the budget from 11% in 1992-93 to 18% in 2008-09 ([Brewster, 2014, p. 13](#)).

This sentiment is reflected in Shinzo Abe's 2007 speech on the "confluence of the two seas". The speech mentioned Japan and India as a bridge between two seas, the Pacific Ocean and the Indian Ocean, which became part of "broader Asia" ([Abe, 2007](#)). With the capacities owned by both countries, Abe pointed out that both countries also had the responsibility to bring prosperity to the region together ([Abe, 2007](#)). Furthermore, he highlighted common values, such as democracy and interest in maintaining the security of trade routes held by both countries ([Abe, 2007](#)). He also emphasized that Japan benefits from a strong India and vice-versa ([Abe, 2007](#)).

In the beginning, security cooperation with India mainly to address non-traditional security threats in the Indian Ocean. This was evident in the first bilateral naval exercise, which emphasized anti-piracy and Humanitarian Assistance and Disaster Relief operations ([Indian Navy, 2012](#)). However, as maritime insecurity threats winding down in the 2010s, bilateral naval exercise between the two countries are starting to tilt towards countering traditional threats, such as submarines ([Panda, 2017](#)).

The "confluence of the two seas" speech then led to the emergence of Free and Open Indo-Pacific concept in Japanese foreign policy. As mentioned in the "confluence of the two seas" speech, Abe envisioned Japan's role as protector of rules-based order and international norm not only in the Pacific, but also Indian Ocean region. This is achieved through cooperation with democracies in the region. The concept is based on the premise that peace, stability, and freedom of navigation in the Pacific Ocean are closely related to the same issues in the Indian Ocean ([Abe, 2012](#)). In the concept, Japan views cooperation with countries that share the common values, such as democracy, as key to maintaining stability in the Indo-Pacific region. This is also reinforced by Japan's national security strategy document which states that India's growing power and its strategic position in the region makes it a key potential partner for Japan in maintaining its security ([Cabinet Secretariat of Japan, 2013](#)). The approaches made by Japan towards India are efforts to ensure the stability and security of sea lanes in the Indian Ocean. In addition, Japan's security cooperation with India is also viewed as an effort to counterbalance China's growing maritime capabilities ([Abe, 2012](#)).

Japan is responding to systemic influences in the Indian Ocean region by strengthening its ties with democratic countries in the region. Japan considers that strong relations with democratic countries such as India could strengthen its security environment. India's growing power and strategic position are also viewed as its strengths. In addition, Abe's positive perception of India also helped influence Japan's decision to choose India as its security partner. This perception aligned with Abe's vision of Japan's role as defender of rules-based order and international norms in the Indo-Pacific region.

Conclusion

Japan's decision to choose India as its security partner was primarily driven by combination of two factors, systemic influences and domestic perception. Maritime insecurity threats and rising Chinese maritime capabilities are becoming threats for Japanese SLOC. Among these systemic pressures, rising Chinese maritime capabilities took priority when non-traditional security threats wended down. As a result, Prime Minister Shinzo Abe recognized the Indian Ocean's importance and saw cooperation with countries sharing similar values, such as India, as essential. India's strategic position and maritime capabilities were also considered to be an asset in securing sea lanes and counterbalancing China in the Indian Ocean. Furthermore, the main foreign policy executive, Prime Minister Abe, saw that India shared the same democratic values as Japan, which created a positive perception. These dynamics are in accordance with how neoclassical realism explains foreign policy formation. We can see that Prime Minister

Abe as the foreign policy executive, moderated systematic pressures and influence and shaped the Japanese decision to cooperate with India.

Due to its flexibility in explaining differing foreign policy, neoclassical realism as an analytical framework can be applied to different security cooperation. One such potential research is on Japan-United Kingdom security cooperation. Systemic pressure from China aligning with revisionist powers and the United Kingdom's economic interests in the region provided strong reasons to be involved in maintaining stability and security (Cleverly, 2022). As with India, the United Kingdom is a democratic country that is in line with Japan's strategy to build partnerships with countries that share the same values. However, compared to India's position as regional maritime power, the United Kingdom's military deployment in the region is too few to be effective. Considering these points, neoclassical realism can be utilized to explain the cooperation, demonstrating its utility as an analytical framework for cross-regional security cooperation.

Bibliography

- Abe, S. (2007). *MOFA: Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, at the Parliament of the Republic of India “Confluence of the Two Seas”* (August 22, 2007). <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>
- Abe, S. (2012, December 27). Asia's Democratic Security Diamond | by Abe Shinzō. Project Syndicate. <https://www.project-syndicate.org/magazine/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe>
- BBC News. (2018, December 11). *Somalia piracy: How foreign powers are tackling it.* <https://www.bbc.com/news/world-africa-46454055>
- Brewster, D. (2010). The India-Japan Security Relationship: An Enduring Security Partnership? *Asian Security*, 6(2), 95–120. <https://doi.org/10.1080/14799851003756550>
- Brewster, D. (2014). *India's ocean: The story of India's bid for regional leadership*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315815244>
- Caballero-Anthony, M. (2020). Security Governance and ASEAN's Political Security Community: Fragmented but Inclusive Security Communities? *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 13(1), 151–167. <https://doi.org/10.1007/s40647-019-00269-z>
- Cabinet Secretariat of Japan. (2013, December 17). National Security Strategy. *Cabinet Secretariat of Japan*. <https://www.cas.go.jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-e.pdf>
- Cabinet Secretariat of Japan. (2018). *Annual Report 2017 “Japan’s Actions against Piracy off the Coast of Somalia and in the Gulf of Aden.” Cabinet Secretariat of Japan*. <https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/siryou2/counter-piracy2017.pdf>
- Chand, B., & Garcia, Z. (2017). Power Politics and Securitization: The Emerging Indo-Japanese Nexus in Southeast Asia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4(2), 310–324. <https://doi.org/10.1002/app5.180>
- Chansoria, M. (2024, January 25). *Japan-India cooperation in the realm of defense and security* [Interview]. <https://www.frstrategie.org/en/programs/japan-program/japan-india-cooperation-realm-defense-and-security-2024>

China Military Online. (2021, December 27). *13 years on: PLA Navy continues escorting in Gulf of Aden—China Military*. China Military Online. http://eng.chinamil.com.cn/2022special/2021-12/27/content_10174080.htm

Cleverly, J. (2022, September 29). Indo-Pacific tilt: Foreign Secretary's speech, September 2022. GOV.UK <https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-james-cleverlys-speech-on-the-indo-pacific-tilt-september-2022>

Cooney, K. J. (2007). *Japan's foreign policy since 1945*. M.E. Sharpe, Inc.

Graham, E. (2006). *Japan's sea lane security, 1940 - 2004: A matter of life and death?* (1. publ). Routledge.

Henry, J., Center for Asian Studies, & Institut français des relations internationales (Ifri). (2016). China's military deployments in the Gulf of Aden: Anti-Piracy and Beyond. In *Asie. Visions: Vol. No. 89*. Ifri. https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/chinas_military_deployments_in_the_gulf_of_aden_antipiracy_and_beyond_4.pdf

Hindustan Times. (2007, June 30). India aiming to become maritime power: Pranab. Hindustan Times. <https://www.hindustantimes.com/kolkata/india-aiming-to-become-maritime-power-pranab/story-sDCNab50ZeJAAgUV5UfZVP.html>

Indian Navy. (2012, June 9). FIRST BILATERAL MARITIME EXERCISE BETWEEN INDIA AND JAPAN 'JIMEX 12' COMMENCED ON 09 JUN 12. https://web.archive.org/web/20140109235842/http://indiannavy.nic.in/sites/default/files/PRel_120609_JIMEX12_Indio-Japan-Ex.pdf

Ishibashi, N. (2018). Japan's policy toward India since 2000: For the sake of maintaining US leadership in East Asia. *The Pacific Review*, 31(4), 515–532. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1396355>

Jain, P. (2008). Westward Ho! Japan Eyes India Strategically. *Japanese Studies*, 28(1), 15–30. <https://doi.org/10.1080/10371390801939070>

Jain, P. (2010). Japan–India Relations: Peaks and Troughs. *The Round Table*, 99(409), 403–412. <https://doi.org/10.1080/00358533.2010.498977>

Joshi, Y., & Pant, H. V. (2015). Indo-Japanese Strategic Partnership and Power Transition in Asia. *India Review*, 14(3), 312–329. <https://doi.org/10.1080/14736489.2015.1066215>

Keerthiraj, & Sekiyama, T. (2023). The Rise of China and Evolving Defense Cooperation between India and Japan. *Social Sciences*, 12(6), 333. <https://doi.org/10.3390/socsci12060333>

Kotani, T. (2011). Lifeline at sea: Japan's policy toward the Indian Ocean Region. *Journal of the Indian Ocean Region*, 7(2), 220–234. <https://doi.org/10.1080/19480881.2011.637426>

Ladwig, W. C. (2009). Delhi's Pacific ambition: naval power, "Look East," and India's emerging influence in the Asia-Pacific. *Asian Security*, 5(2), 87–113. <https://doi.org/10.1080/14799850902886476>

Lamont, C. K. (2015). *Research methods in international relations (1st edition)*. Sage.

Lobell, S. E. (2009). Threat assessment, the state, and foreign policy: a neoclassical realist model. In Cambridge University Press eBooks (pp. 42–74). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511811869.002>

Maizland, L., & Cheng, N. (2021, November 4). The U.S.-Japan Security Alliance. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/backgrounder/us-japan-security-alliance>

Midford, P. (2000). Japan's leadership role in East Asian security multilateralism: The Nakayama proposal and the logic of reassurance. *The Pacific Review*, 13(3), 367–397. <https://doi.org/10.1080/09512740050147924>

Ministry of Defense of Japan. (2010). *Defense of Japan 2010*. https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2010/29Part3_Chapter1_Sec4.pdf

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2002). *Diplomatic Bluebook 2002*. <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2002/index.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2005, April 29). *MOFA: Japan-India Partnership in a New Asian Era: Strategic Orientation of Japan-India Global Partnership*. Ministry of Foreign Affairs of Japan. <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/partner0504.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2008, October 22). *Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and India*. https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8896781/www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/pmv0810/joint_d.html

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2009, December 29). *Action Plan to advance Security Cooperation based on the Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and India*. <https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8896781/www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/pmv0912/action.html>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2024, March 14). *Japan-India Relations (Basic Data)*. <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html>

Mukherjee, R. (2018). Japan's strategic outreach to India and the prospects of a Japan-India alliance. *International Affairs*, 94(4), 835–859. <https://doi.org/10.1093/ia/iiy030>

Panda, A. (2014, February 7). *Chinese Naval Exercise In Eastern Indian Ocean Sends Mixed Signals*. <https://thediplomat.com/2014/02/chinese-naval-exercise-in-eastern-indian-ocean-sends-mixed-signals/>

Panda, A. (2017, October 31). *India, Japan Begin Anti-Submarine Warfare Exercise in Arabian Sea*. <https://thediplomat.com/2017/10/india-japan-begin-anti-submarine-warfare-exercise-in-arabian-sea/>

Ranjeev, N. (2025, February 21). *Understanding India's Evolving Policy of Strategic Autonomy*. <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip25015-understanding-indias-evolving-policy-of-strategic-autonomy/>

ReCAAP ISC. (2024, June 4). *ReCAAP Data Visualisation Map and Panel*. <https://public.tableau.com/app/profile/recaap.isc/viz/ReCAAPDataVisualisationMapandPanelRe-VAMP/Overall>

Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1), 144–172. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>

Shaheen, N., & Mu, R. (2023). Elevated strategic partnership between India and Japan in the context of the rising power of China. *India Review*, 22(4), 433–462. <https://doi.org/10.1080/14736489.2023.2236465>

Solanki, V., & Togashi, M. (2022, May 23). *India and Japan enhance cooperation despite their differences*. IISS. <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2022/05/india-and-japan-enhance-cooperation-despite-their-differences/>

The Constitution of Japan. (n.d.). Retrieved October 11, 2024, from https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html

The New York Times. (2008, December 26). *China sends naval task force on anti-piracy mission*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2008/12/26/world/asia/26iht-beijing.1.18936740.html>

Ushirogata, K. (2025). *Global Maritime Military Strategy, 1980–2023*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-96-2399-0>

White, J. T. (2020, June). *China's Indian Ocean ambitions: Investment, influence, and military advantage*. Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/06/FP_20200615_chinas_indian_ocean_ambitions_white-1.pdf

Yoshimatsu, H. (2019). The Indo-Pacific in Japan's strategy towards India. *Contemporary Politics*, 25(4), 438–456. <https://doi.org/10.1080/13569775.2018.1556769>

Yoshimatsu, H. (2020). Partnership against the rising dragon? Japan's foreign policy towards India. *The Pacific Review*, 33(3–4), 608–634. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1563210>

Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis

Nabila Azzahra¹, Mohammad Ali Andrias¹, Faisal Fadila Noorikhsan ^{1*},
Komang Jaka Ferdian², La Ode Muhamad Muliawan²

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, 46115, Jawa Barat- Indonesia

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

Informasi Artikel:



CrossMark

Riwayat Publikasi:

Received: Feb 05, 2025

Accepted: Apr 25, 2025

Published: Jun 19, 2025

Kata Kunci:

Clientelism; Patronage; Village Head Election.

Penulis Koresponden:

Faisal Fadila Noorikhsan

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Siliwangi

Email:

faisal.fadilla@unsil.ac.id

Situs Cantuman:

Azzahra, N., Andrias, M. A.,
Noorikhsan, F. F., Ferdian, K. J. &
Muliawan, L. O. M. (2025).
Klientelisme dalam Pemilihan
Kepala Desa di Desa Purwadadi
Kabupaten Ciamis. *Journal of
Political Issues*, 7 (1); 71-86.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.321>

Lisensi dan Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)

Hak Cipta© 2025 dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Journal of
Political Issues

Abstrak

Abstract Markun Marhani, one of the regional political actors with a background as a former convict, is the oldest candidate, and has a lower educational background compared to other candidates, emerged as the winner in the Village Head Election in Purwadadi Village, Purwadadi District, Ciamis Regency in 2022. This victory is considered possible because there is a clientelism relationship in the village head election. To analyze this problem, the author conducted a study using the theory of patronage and clientelism put forward by Aspinall and Sukmajati supplemented by the concept of power elites. This study uses a qualitative research method with purposive sampling and snowball sampling informant determination techniques with source triangulation validity tests, through in-depth interview data collection techniques, observation, and documentation. The results of this study show that in order to win the Village Head Election in Purwadadi Village, Purwadadi District, Ciamis Regency for the 2022-2028 period, Marhani applied several variations in the form of patronage and clientelism that he carried out with the village political elite and the surrounding community. The forms of patronage and clientelism variations used are vote buying, individual gifts, and service and activities. In addition to using patronage and clientelism patterns as the main pattern, Marhani's success is supported by the political culture of the Purwadadi Village community which is at the level of subject political culture (kaula) driven by the pragmatism of the surrounding community.

Abstrak Markun Marhani salah satu aktor politik daerah yang memiliki background sebagai mantan narapidana, menjadi kandidat dengan usia paling tua, dan berlatar pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan calon lainnya, muncul sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2022. Kemenangan tersebut dianggap dapat terjadi karena terdapat hubungan klientelisme dalam pemilihan kepala desa. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis melakukan penelitian menggunakan teori patronase dan klientelisme yang dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati dilengkapi dengan konsep elit kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling dan snowball sampling dengan uji validitas triangulasi, melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan untuk mendapatkan pemenangannya dalam Pilkades Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Periode 2022-2028 Marhani menerapkan beberapa variasi bentuk patronase dan klientelisme yang ia lakukan dengan elit politik desa dan masyarakat sekitar. Bentuk variasi patronase dan klientelisme yang digunakan yaitu pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), serta pelayanan dan aktivitas (*service and activities*). Selain menggunakan pola patronase dan klientelisme sebagai pola utama, kesuksesan Marhani ditunjang dengan budaya politik masyarakat Desa Purwadadi yang berada pada taraf budaya politik subjek (*kaula*) dengan didorong sifat pragmatisme masyarakat sekitar.

Tentang Penulis:

Nabila Azzahra, penulis menyelesaikan studi S-1 di jurusan Ilmu Politik akulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi pada tahun 2024.

Muhammad Ali Andriyas. menyelesaikan Studi-3 di Pasca Sarjana Doktoral Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di jurusan Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.
Fasial Fadilla Noorikhsan. menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di jurusan Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

Komang Jaka Ferdian. Menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saat ini penulis merupakan Dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

La Ode Muhamad Muliawan. Menyelesaikan studi S-2 di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis merupakan Dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pendahuluan

Reformasi politik Indonesia pasca-1998 membuka peluang besar bagi pelaksanaan otonomi daerah secara lebih luas. Gerakan reformasi tidak semata bertujuan untuk mengakhiri rezim Soeharto, melainkan juga untuk mengubah sistem politik nasional dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik (Muqoyyidin, 2013). Selama era Orde Baru, model pemerintahan yang sentralistik dan bercorak militeristik menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat. Pemerintah pusat mendominasi sepenuhnya jalannya pemerintahan, menjadikan pemerintah daerah sekadar pelaksana kepentingan pusat tanpa memiliki daya tawar dalam merancang pembangunan daerahnya sendiri. Hubungan antara pusat dan daerah dibentuk dalam pola ketergantungan yang asimetris, di mana pemerintah pusat berperan sebagai pemegang kekuasaan utama, bukan sebagai fasilitator demokrasi. Situasi ini memicu lahirnya gagasan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bagian dari agenda reformasi politik yang diperjuangkan oleh berbagai aktor reformis (Dwipayana, 2009; Komara, 2015).

Memasuki masa reformasi, pemerintahan Indonesia memasuki era baru dalam mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Kemunculan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi cikal terlaksananya otonomi daerah sampai ke akar rumput. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan langsung oleh penduduk desa. Pasal tersebut memberikan legitimasi yang kuat terkait dengan pemilihan kepala desa secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Wahyono, 2015; Nurhasim, M, 2010). Hal ini terjadi sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah pusat terhadap keberadaan desa itu sendiri, dimana desa sebagai bagian dari unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beda halnya dengan kelurahan, sebagai sistem pemerintahan yang setingkat dengan desa, kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah dipilih tidak melalui sistem pemilihan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, bahwa seorang Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Camat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan yang merupakan wilayah kerja administratif di bawah kecamatan secara langsung. Sehingga dalam pelaksanaannya kelurahan sangat terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Berbeda dengan pemerintahan desa yang memiliki keleluasaan penuh untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (Nur Ainuna, 2021).

Desa merupakan suatu wilayah yang diisi oleh kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kebutuhan, prakarsa, usul dan pandangan masyarakat setempat berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai bentuk bagian pemerintahan terkecil serta merupakan unsur pemerintahan paling bawah dari suatu negara yang merupakan

unsur terpenting dari terselenggaranya Negara Indonesia. Desa dapat dikatakan sebagai miniatur negara, karena penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan batasan-batasan yang telah diatur melalui otonomi daerah. Pemerintahan desa dijalankan dan dinahkodai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ([Cindy, 2022](#)).

Kepala Desa merupakan sosok yang memiliki andil penting dalam terselenggaranya pemerintahan desa. Kepala Desa harus mampu mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi kultur masyarakat setempat dan harus sesuai kondisi geografis di wilayahnya. Kepala Desa juga harus mempunyai *management* konflik yang baik agar mampu membina keharmonisan antar masyarakat desa. Keberhasilan dalam menjaga keharmonisan masyarakat harus didukung dengan kemampuan dalam bersosial yang harus tinggi. Kemampuan pengelolaan sumberdaya merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa guna menyokong terciptanya iklim ekonomi yang baik di lingkungan desa tersebut. Oleh karena itu, sangat penting memilih sosok Kepala desa yang tepat. Pemilihan ini disebut dengan pilkades ([Leda, 2023](#)).

Pilkades bukan saja menyoal memilih atau berinteraksi suara saja, tetapi banyak hal yang dipertaruhkan seperti harkat, martabat, gengsi, dan juga berbagai macam siasat yang dipertaruhkan untuk menjadi sosok Pemimpin Desa. Kondisi desa yang sudah menjadi sebuah miniatur negara menjadikan desa sebagai poros kontestasi politik yang bergengsi. Hal ini terjadi karena masyarakat desa sudah pandai dalam berpolitik sehingga kesadaran akan perebutan kekuasaan terbilang tinggi ([Andhika, 2019](#)). Adanya sebuah kontestasi dalam suatu pemilihan, menunjukkan kepemimpinan desa bukan hanya sekedar jabatan administratif melainkan menjadi sosok yang sangat diakui oleh masyarakat desa sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki pengaruh dalam menjalankan demokratisasi desa ([Rohman, 2016](#)).

Sejalan dengan pernyataan diatas, penyelenggaraan pilkades selalu memiliki keunikan tersendiri untuk diteliti. Salah satu peristiwa unik terjadi dalam Pilkades Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2022. Pada tahun tersebut terselenggara Pilkades Serentak di Kabupaten ciamis yang dilaksanakan di 73 Desa, salah satu desa diantaranya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang pernah menjadi seorang narapidana. Ditengah banyak sekali penolakan dan respon kurang baik dari masyarakat terhadap Calon Pejabat dengan latar belakang mantan narapidana, bahkan di daerah lain tak jarang sampai memicu munculnya gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan penolakan terhadap Calon Pejabat mantan narapidana, Namun, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Ciamis ([Dewi, 2019](#)).

Desa Purwadadi yang merupakan salah satu desa dari 73 desa lainnya di Kabupaten Ciamis menyelenggarakan pilkades serentak pada tahun 2022. Ada peristiwa menarik terjadi di Desa ini yang layak untuk diteliti. Bagaimana tidak, ditengah-tengah tingginya kasus pandemi covid-19 minat berkongestasi dalam pilkades di Desa Purwadadi sangat tinggi. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Pilkades tercatat tujuh orang warga mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa. Dari ketujuh calon tersebut diseleksi hingga memunculkan lima orang Calon Kepala Desa yang salah satunya merupakan seorang mantan narapidana kasus korupsi. Informasi tersebut penulis dapatkan dari wawancara dengan salah satu warga Desa Purwadadi. Informan tersebut memberikan informasi bahwa pilkades Desa Purwadadi tahun 2022 dimenangkan oleh sosok mantan narapidana yang bernama Markun Marhani. Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2022 Markun Marhani telah mengikuti pilkades sebanyak 3 (tiga) kali. Pada tahun 1989 Marhani memenangkan pilkades, ia hanya menjabat selama 2 (dua) tahun. Di tahun 1991 ia dilengserkan karena terjerat kasus pidana, yang mengharuskan dirinya dipenjara. Di tahun 2016 ia mencalonkan diri kembali menjadi Calon Kepala Desa, namun ia mengalami kekalahan. Di tahun 2022, ia mencalonkan kembali dan berhasil memenangkan pilkades. Padahal ditahun itu persaingan terbilang ketat, dimana Marhani harus melawan *incumbent*, saingan politiknya memiliki *background* pendidikan lebih tinggi, dan usia Marhani yang sudah tidak lagi muda, pada saat mencalonkan dia berusia 73 tahun, sebagai kontestan dengan usia

paling banyak. Namun demikian, Marhani mampu memenangkan kontestasi pilkades dengan perolehan suara gemilang, dengan *detail* jumlah perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara Pilkades Desa Purwadadi Tahun 2022

Nama Calon Kepala Desa	Pendidikan Terakhir	Nomor Urut	Perolehan Suara
Markun Marhani	SLTA/Sederajat	1	993
Elon Sutendi	SLTA/Sederajat	2	331
Sarji	SLTA/Sederajat	3	156
Tumaryo	S1	4	321
Dede Suarno	S1	5	801

Sumber :koransinarpagijuara.com

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Markun Marhani memperoleh 993 suara. Hal ini mampu mengalahkan *incumbent* atas nama Elon Sutendi dengan selisih suara yang cukup besar yaitu sejumlah 662 suara. Marhani juga mampu mengalahkan Dede Suarno sebagai calon yang memiliki *background* pendidikan yang lebih baik darinya dengan selisih suara 192 suara. Lebih menarik mana kala perolehan suara Marhani diatas perolehan suara Tumaryo dengan selisih 672 suara dengan demikian mampu mengalahkan Tumaryo yang memiliki *background* pendidikan yang lebih baik dari Marhani. Bahkan Tumaryo sebagai kontestan memiliki kelebihan dibidang hukum, dimana dalam bidang tersebut menjadi kekurangan Marhani.

Selain itu, jika dibandingkan dengan kontestan lainnya Marhani merupakan calon dengan *background* pendidikan yang terbilang rendah. Dari kelima calon terdapat dua calon yang merupakan lulusan sarjana, yaitu Tumaryo yang merupakan seorang sarjana hukum dan Dede Suarno selaku sarjana sastra. Selain itu, Marhani mampu mengalahkan *incumbent* atas nama Elon Sutendi dengan selisih perolehan suara yang cukup banyak. Marhani sebagai calon nomor urut 1 mampu memenangkan pilkades dengan perolehan suara 993 suara dari total suara 2.602 suara. Berdasarkan penelitian awal bahwa kemenangan Marhani adalah bentuk patronase dan klientelisme yang dijalankan oleh berbagai pihak. Muncul sebagai asumsi awal yang kemudian menjadi topik yang akan dibahas dalam artikel ini.

Landasan Teoritik

Patronase dan Klientelisme

Terdapat kesesuaian antara realitas di lapangan dengan deskripsi mengenai patronase dan klientelisme yang diungkapkan Aspinall dan Berenschot (2019) yang menyatakan bahwa patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan antar politikus guna menyebarluaskan sesuatu kepada pemilih guna mendapatkan dukungan. Keuntungan yang dimaksud bisa berupa uang, barang, jasa, janji-janji atau proyek-proyek lainnya. Keuntungan tersebut bisa didistribusikan kepada perorangan maupun kelompok. Menurut Hicken (2011) yang dikutip dari buku Patronase dan Klientelisme dalam Pemilu Legislatif 2014 menyebutkan bahwa dalam klientelisme mengandung tiga hal penting yaitu pertama kontingensi atau timbal balik antara patron dan klien, kedua hierarkis dimana terdapat ketidak seimbangan antara patron dan klien yang menitik beratkan pada relasi kuasa antar keduanya, dan ketiga pengulangan hubungan klientelistik ini akan berlangsung terus-menerus (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Dalam praktik politik elektoral di Indonesia, terdapat lima bentuk utama patronase dan klientelisme yang kerap diterapkan. Pertama, *vote buying*, yaitu pembagian uang tunai atau barang kepada pemilih secara langsung menjelang hari pencoblosan, umumnya melalui jaringan tim sukses yang terstruktur. Kedua, *individual gifts*, berupa pemberian barang-barang kecil atau konsumsi seperti makanan, rokok, atau suvenir yang disampaikan saat kunjungan kampanye. Ketiga, *services and activities*, meliputi keterlibatan kandidat dalam kegiatan sosial

seperti acara keagamaan, olahraga, atau layanan kesehatan, yang bertujuan membangun kedekatan dan loyalitas. Keempat, *club goods*, yakni pemberian yang ditujukan untuk kelompok tertentu, seperti bantuan renovasi fasilitas umum atau tempat ibadah, guna membangun dukungan kolektif. Kelima, *pork barrel projects*, berupa janji proyek pembangunan publik yang dananya bersumber dari anggaran negara, sering dimanfaatkan oleh kandidat petahana untuk mengonsolidasikan basis dukungan (Muhtadi, 2013; Aspinall & Sukmajati, 2015; Oktaviano, 2017)

Elit Politik dan Kekuasaan

Kesesuaian realitas di lapangan dengan deskripsi-deskripsi yang diutarakan Lasswell mendorong penulis untuk mengkaji menggunakan definisi elit menurut Lasswell. Lasswell mendefinisikan elit sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari umumnya orang lain miliki (Lasswell, 2011). Sementara Sartono menjelaskan bahwa elit merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dan mampu memberikan pengaruh dan menentukan kehidupan serta perubahan pada masyarakat (Nugroho, 2022). Dalam teori elit yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca dijelaskan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kategori, pertama dia yang memiliki kemampuan sehingga memiliki probabilitas yang tinggi untuk memimpin dan menentukan arah mereka yang menduduki posisi ini berjumlah kecil dan kedua ada kategori masyarakat yang tidak memiliki kemampuan sehingga ia hanya mampu diperintah oleh masyarakat lain (Gunawan, 2019). Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ini lah yang dikenal sebagai elit dalam masyarakat (Budiardjo, 2008). Seiring dengan berjalannya waktu elit penguasa ini dapat diruntuhkan oleh elit-elit baru yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan tetapi memiliki basis masa yang kuat yang biasa disebut dengan istilah elit penantang. Namun, elit penantang ini tidak memiliki kontrol atas elit kekuasaan, karena basis kekuatan yang ia miliki yaitu masa tidak mampu berperan lebih dalam penentuan politik kekuasaan (Chalik, 2017).

Para elit melanggengkan pengaruhnya melalui kekuasaan. Menurut Max Weber kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan bahkan mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti kemauannya, dengan menerapkan melalui berbagai macam tindakan dari orang-orang tersebut (Haryanto, 2009; Haryono, 2017). Dalam artian ini kekuasaan dapat dilakukan dengan memberikan paksaan dari yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan selalu ada dalam setiap lapisan masyarakat, namun kekuasaan tersebut tidak bisa dibagi rata kepada seluruh lapisan masyarakat. Kekuasaan didapatkan dari berbagai macam sumber menurut JRP French dan Bertram Raven sumber kekuasaan ada lima yaitu *legitimate power* (pengangkatan), *coersive power* (kekerasan), *expert power* (keahlian), *reward power* (pemberian), dan *reverent power* (daya tarik) (Andri, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam menggunakan teknik *purposive sampling* penulis menentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh informan, adapun kriterianya sebagai berikut: *pertama* informan merupakan tokoh kunci yang terlibat secara langsung dalam peristiwa; *kedua* informan terdiri dari beberapa elemen sumber informasi seperti patron, klien, broker, lawan politik, dan masyarakat; *ketiga* informan merupakan orang yang memahami betul peristiwa. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara tidak terstruktur dengan 11 informan, observasi selama 3 bulan, dan studi dokumentasi yang berasal dari data panitia pelaksana pilkades 2022. Proses analisis data menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilengkapi dengan uji validitas data triangulasi sumber, teknik dan waktu (Sugiyono, 2017; Hadisaputra, 2020; Komariah, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Budaya Poliik Subjek (Kaula) dan Masyarakat Pragmatis dalam Pemilihan Kepala Desa
Keberhasilan pola politik patronase dan klientelisme yang dijalankan oleh Markun Marhani dalam memenangkan Pilkades Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis periode 2022–2028 tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya politik subjek (kaula) dan karakter pragmatis masyarakat setempat. Dalam pandangan Almond dan Verba (1990), budaya politik mencerminkan sikap individu terhadap sistem politik beserta elemennya, serta terhadap peran yang dijalankan dalam sistem tersebut. Orientasi budaya politik terbagi menjadi tiga dimensi utama, yakni kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif berkaitan dengan pemahaman dan keyakinan terhadap sistem politik dan atribut-atributnya, yang mencirikan budaya politik parokial. Orientasi afektif merujuk pada keterikatan emosional individu terhadap sistem politik, yang merupakan ciri utama budaya politik subjek. Sementara itu, orientasi evaluatif berkaitan dengan kemampuan individu dalam memberikan penilaian terhadap sistem politik yang berjalan, dan menjadi ciri dari budaya politik partisipan (Kartiwa, 2013).

Dalam konteks tersebut, masyarakat Desa Purwadadi dapat dikategorikan memiliki budaya politik subjek (kaula), yang ditandai dengan orientasi politik yang bersifat emosional dan afektif. Kecenderungan ini tampak dari sikap sebagian warga yang dengan mudah memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Markun Marhani pada periode kepemimpinan sebelumnya. Kesalahan tersebut tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik pada Pilkades tahun 2022 hingga 2028. Sejumlah warga berpendapat bahwa selama prospek kepemimpinan ke depan dinilai menjanjikan, maka kesalahan di masa lalu bukanlah hal yang relevan untuk dipermasalahkan. Bahkan terdapat pandangan bahwa kesalahan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat secara langsung, melainkan negara sebagai entitas abstrak, sehingga tidak dianggap sebagai hambatan bagi calon untuk maju kembali. Selain itu, selama hukuman yang dijalani belum mencapai lima tahun dan hak pilih tidak dicabut secara hukum, maka masyarakat menganggap tidak ada alasan untuk menolak pencalonan tersebut. Sikap ini menunjukkan absennya evaluasi politik secara kritis, sekaligus memperkuat karakter budaya politik subjek yang lebih menekankan loyalitas personal dan pemberanakan normatif daripada penilaian rasional terhadap integritas calon.

Preferensi politik masyarakat Desa Purwadadi dalam pemilihan kepala desa cenderung didasarkan pada perasaan pribadi terhadap calon, tanpa mempertimbangkan visi, misi, atau program kerja yang ditawarkan. Pilihan politik lebih dipengaruhi oleh kedekatan emosional atau simpati terhadap figur tertentu, bukan pada penilaian rasional terhadap kapasitas kepemimpinan atau agenda pembangunan. Sejumlah warga menyatakan bahwa ketertarikan mereka terhadap calon tidak dilandasi oleh pemahaman terhadap gagasan atau rencana kerja calon tersebut. Bahkan terdapat pengakuan bahwa sebagian pemilih sama sekali tidak mengetahui visi dan misi calon yang dipilih, karena keputusan memilih didasarkan semata-mata pada rasa suka secara personal. Fenomena ini semakin memperkuat karakter budaya politik subjek di mana keterlibatan politik masyarakat tidak diarahkan pada pertimbangan substantif, melainkan pada afeksi emosional yang bersifat spontan dan tidak kritis.

Selain faktor afektif, karakter pragmatis masyarakat Desa Purwadadi turut memperkuat keberhasilan praktik patronase dan klientelisme dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat yang pragmatis cenderung memandang politik dari sudut pandang keuntungan material yang dapat diperoleh secara langsung, tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan desa. Dalam situasi ini, pemberian dari calon kepala desa, baik dalam bentuk uang maupun barang, diterima sebagai bagian dari transaksi politik yang dianggap wajar. Pemberian tersebut kemudian ditukar dengan suara pemilih, menjadikan logika pertukaran sebagai fondasi utama dalam relasi politik (Sulistiwati, 2018). Seorang calon kepala desa menggambarkan bahwa tingkat pragmatisme masyarakat sangat tinggi, dengan

estimasi sekitar 60 hingga 70 persen pemilih lebih dipengaruhi oleh orientasi emosional dan material, sementara hanya sebagian kecil yang mengambil keputusan secara rasional dan berbasis pada program kerja. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pilihan politik di tingkat desa lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi pragmatis ketimbang pertimbangan rasional-intelektual, yang pada akhirnya memperkuat praktik klientelisme sebagai strategi dominan dalam kontestasi lokal.

Penjelasan mengenai tingginya tingkat pragmatisme masyarakat Desa Purwadadi sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa praktik jual beli suara telah menjadi bagian yang lumrah dalam proses pemilihan kepala desa. Dalam pandangan sebagian warga, pertukaran suara dengan uang tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan atau praktik suap, melainkan sebagai transaksi yang setara antara calon dan pemilih. Masyarakat cenderung memaknai pemberian dari calon sebagai bagian dari "pembelian hak suara," dan keputusan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut bergantung pada nilai yang ditawarkan. Jika jumlah yang diberikan dianggap sesuai, suara akan diberikan kepada calon tersebut; namun jika dinilai tidak layak, tawaran akan ditolak. Logika pasar seperti ini memperlihatkan bagaimana relasi politik dikomodifikasi dan direduksi menjadi hubungan transaksional yang pragmatis, sekaligus memperkuat struktur klientelistik dalam kontestasi lokal.

Kemenangan Sosok Mantan Narapidana dalam Kontestasi Politik

Markun Marhani merupakan calon kepala desa yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kontroversial, namun berhasil memenangkan kembali kontestasi politik dalam Pilkades Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis periode 2022–2028. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa Purwadadi pada periode 1989 hingga 1991. Masa jabatannya yang singkat disebabkan oleh keterlibatannya dalam kasus pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD), di mana saat itu ia juga menjabat sebagai Kepala KUD. Akibat dari kasus tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan secara otomatis diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan keterangan dari informan, latar belakang hukum ini telah menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat, meskipun pada akhirnya tidak menjadi faktor yang menghalangi kemenangannya dalam Pilkades terbaru.

Kasus korupsi yang menimpa Markun Marhani terjadi ketika ia menjabat sebagai Kepala Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak di sektor kelistrikan. Dalam masa kepemimpinannya, terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan koperasi yang berujung pada proses hukum. Akibat dari kasus tersebut, ia diberhentikan dari jabatannya dan harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun. Selain itu, sejumlah aset pribadinya, termasuk yang disimpan di Bank BRI, turut disita oleh pihak berwenang. Dalam penuturnya, Marhani mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan korupsi dan menyebut kasus tersebut sebagai bentuk fitnah yang menjeratnya secara tidak adil. Kendati demikian, proses hukum tetap berjalan dan berimplikasi langsung terhadap status politik dan sosialnya saat itu.

Sebelum berhasil memenangkan Pilkades Desa Purwadadi tahun 2022, Markun Marhani sempat mengalami kekalahan pada pencalonannya di tahun 2016. Pada saat itu, ia bersaing dengan empat kandidat lain dan gagal memperoleh dukungan mayoritas. Kekalahan tersebut dipengaruhi oleh absennya dukungan dari elite desa, serta kuatnya memori kolektif masyarakat atas latar belakang kasus hukum yang pernah menjeratnya. Namun, situasi berubah pada kontestasi tahun 2022, di mana Marhani membangun jaringan patronase dan relasi klientelistik dengan elite lokal sebagai strategi untuk menghapus jejak masa lalunya dari ruang ingatan politik masyarakat. Dalam kampanye politiknya, ia bersama pendukung utamanya secara aktif menonjolkan capaian-capaian positif selama masa kepemimpinannya terdahulu, seperti pembangunan pasar dan akses listrik ke desa. Aspek ini dijadikan narasi utama untuk membentuk citra baru yang lebih positif. Sementara itu, kasus korupsi yang pernah menyeretnya sengaja dikesampingkan dari diskursus publik, dengan harapan agar masyarakat hanya fokus pada keberhasilan dan kontribusi nyatanya di masa lalu.

Selain itu, di tengah persaingan yang cukup kompetitif, Markun Marhani tetap berhasil memenangkan kontestasi dengan hasil yang signifikan. Padahal, jika ditinjau dari aspek latar belakang pendidikan, dua dari empat lawan politiknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding dirinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan bukanlah penentu utama dalam preferensi politik masyarakat Desa Purwadadi. Sebagai perbandingan, kualifikasi pendidikan kelima calon kepala desa pada Pilkades Purwadadi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2 Background Pendidikan Terakhir Calon Kepala Desa Purwadadi dalam Pilkades Tahun 2022

No. Urut	Nama Calon	Pendidikan Terakhir
1.	Markun Marhani	SLTA/Sederajat
2.	Elon Sutendi	SLTA/Sederajat
3.	Sarji	SLTA/Sederajat
4.	Tumaryo	S1/Strata Satu
5.	Dede Suarno	S1/Strata Satu

Sumber: Data Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwadadi

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa calon kepala desa dengan nomor urut 4 dan 5 memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Markun Marhani. Sementara calon lain umumnya menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi, Marhani hanya menyelesaikan pendidikan setara SLTA melalui jalur persamaan. Salah satu informan menjelaskan bahwa ijazah yang dimiliki Marhani diperoleh melalui program penyetaraan, bukan melalui jalur pendidikan formal reguler sebagaimana lazimnya. Kondisi ini mempertegas bahwa keunggulan elektoral Marhani tidak bertumpu pada aspek pendidikan formal, melainkan pada faktor lain seperti hubungan patronase, citra kepemimpinan masa lalu, dan strategi pengaburan isu negatif.

Jika dianalisis dari aspek yuridis, latar belakang pendidikan setara SLTA yang dimiliki oleh Markun Marhani tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, syarat minimal pendidikan bagi calon kepala desa adalah ijazah SLTP atau sederajat. Dengan demikian, secara legal-formal, kualifikasi pendidikan Marhani telah memenuhi persyaratan pencalonan. Meskipun demikian, dalam konteks kualitas kepemimpinan, jenjang pendidikan yang lebih tinggi sering kali diasosiasikan dengan kapasitas intelektual dan kapabilitas administratif yang lebih baik. Hal ini tercermin dalam hasil seleksi bakal calon kepala desa Purwadadi tahun 2022, yang memperlihatkan korelasi antara latar belakang pendidikan dan skor seleksi yang diperoleh. Adapun rincian nilai hasil seleksi para calon dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Nilai Hasil Tes Tulis Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Purwadadi dalam Pilkades Desa Purwadadi Periode 2022-2028

No. Urut	Nama Calon	Hasil Akhir
-------------	------------	-------------

**(Tes Tulis + Penelitian
Dokumen)**

1.	Markun Marhani	56
2.	Elon Sutendi	58
3.	Sarji	78
4.	Tumaryo	57
5.	Dede Suarno	56

Sumber: Data Panitia Pemilihan Kepala Desa Purwadadi

Namun demikian, dengan *track record* yang kontroversial, Marhani tetap mampu memenangkan kontestasi Pilkades dan bahkan berhasil mengalahkan calon *incumbent* atas nama Elon Sutendi. Dalam konteks politik elektoral, keberadaan seorang *incumbent* dalam suatu kontestasi umumnya dianggap sebagai tantangan besar bagi kandidat penantang. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan setidaknya tiga jenis modal utama yang melekat pada posisi *incumbent*. Pertama, modal sosial, yaitu hasil dari relasi yang dibangun melalui interaksi langsung dan intens dengan masyarakat selama masa jabatan sebelumnya, yang memungkinkan terbentuknya jaringan dukungan yang loyal. Kedua, modal ekonomi, di mana sponsor atau pendukung finansial cenderung lebih tertarik untuk mendukung *incumbent* karena dianggap memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Ketiga, legitimasi politik, di mana pencapaian sekecil apa pun yang berhasil diraih selama masa kepemimpinan dapat dikapitalisasi sebagai simbol keberhasilan dan dijadikan alat untuk membentuk opini publik yang positif. Namun, dalam konteks Pilkades Purwadadi, keunggulan struktural yang dimiliki oleh *incumbent* tidak cukup untuk membendung kekuatan patronase dan strategi klientelistik yang dibangun oleh Marhani. ([Bulqiyah dan Musrifah, 2022](#)).

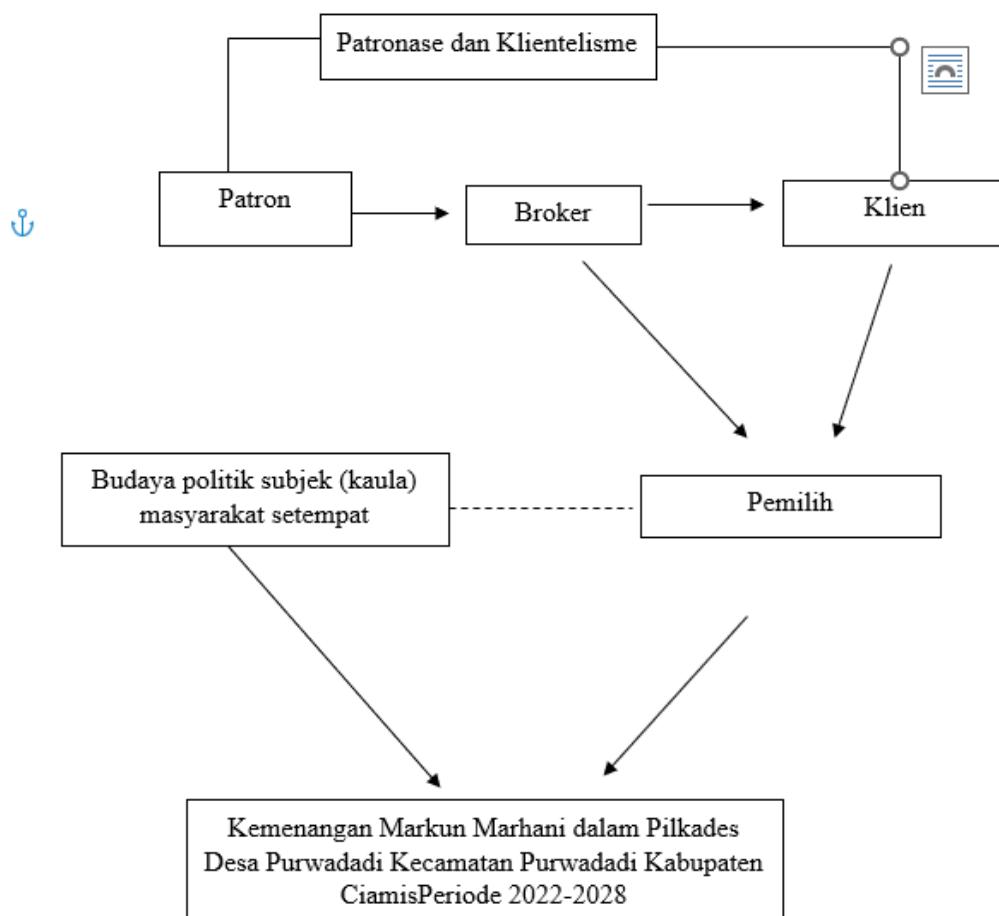
Klientelistik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Periode 2022-2028

Dalam kontestasi Pilkades Desa Purwadadi periode 2022–2028, Markun Marhani mengadopsi pola patronase dan *clientelism* sebagai strategi politik utama dalam meraih kemenangan. Pendekatan ini dijalankan melalui pembentukan jaringan hubungan klientelistik yang melibatkan dua tingkatan utama, yakni elite politik lokal dan masyarakat desa. Hubungan dengan elite dibangun melalui perantara atau *broker*, yang bertugas menjembatani komunikasi dan memastikan aliran dukungan dari aktor-aktor strategis di tingkat desa. Di sisi lain, hubungan dengan masyarakat dibentuk secara langsung maupun tidak langsung, juga dengan bantuan *broker* sebagai penghubung distribusi sumber daya dan janji-janji politik. Dalam praktiknya, Marhani menempati dua peran sekaligus dalam struktur klientelisme: sebagai *client* ketika menjalin kedekatan dan ketergantungan pada elite politik lokal, serta sebagai *patron* dalam menjalin relasi pertukaran dengan masyarakat pemilih di tingkat akar rumput. Posisi ganda ini menunjukkan fleksibilitas strategis dalam memanfaatkan struktur sosial dan relasi kekuasaan demi mengonsolidasikan dukungan elektoral.

Relasi politik yang dibangun oleh Markun Marhani dalam kontestasi Pilkades tidak bersifat tunggal, melainkan dijalankan melalui beragam variasi bentuk patronase dan *clientelism*. Mengacu pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Aspinall dan Berenschot ([2019](#)) terdapat lima bentuk utama praktik klientelisme dalam politik elektoral Indonesia, yakni *vote buying* (pembelian suara), *individual gifts* (pemberian pribadi), *services and activities* (pelayanan dan aktivitas), *club goods* (barang-barang kelompok), serta *pork barrel projects* (proyek-proyek gentong babi). Dalam kasus Pilkades Purwadadi, tiga dari lima variasi tersebut secara nyata diadopsi dalam strategi pemenangan yang dijalankan oleh Marhani. Dalam relasinya dengan elite lokal, bentuk yang paling menonjol adalah *vote buying*, yang digunakan sebagai alat negosiasi dukungan politik dan logistik. Sementara itu, dalam hubungan dengan masyarakat, pola klientelisme diwujudkan melalui kombinasi antara *vote buying*, *individual gifts*, serta *services and activities* yang bersifat langsung dan personal. Pola ini menunjukkan

bahwa pendekatan klientelistik yang diterapkan bersifat adaptif terhadap karakteristik relasi dan kepentingan masing-masing aktor yang terlibat, baik di tingkat elite maupun akar rumput.

Selain memanfaatkan patronase dan *clientelism*, keberhasilan Markun Marhani dalam Pilkades Desa Purwadadi periode 2022–2028 juga sangat dipengaruhi oleh karakter budaya politik masyarakat setempat, yang cenderung berada pada tingkat budaya politik subjek (*subject political culture*). Gabriel Almond dan Sidney Verba (Almond & Verba, 1990) membagi budaya politik ke dalam tiga tipe utama, yaitu budaya politik parokial (*parochial*), budaya politik subjek (*subject*), dan budaya politik partisipan (*participant*). Dalam konteks Desa Purwadadi, masyarakat menunjukkan ciri khas budaya politik subjek, di mana keterlibatan dalam politik lebih bersifat pasif, afektif, dan tunduk pada otoritas tanpa evaluasi kritis. Dalam lingkungan politik seperti ini, praktik klientelistik menjadi lebih mudah diterima karena pemilih cenderung loyal terhadap figur yang dianggap dekat atau memberi manfaat langsung, tanpa mempertimbangkan secara rasional visi, misi, atau rekam jejak calon. Berdasarkan hal tersebut, pola politik yang dijalankan oleh Markun Marhani dalam Pilkades dapat digambarkan sebagai perpaduan antara strategi klientelistik dan konteks budaya politik subjek yang memperkuat daya terima masyarakat terhadap relasi pertukaran non-programmatik. Dengan demikian dapat digambarkan pola politik Markun Marhani dalam Pilkades Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Periode 2022-2028 sebagai berikut:



Gambar 1 pola politik Markun Marhani dalam Pilkades Desa Purwadadi

Sumber: Data olahan penulis

Dalam pola politik klientelistik yang diterapkan oleh Markun Marhani, setiap aktor memainkan peran yang berbeda sesuai dengan posisi mereka dalam struktur relasi patron-klien. *Patron* bertugas menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendanai

kampanye, sebagai bagian dari upaya mempertahankan pengaruh politik di wilayah tersebut. Selain itu, peran ini juga berkaitan dengan kepentingan jangka menengah, yakni mengamankan basis konstituen untuk persiapan menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. Di sisi lain, *broker* berperan sebagai penghubung antara *patron* dan *client*, dengan tugas utama menjembatani komunikasi dan memastikan distribusi sumber daya secara tepat sasaran (Rohman, 2016). Dalam konteks ini, hubungan antara *patron* dan *client* tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui perantara *broker* yang memiliki kedekatan sosial dengan komunitas lokal. Salah satu informan menyatakan bahwa keberhasilan Marhani dalam Pilkades sangat ditentukan oleh dukungan elite lokal, yang menjadi kekuatan utama dalam mengkonsolidasikan suara pemilih. Tanpa sokongan dari elite tersebut, peluang kemenangan Marhani dinilai akan sangat kecil.

Berikut merupakan variasi bentuk patronase dan klientelisme yang ditemukan dalam kontestasi politik diatas:

1. Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Dalam upaya memenangkan Pilkades Desa Purwadadi periode 2022–2028, Markun Marhani secara aktif menerapkan strategi pembelian suara atau *vote buying* sebagai instrumen utama dalam membangun basis dukungan elektoral. Strategi ini dijalankan melalui pendistribusian uang tunai kepada para pemilih secara sistematis, dengan pelaksanaan yang dimulai beberapa hari sebelum hari pemungutan suara dan berlanjut hingga hari pemilihan berlangsung. Distribusi dilakukan dengan pengaturan yang terencana, baik melalui kontak langsung maupun melalui perantara yang dipercaya.

Tujuan utama dari praktik *vote buying* adalah menciptakan relasi timbal balik antara kandidat dan pemilih, di mana pemberian uang dipersepsi sebagai kontrak informal yang mengikat secara moral agar penerima memberikan suaranya kepada kandidat yang memberi. *Vote buying* merupakan salah satu bentuk *clientelism* yang paling lazim dalam praktik politik elektoral di Indonesia, karena sifatnya yang langsung, praktis, dan mampu memobilisasi dukungan di luar kerangka programmatik (Aspinall & Sukmajati, 2015; Muhtadi, 2013). Dalam konteks Desa Purwadadi, praktik ini menegaskan bagaimana suara politik telah dikomodifikasi dan dipertukarkan dalam logika pasar elektoral yang bersifat transaksional.

Dalam praktik *vote buying* yang dijalankan, Markun Marhani tidak hanya berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, tetapi juga membangun hubungan klientelistik dengan elite politik lokal. Dalam struktur relasi ini, Marhani menempati posisi sebagai *client* yang bergantung pada dukungan sumber daya dan jaringan politik dari para elite, yang berfungsi sebagai *patron*. Sementara masyarakat berperan sebagai penerima akhir dalam skema pertukaran suara yang telah dirancang. Pola hubungan ini tidak berjalan secara langsung, melainkan dimediasi oleh kehadiran seorang *broker* yang memiliki kapabilitas strategis dalam mengelola distribusi insentif politik dan menjembatani kepentingan antara *patron*, *client*, dan pemilih. Salah satu informan menyebutkan bahwa keberhasilan Marhani dalam meraih kemenangan sangat dipengaruhi oleh peran *broker* yang dianggap memiliki kompetensi tinggi dalam mengatur strategi politik secara teknis di lapangan. Peran sentral *broker* ini memperlihatkan bahwa efektivitas *vote buying* bergantung pada kualitas aktor perantara yang mampu mengelola relasi kekuasaan secara efisien dan tersembunyi.

Proses *vote buying* yang melibatkan elite politik setempat tidak semata ditujukan untuk memenangkan kontestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan elite di tingkat lokal. Dukungan yang diberikan kepada Markun Marhani oleh kalangan elite bukan hanya bersifat elektoral, tetapi juga bersifat simbolik dan strategis. Beberapa tokoh yang berada di belakang pencalonan Marhani

merupakan figur yang saat itu tengah memiliki pengaruh kuat dan popularitas tinggi di mata masyarakat. Salah satu informan mengungkapkan bahwa kemenangan Marhani tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan personalnya, melainkan oleh kekuatan aktor di baliknya, yang secara sosial dan politik sedang berada di puncak penerimaan publik. Dalam konteks ini, pemilih lebih melihat siapa yang mendukung Marhani ketimbang menilai langsung sosok Marhani itu sendiri. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam praktik *clientelism*, kekuasaan tidak hanya dibangun melalui transaksi material, tetapi juga melalui afiliasi simbolik dengan aktor-aktor dominan yang berperan sebagai *king maker* dalam dinamika politik lokal.

Secara teknis, praktik *vote buying* yang dijalankan oleh *broker* pada hari pemungutan suara dikenal luas dengan istilah *serangan fajar*. Taktik ini merujuk pada pemberian uang tunai kepada pemilih yang dilakukan sejak waktu subuh hingga pagi hari, tepat pada hari pelaksanaan pemilihan (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam konteks Pilkades Purwadadi, metode ini diimplementasikan dengan mendistribusikan uang dalam kisaran Rp50.000 hingga Rp200.000 per orang, tergantung pada kedekatan sosial dan nilai strategis suara yang dimiliki. Salah satu warga menyatakan bahwa distribusi uang dilakukan hingga pukul delapan pagi oleh pengurus lingkungan setempat, dalam hal ini ketua RT, yang bertindak sebagai eksekutor distribusi. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa *vote buying* tidak hanya terorganisasi dengan baik, tetapi juga melibatkan struktur mikro-komunitas dalam memastikan efektivitas penyebaran insentif politik.

Dalam pelaksanaannya, *vote buying* tidak dijalankan secara individual oleh *broker*, melainkan melibatkan jaringan tim sukses yang berada di bawah koordinasinya. Dalam struktur klientelistik, *broker* berperan sebagai perantara atau pihak ketiga yang menjembatani antara *patron* dan *client*, sekaligus mengatur strategi distribusi sumber daya politik. Pelaksana teknis di lapangan terdiri dari tim-tim operasional yang memiliki kedekatan sosial dengan pemilih dan bertugas memastikan penyaluran insentif berjalan lancar serta tepat Sasaran. Informasi dari warga menunjukkan bahwa pemberian uang dilakukan secara langsung oleh anggota tim sukses kepada pemilih, dan dalam beberapa kasus, nilai nominal yang diberikan cukup besar untuk memengaruhi pilihan politik. Salah satu informan mengamati bahwa tetangganya menerima sejumlah uang untuk memilih kandidat tertentu, dan setelah menerima uang tersebut, benar-benar memberikan dukungan sesuai arahan. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan *vote buying* sangat bergantung pada keberadaan jaringan lokal yang solid, serta efektivitas sistem distribusi yang terorganisir secara hierarkis di bawah koordinasi *broker*.

2. Pemberian-pemberian Pribadi (*Individual Gifts*)

Selain melakukan pembelian suara (*vote buying*) untuk memenangkan Pilkades Desa Purwadadi periode 2022–2028, Markun Marhani juga menerapkan pola patronase dan *clientelism* dalam bentuk pemberian pribadi atau *individual gifts*. Strategi ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat efektivitas pembelian suara yang dijalankan secara sistematis. Berbagai jenis pemberian diberikan kepada pemilih dengan tujuan memastikan dukungan suara. Pola klientelistik ini kemudian dikemas dalam kegiatan bertajuk "Malam Towongan", yang menjadi sarana simbolik dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Malam Towongan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan pada malam hari menjelang pelaksanaan suatu hajat besar. Dalam tradisi masyarakat Desa Purwadadi, kegiatan ini umumnya dilangsungkan menjelang acara penting seperti pernikahan, hajat bumi, maupun perayaan keagamaan dan kebudayaan lainnya. Secara kultural, *Malam Towongan* diisi dengan doa bersama yang dilakukan oleh warga yang berkumpul di

satu tempat. Tujuan utama dari ritual ini adalah memohon kelancaran dan keberkahan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam praktiknya, masyarakat biasanya turut membawa dan menyiapkan makanan khas daerah sebagai bagian dari bentuk kebersamaan dan gotong royong.

Dengan mengadopsi bentuk kebudayaan lokal, Marhani menyelenggarakan *Malam Towongan* tepat satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Melalui jaringan *broker*-nya, ia mengundang masyarakat untuk datang ke kediamannya pada malam hari menjelang pencoblosan. Berbeda dari tradisi *Malam Towongan* yang umumnya diisi dengan doa bersama, kegiatan tersebut diubah menjadi ajang makan-makan gratis. Marhani menyediakan aneka makanan, minuman, dan rokok yang dapat dinikmati secara cuma-cuma oleh warga yang hadir. Tujuan dari pemberian ini adalah untuk memperkuat kedekatan emosional dengan pemilih dan menciptakan rasa keterikatan sebagai bentuk komitmen dukungan suara kesokan harinya. Menurut keterangan warga, acara tersebut berlangsung terbuka dan meriah, serta dipahami sebagai bagian dari strategi untuk memastikan loyalitas politik. Marhani sendiri mengakui bahwa seluruh pendanaan kegiatan bersumber dari dana kampanye, dan ia menyiapkan lebih dari satu kuintal daging untuk menjamu para tamu yang hadir.

Pernyataan mengenai pelaksanaan *Malam Towongan* sebagai bagian dari strategi pemberian pribadi juga diperkuat oleh keterangan masyarakat setempat. Salah seorang warga menyampaikan bahwa pada malam sebelum pencoblosan memang berlangsung sebuah acara yang dihadiri banyak orang, di mana Marhani diketahui menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumsi secara gratis. Menurut warga tersebut, makanan seperti daging dan ikan, termasuk rokok dalam jumlah besar, dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Informasi ini memperjelas bahwa kegiatan tersebut dipahami publik sebagai bentuk pemberian personal yang dibungkus dalam kemasan budaya lokal untuk memperkuat dukungan politik.

3. Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activities*)

Sebagai bagian dari variasi praktik patronase dan *clientelism*, Markun Marhani juga menerapkan strategi pelayanan dan aktivitas atau *services and activities* dalam rangka memenangkan Pilkades Desa Purwadadi. Bentuk layanan ini dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan aspek keagamaan, kesehatan, dan olahraga. Dalam masa kampanye, Marhani aktif menghadiri acara keagamaan di lingkungan masyarakat, menjalin silaturahmi, serta turut hadir dalam kegiatan olahraga dan pelayanan kesehatan. Menurut pengakuannya, kehadiran dalam berbagai forum tersebut bukan hanya untuk menunjukkan kedekatan dengan warga, tetapi juga menjadi medium untuk meminta restu, memperkuat citra personal, dan memperluas basis dukungan politik.

Dengan dalih menjalin silaturahmi dan meminta doa restu, Marhani memanfaatkan berbagai kegiatan sosial sebagai sarana untuk mempromosikan dirinya sebagai calon kepala desa. Dalam konteks ini, promosi tidak dilakukan secara eksplisit melalui kampanye formal, melainkan melalui pembentukan dan fasilitasi atas kebutuhan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dukungan material maupun logistik untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas lokal. Dalam keterangannya, Marhani menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari wataknya yang terbiasa membantu warga yang membutuhkan. Namun dalam praktik politik elektoral, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari strategi *services and activities* dalam skema klientelisme elektoral.

Keterangan mengenai keterlibatan Marhani dalam kegiatan sosial selama masa kampanye turut diperkuat oleh pernyataan masyarakat setempat. Salah satu informan menyebutkan bahwa Marhani secara aktif berkontribusi dalam berbagai acara, seperti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok muslimat, kegiatan olahraga seperti senam massal, serta beberapa acara yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Meski dalam beberapa kesempatan kehadirannya digantikan oleh anggota keluarganya, khususnya anaknya, hal tersebut tidak mengurangi persepsi masyarakat terhadap komitmennya. Kehadiran dan dukungan ini dipahami sebagai bentuk kedekatan sosial sekaligus sarana untuk memperkuat pencitraan sebagai calon kepala desa yang peduli dan hadir di tengah masyarakat.

Dengan demikian, ketiga variasi bentuk patronase dan *clientelism* yang diterapkan, yaitu *vote buying*, *individual gifts*, dan *services and activities*, merupakan bagian dari pola politik yang digunakan oleh Marhani untuk mendukung kemenangannya dalam kontestasi Pilkades Desa Purwadadi periode 2022–2028. Strategi ini memperlihatkan bahwa pendekatan relasional dan non-programmatik menjadi mekanisme utama dalam membangun basis dukungan elektoral di tingkat lokal.

Kesimpulan

Pilkades Desa Purwadadi tahun 2022 dimenangkan oleh Markun Marhani, seorang kandidat yang memiliki rekam jejak masa lalu yang sempat menuai kontroversi. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, serta riwayat kepemimpinan yang sebelumnya pernah terganggu oleh persoalan hukum, Marhani berhasil memperoleh suara terbanyak. Kemenangan ini tidak lepas dari penerapan strategi patronase dan *clientelism* yang dijalankan secara sistematis, melalui hubungan klientelistik dengan elite politik lokal yang difasilitasi oleh perantara *broker*.

Tiga bentuk utama dari praktik klientelisme yang digunakan mencakup *vote buying*, *individual gifts*, dan *services and activities*. *Vote buying* dilakukan melalui distribusi uang tunai kepada pemilih oleh jaringan *broker*; *individual gifts* diwujudkan dalam bentuk kegiatan “Malam Towongan” yang menyajikan konsumsi gratis menjelang pencoblosan; sementara *services and activities* dijalankan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial seperti keagamaan, olahraga, dan kesehatan. Efektivitas strategi ini diperkuat oleh karakter budaya politik subjek (*subject political culture*) yang cenderung pasif dan emosional, serta sikap pragmatis masyarakat yang menerima praktik klientelisme sebagai bagian wajar dari proses elektoral di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Almond, G. & Verba, S. (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andhika, L. R. (2019). Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Kajian* 22 (3), 205-219.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1513>
- Andri, R. D. (2022). Teori Kekuasaan. *YUDABBIRU: Jurnal Administrasi Negara*.
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/2574>
- Aspinall E. & Berenschot, E. A. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Aspinall E. & Sukmajati, E. A. (2015). *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bulqiyah, H. & Musrifah, S. (2022). Incumbent: Kekuatan Modal Sosial dalam Pemeilihan Kepala Desa di Pulau Bawean Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14 (3), 667-681.
- Chalik, D. A. (2017). *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Cindy Septiani Saputri, M. A. (2022). Strategi Kemenangan Arif Maskur dalam Pemilihan Kepala Desa Kesuben Kecamatan Lebaksu Kabupaten Tegal Periode Jabatan Tahun 2018-2024. *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32725>
- Dewi, H. P. (2019). *Gerakan Penolakan Warga Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Terhadap Kepala Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Dian Ariyani Surya, A. N. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36>
- Dwipayana, A. A. (2009). Demokrasi Biaya Tinggi: Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12 (3), 257-279. <https://doi.org/10.22146/jsp.10971>
- Gunawan, W. (2019). Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu. *Jurnal Academia Praja*, 2(02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.118>
- Hadisaputra, D. M. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Haryono. (2017). *Elit, Masa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov.
- Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13 (2), 131-148. <https://doi.org/10.22146/jsp.10958>
- Hicken, N. A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14(1), 289–310. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>
- Kartiwa, P. D. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *SOSIO DIDAKTIKA Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>
- Komariah, P. D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lasswell, H. D. (2011). *Politics: Who Gets What, When, How*. Montana: Literary Licensing, LLC
- Leda, M. F. (2023). Optimalisasi Modal Sosial sebagai Strategi Kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Wolowea Barat Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2). https://www.researchgate.net/publication/370777869_Optimalisasi_Modal_Sosial_sebagai_Strategi_Kemenangan_dalam_Pemilihan_Kepala_Desa_Wolowea_Barat_Tahun_2021

- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 10 (1), 17. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Muqooyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287. <https://doi.org/10.31078/jk1025>
- Nugroho, M. N. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 13(1), 167–184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Nur Ainuna, M. I. (2021). Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli. *Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 25–37. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.104>
- Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Dampak dan Penyebab Konflik. *Jurnal Penelitian Politik* 7(2), 13. <https://doi.org/10.14203/jpp.v7i2.499>
- Oktaviano, O. (2017). Analisis Kemenangan Suryono Pada Pemilihan Kepala Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Periode Tahun 2015-2021 (Analisis Figur dan Tim Sukses). *Journal of Politic and Government Studies*, 6 (4), 271-280. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17638>
- Rohman, K. (2016). Analisis Faktor Kemenangan Annaj Must Tsaqib dalam Pemilihan Kepala Desa Pahesan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies* 5 (2), 201-210. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/11283>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiwati, R. (2018). Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 39-49. <https://doi.org/10.15294/upsj.v2i1.21655>
- Wahyono, E. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.388>